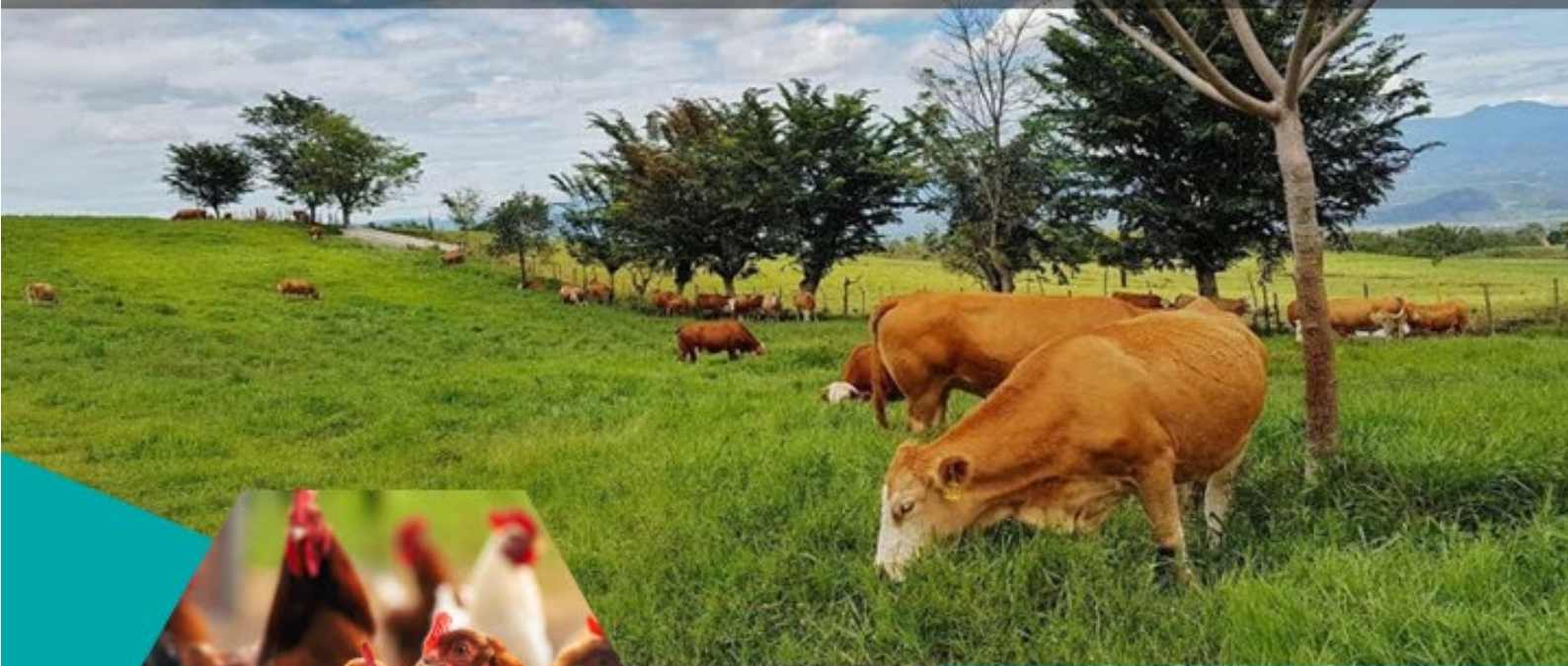




**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



LAPORAN KINERJA 2019



<http://ditjennak.pertanian.go.id>



Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan



Ditjen PKH Kementan RI



@ditjen_pkh



@ditjen_pkh

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 dapat tersusun. Laporan Kinerja ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2019.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja mencakup ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk terwujudnya *Good Governance*.

Jakarta, Februari 2020

Direktur Jenderal



I Ketut Diarmita



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4 Sumber Daya Manusia.....	7
1.5 Dukungan Anggaran	8
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis (Renstra).....	9
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.3 Perjanjian Kinerja	14
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran	17
3.2 Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2019.....	17
3.3 Kinerja Lainnya	92
3.4 Akuntabilitas Keuangan	95
IV. PENUTUP	99



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran Ditjen PKH TA. 2019 Per Kewenangan Per Jenis Belanja.....	8
Tabel 2.	Anggaran Ditjen PKH TA. 2019 Per Kegiatan	8
Tabel 3.	Indikator Tujuan Ditjen PKH	9
Tabel 4.	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tahun 2018-2019.....	10
Tabel 5.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2019.....	14
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2019.....	15
Tabel 7.	Kegiatan/Output Ditjen PKH TA. 2019	16
Tabel 8.	Capaian Sasaran Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019	18
Tabel 9.	Volume Ekspor Produk Pangan Hewani Asal Ternak Utama Tahun 2015-2019	21
Tabel 10.	Pertumbuhan Volume Ekspor Untuk Produk Pangan Hewani Asal Ternak	22
Tabel 11.	Nilai Ekspor Produk Pangan Hewani Asal Ternak Utama Tahun 2015-2019	22
Tabel 12.	Rata-rata Pertumbuhan Populasi Ayam di Indonesia Tahun 2015-2019.	24
Tabel 13.	Nilai Realisasi Ekspor Obat Hewan Tahun 2019 Berdasarkan Laporan Eksporir	25
Tabel 14.	Pertumbuhan Volume Ekspor Produk Pangan Hewani Asal Ternak Utama Tahun 2018-2019	27
Tabel 15.	Pelaku Usaha dalam Proses Penyiapan Ekspor Komoditas Peternakan	30
Tabel 16.	Perkembangan Investasi Subsektor Peternakan, 2015-2019.....	32
Tabel 17.	Kegiatan Pendukung IKU I Tahun 2019	32
Tabel 18.	Penurunan Volume Untuk Produk Pangan Hewani Asal Ternak.....	34
Tabel 19.	Penurunan Volume Impor Untuk Produk Pangan Hewani Asal Ternak...	35
Tabel 20.	Kegiatan Pendukung IKU II Tahun 2019	37
Tabel 21.	Rekapitulasi Muatan Ternak 2015-2019.....	45
Tabel 22.	Produksi daging sapi dan kerbau Tahun 2015-2019	46
Tabel 23.	Kinerja Optimalisasi Reproduksi melalui Kegiatan Upsus Siwab Tahun 2017 – 2019	50
Tabel 24.	Kegiatan Pendukung IKU III Tahun 2019	53
Tabel 25.	Penambahan Indukan Impor Tahun 2015-2018	55
Tabel 26.	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak)	57
Tabel 27.	Rasio ketersediaan Alsin 2015-2019.....	59
Tabel 28.	Kegiatan Pendukung IKU IV Tahun 2019.....	60
Tabel 29.	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	62
Tabel 30.	Rincian hasil pemeriksaan laboratorium.....	62
Tabel 31.	Perkembangan Wilayah yang Terbebas Penyakit Menular Strategis Tahun 2015- 2019	63
Tabel 32.	Daerah bebas penyakit hewan	65
Tabel 33.	Kegiatan Pendukung IKU V Tahun 2019.....	68
Tabel 34.	Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan.....	69



Tabel 35. Hasil Evaluasi AKIP Ditjen PKH Tahun 2013 s.d 2017	70
Tabel 36. Kegiatan Pendukung IKU VI Tahun 2019.....	72
Tabel 37. Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 214/2017).....	73
Tabel 38. Kegiatan Pendukung IKU VII Tahun 2019.....	77
Tabel 39. Nilai Persepsi, Interval IKM, Konversi IKM, Mutu dan Kinerja Pelayanan Semester I.....	79
Tabel 40. Nilai Persepsi, Interval IKM, Konversi IKM, Mutu dan Kinerja Pelayanan Semester II.....	79
Tabel 41. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH.....	80
Tabel 42. Perhitungan Nilai IKM.....	80
Tabel 43. Nilai Unsur Pelayanan Ditjen PKH	82
Tabel 44. Kegiatan Pendukung IKU VIII Tahun 2019.....	82
Tabel 45. Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia.....	84
Tabel 46. Jumlah Kasus Lyssa tahun 2018-2019	84
Tabel 47. Data Kasus Zoonosis Tahun 2014-2019	86
Tabel 48. Kegiatan Pendukung IKU IX Tahun 2019.....	86
Tabel 49. Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia.....	89
Tabel 50. Kasus-kasus Penyimpangan Pangan Segar Hewani Asal Ternak	89
Tabel 51. Data Kasus Pangan Segar Hewani Asal Ternak Nasional	90
Tabel 52. Kegiatan Pendukung IKU X Tahun 2019.....	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Sebaran Unit Usaha Perunggasan Bersertifikat Bebas AI Tahun 2019	28
Gambar 2.	Jumlah Unit Usaha yang sudah Memiliki NKV Tahun 2015-2019	29
Gambar 3.	Realisasi Fasilitasi Program Kemitraan BUMN Untuk Sub Sektor Peternakan.....	42
Gambar 4.	Sebaran Realisasi Fasilitasi Program Kemitraan BUMN Th. 2018-2019	43
Gambar 5.	Pengembangan Kawasan Korporasi Berbasis Peternak.....	44
Gambar 6.	Peta Sebaran Petugas Pelayanan PIP	44
Gambar 7.	Capaian Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	48
Gambar 8.	Dashboard Nilai Kinerja (NK) Ditjen PKH Per 7 Februari 2020	74
Gambar 9.	Piagam Penghargaan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	92
Gambar 10.	Sertifikat Penghargaan Penerapan ISO 37001 : 2016	93
Gambar 11.	Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	94
Gambar 12.	Penghargaan SNI Award	95
Gambar 13.	Piala Lomba Inovasi Teknologi Informasi.....	95
Gambar 14.	Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2019	97



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi SDM Ditjen PKH	7
Grafik 2. Pertumbuhan Populasi Babi Tahun 2015-2019.....	23
Grafik 3. Pertumbuhan Produksi Daging Ayam pada periode 2015-2019.....	24
Grafik 4. Ekspor Produk Premiks Berupa Bahan Baku Asam Amino.....	26
Grafik 5. Perkembangan Investasi PMDN dan PMA Peternakan Sapi/Kerbau 2015-2019	39
Grafik 6. Realisasi DPD AUTSK VS Bantuan Premi	40
Grafik 7. Realisasi Kredit Usaha Rakyat Sub Sektor Peternakan, 2015-2019	41
Grafik 8. Jumlah Debitur Dan Realisasi Akad Kredit KUR Tahun 2019	42
Grafik 9. Produksi Daging Sapi dan Kerbau (Karkas) Tahun 2015-2019*	47
Grafik 10. Perkembangan Harga Daging Sapi dan Daging Ayam Tahun 2015-2019	52
Grafik 11. Populasi Sapi dan Kerbau 2015-2019*	54
Grafik 12. Jumlah Alsintan yang telah difasilitasi 2015-2019 (unit).....	58
Grafik 13. Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen PKH Tahun 2014-2018.....	70
Grafik 14. Nilai Kinerja (NK) Ditjen PKH Tahun 2015-2019	75
Grafik 15. Perkembangan Nilai IKM Ditjen PKH Tahun 2015-2019	81
Grafik 16. Jumlah kasus Zoonosis (Rabies, AI, Antraks) Tahun 2014-2019.....	85
Grafik 17. Serapan Anggaran Ditjen PKH 2015-2019.....	97
Grafik 18. Komposisi dan Penyerapan Anggaran 2019	98



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	104
Lampiran 2. Rekapitulasi Pegawai Ditjen PKH berdasarkan pendidikan terakhir .	105
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	106
Lampiran 4. Pernyataan Telah Direviu Oleh Itjen Kementan	109
Lampiran 5. Tabel Populasi Ternak Tahun 2015-2019	110
Lampiran 6. Tabel Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2015-2019	111
Lampiran 7. PDB Atas Dasar Harga Konstan Subsektor Peternakan Tahun 2015-2019	112
Lampiran 8. NTPT Peternakan (NTPT) Tahun 2019.....	113
Lampiran 9. Perhitungan Nilai Efisiensi	114
Lampiran 10. Pelaku Usaha Yang Siap Ekspor	116
Lampiran 11. Pelaku Usaha Binaan Mendukung Substitusi Impor Produk Peternakan	119



RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019 telah memasuki tahun kelima. Tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekspor, menekan volume impor produk peternakan dan kesehatan hewan melalui peningkatan investasi, fasilitasi alat dan mesin bidang peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan status kesehatan hewan, perbaikan manajemen melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya yang dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik pendekatan yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun pendekatan intervensi melalui belanja pemerintah (APBN).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun kebijakan di bidang produksi ternak dan pengembangan ternak. Untuk itu, Ditjen PKH mewujudkannya dalam bentuk program yaitu “Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat”, dengan sepuluh indikator yaitu: (1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak; (2) Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak; (3) Produksi daging sapi dan kerbau; (4) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak; (5) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; (6) Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan; (7) Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011); (8) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH; (9) Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia; (10) Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent, transparant, akuntabel, efektif, dan efisien* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Capaian sasaran program Ditjen PKH pada tahun 2019 termasuk kategori sangat berhasil. Capaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 berkisar antara 68,13% sampai dengan 314,6%. Dari sepuluh indikator kinerja, terdapat tujuh indikator kinerja yang capaiannya sangat berhasil (capaian >100%) yaitu Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak, Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak, Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH, Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada



manusia, Nilai Kinerja Ditjen PKH, dan Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia. Untuk indikator berhasil, yaitu: Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak, dan rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis Sedangkan indikator kinerja yang cukup berhasil (capaian 60-79%) adalah Produksi daging sapi dan kerbau.

Tahun 2019, alokasi APBN (anggaran Pendapatan Belanja Negara) Ditjen PKH sebesar 2,08 Triliun dengan realisasi serapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sebesar 93,87% atau Rp.1,96 Triliun. Realisasi anggaran yang masih tersisa 6,13% disebabkan oleh 1) kegiatan pengadaan itik untuk program SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) di provinsi Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan yang tidak dapat terealisasi karena kurang siapnya lahan, dan 2) beberapa pengadaan yang tidak terealisasi dan sisa pengadaan barang dan jasa.

Rencana Kerja Tahun 2020 untuk peningkatan percepatan produksi daging sapi di dalam negeri Ditjen PKH akan mencanangkan SIKOMANDAN yang merupakan kepanjangan dari Sapi Kerbau Komoditas Andalan Dalam Negeri. SIKOMANDAN merupakan strategi atau upaya peningkatan produksi daging sapi/kerbau, yang dalam operasionalnya terdiri dari sinergi/integrasi kegiatan dari Hulu-On Farm-Off Farm, antara lain:

1. Peningkatan kelahiran (Inseminasi Buatan dan Kawin Alam);
2. Produktifitas (tunda potong, pengemukan dan pemenuhan pakan);
3. Manajemen keswan (pencegahan penyakit dan penanganan gangguan reproduksi)
4. Keamanan dan mutu pangan (penyediaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia; penjaminan produk ASUH)
5. Pemerataan penyediaan pangan (supply demand, distribusi dan pemasaran)
6. Manajemen database (penguatan sistem data dan pelaporan on line melalui ISIKHNAS)



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun kebijakan di bidang produksi ternak dan pengembangan ternak dengan fungsi mencakup kebijakan di bidang perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Kinerja Ditjen PKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat diukur dari aspek makro ekonomi dan aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan. Dari aspek makro ekonomi terkait dengan kinerja produk domestik bruto peternakan, investasi baik PMDN maupun PMA, dan kesejahteraan peternak. Sedangkan dari aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan dikaitkan dengan produksi dan populasi ternak.

Berdasarkan kinerja dari makro ekonomi menunjukkan bahwa untuk Produk Domestik Bruto (PDB) peternakan selama lima tahun (2010-2015) atas dasar harga konstan telah tumbuh 4,67% per tahun. Pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan, lebih tinggi dari pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti sempit) yang hanya sebesar 4,26%. Pertumbuhan sub sektor peternakan selama kurun waktu 2009-2013 merupakan pertumbuhan tertinggi diantara sub sektor lainnya di lingkup pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sub sektor peternakan berpeluang sebagai sumber pertumbuhan baru sektor pertanian. Investasi baik PMDN maupun PMA relatif masih kecil yaitu kurang dari 1% secara nasional kurun waktu 2010-2015. Investasi didominasi oleh sektor perunggasan yaitu untuk PMDN sebesar 78,69% dan PMA sebesar 73,09%. Sedangkan untuk investasi lainnya yaitu peternakan sapi dan kerbau meningkat sebesar 5,6%, peternakan lainnya sebesar 13,19% untuk PMDN dan PMA peternakan sapi dan kerbau sebesar 8,80%, peternakan lainnya sebesar 14,66%.

Dalam rentang waktu 5 tahun (2010-2015) pertumbuhan populasi ternak besar rata-rata mengalami kenaikan, kecuali kerbau mengalami penurunan yaitu : sapi potong 4,28%, sapi perah 3,41%, kuda 0,76% dan kerbau (6,54%), sedangkan pertumbuhan populasi ternak kecil meningkat yaitu: kambing 3,43%, domba 12,15%, dan babi 1,14%. Pertumbuhan populasi ternak unggas dan aneka ternak rata-rata meningkat, masing-masing sebesar: ayam buras 2,67%, ayam ras petelur 10,29%, ayam ras pedaging 11,57%, itik 8,50%, kelinci 25,07%, dan itik manila mencapai 14,84%. Untuk ternak unggas lainnya, seperti kelinci, burung puyuh, dan merpati meningkat signifikan masing-masing sebesar 8,84%; 20,89 dan 54,26%.

Dalam kurun waktu 5 tahun produksi daging dan telur nasional meningkat, sedangkan produksi susu turun sebesar 2,65%. Produksi daging nasional



meningkat sebesar 5,48% yang berasal dari kontribusi hampir seluruh komoditi, kecuali kambing dan domba yang turun masing-masing sebesar 1,34% dan 0,56%, sedangkan produksi telur meningkat sebesar 6,21%.

Selain itu, Ditjen PKH masih menghadapi tantangan terkait: 1) Kelembagaan yang terkait dengan efektifitas kemitraan, peran koperasi, dukungan perbankan dan asuransi; 2) Konsistensi kebijakan dan instrumentasi kebijakan; 3) Kemampuan SDM; 4) Infrastruktur (kualitas RPH, sarana transportasi); 5) Persaingan dan liberalisasi pasar; 6) Ketergantungan sarana produksi dari impor; 7) Penyakit eksotik; 8) Persaingan dalam penggunaan lahan dan alih fungsi lahan.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas Ditjen PKH mewujudkannya dalam bentuk program yaitu “Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat”. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent, transparent, akuntabel, efektif dan efisien* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2019. Selain itu juga untuk melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.

Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.



1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas *“merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan”*. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II, yaitu Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Pakan, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran



Hasil Peternakan, dan Sekretariat Direktorat Jenderal. Keenam Eselon II tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

- (2) Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pakan menyelenggarakan fungsi :
 - (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.



- (3) Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.
- (4) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan,



- sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan
- (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (6) Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
- (a) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - (b) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - (c) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - (d) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - (e) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

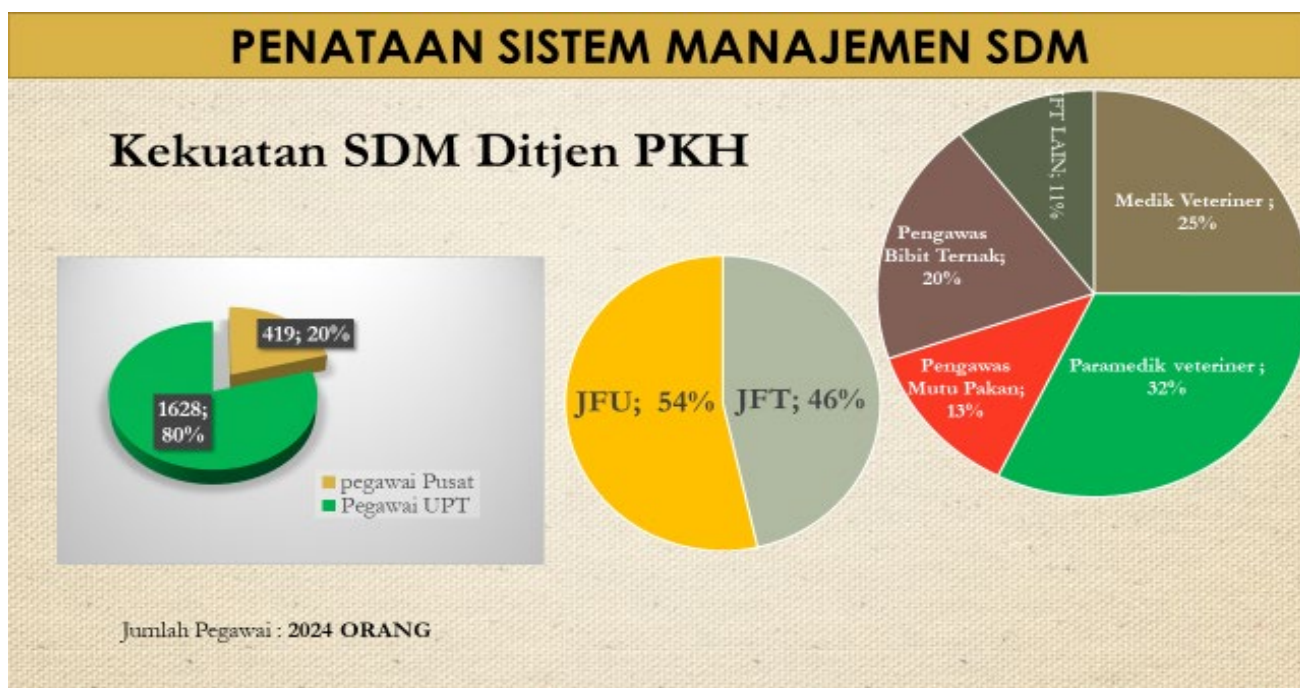


Selengkapnya Struktur Organisasi Ditjen PKH Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1.

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Jumlah SDM Ditjen PKH tahun 2019 sebanyak 2.024 orang, yang terdiri dari:

1. Jumlah pegawai menurut Eselon II: Sekretariat Direktorat Jenderal 141 orang, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak 65 orang, Direktorat Pakan 55 orang, Direktorat Kesehatan Hewan 71 orang, Direktorat Kesmavet 46 orang, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 44 orang
2. Jumlah pegawai pusat dan UPT: Pegawai pusat 423 orang, sedangkan pegawai UPT 1.606 orang
3. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV 240 orang, golongan III 1.308 orang, golongan II 477 orang dan golongan I 33 orang
4. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 22 orang, S-2 sebanyak 510 orang, S-1/D-4 sebanyak 519 orang, Sarjana Muda/D3/D2 sebanyak 235 orang, SLTA sebanyak 625 orang, SLTP sebanyak 54 orang, dan SD sebanyak 60 orang.
5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: Laki-laki sebanyak 1.237 orang dan perempuan sebanyak 787 orang.



Grafik 1. Komposisi SDM Dtjen PKH

Selengkapnya data pegawai Ditjen PKH disajikan pada Lampiran 2.

1.5 Dukungan Anggaran

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Ditjen PKH pada tahun 2019 memperoleh dukungan dari APBN sebesar Rp 2,089 Triliun. Anggaran tersebut dibagi berdasarkan kewenangan, dimana bobot terbesar anggaran terdapat pada Kantor Daerah (KD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKH sebesar Rp 1,34 Triliyun (64,14%). Sedangkan berdasarkan jenis belanja bobot terbesar pada Belanja Barang sebesar Rp 1,834 Triliun (87,79%), dan berdasarkan jenis kegiatan bobot terbesar pada Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp 1,323 Triliyun (63,34%).

Tabel 1. Anggaran Ditjen PKH TA. 2019 Per Kewenangan Per Jenis Belanja (Rp 000)

No	Kewenangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
1	Kantor Pusat	31.519.614	207.516.824	7.638.001	246.674.439
2	Kantor Daerah	113.891.651	1.123.575.130	102.756.809	1.340.223.590
3	Tugas Pembantuan		502.694.008		502.694.008
	Total	145.411.265	1.833.785.962	110.394.810	2.089.592.037

Sumber : Aplikasi OM SPAN

Tabel 2. Anggaran Ditjen PKH TA. 2019 Per Kegiatan (Rp 000)

No	Nama Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	105.695.795
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	234.586.295
3	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	1.323.523.487
4	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	45.494.135
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	356.764.051
6	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	23.528.274
	Total	2.089.592.037

Sumber : Aplikasi OM SPAN



II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Dalam melaksanakan visi dan misinya pada tahun 2019, Ditjen PKH telah mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2015-2019, yang telah mengalami revisi pada tahun 2018 menyesuaikan perubahan Renstra Kementerian Pertanian.

Visi

Ditjen PKH dengan mengacu visi Kementerian Pertanian “**terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani**” merumuskan Visi Ditjen PKH sebagai berikut:

“Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak”

Misi

Menjabarkan dari Visi yang ditetapkan, Ditjen PKH akan mengemban Misi:

1. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak;
3. Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Tujuan

Sesuai dengan visi, misi dan tugas pokok dan fungsi Ditjen PKH dalam mendukung tujuan Kementerian Pertanian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, adalah:

1. Meningkatkan produksi ternak;
2. Meningkatkan kualitas komoditas ternak;
3. Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor;
4. Meningkatkan status kesehatan hewan;
5. Meningkatkan investasi peternakan;
6. Meningkatkan kesejahteraan peternak

Untuk mengukur tujuan yang akan dicapai maka ditetapkanlah indikator tujuan Ditjen PKH tahun 2015-2019 yang disampaikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Tujuan Ditjen PKH

Tujuan		Indikator Tujuan	Satuan	2019
a.	Meningkatkan produksi ternak	Produksi daging	Ribu ton	4.922,51
		Produksi telur	Ribu ton	3.770,00
		Produksi susu	Ribu ton	1.063,56



Tujuan		Indikator Tujuan	Satuan	2019
b.	Meningkatkan kualitas komoditas ternak	Ternak yang bersertifikat/SKLB	Ekor	3.730
c.	Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor	Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan	Persen	88,16
		Volume ekspor komoditi peternakan	Persen	6
d.	Meningkatkan status kesehatan hewan	Status kesehatan hewan	Persen	80
e.	Meningkatkan investasi peternakan	Investasi sub sektor peternakan PMA	Persen	2,5
		Investasi sub sektor peternakan PMDN	Persen	3
f.	Meningkatkan kesejahteraan peternak	Index Nilai Tukar Peternak	Index	108,12
		PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan	Rp Juta	44,17

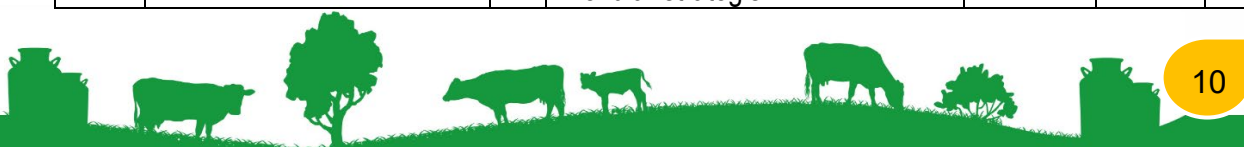
Sumber : Renstra Ditjen PKH Tahun 2015-2019 Rev III

Sasaran

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi pangan asal hewan, daya saing dan pendapatan peternak. Masing-masing sasaran tersebut mempunyai indikator yang ingin dicapai selama kurun waktu 2015-2019 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Adapun IKSP tersebut disampaikan pada Tabel 4

Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tahun 2018-2019

SASARAN PROGRAM		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	Target	
					2018	2019
SP1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional	1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak	%	20,5	25,0
		2	Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak	%	2,7	4,2
SP2	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional	3	Produksi daging sapi dan kerbau	Ribu ton	695	755
SP3	Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan	4	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak	%	27	30
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	5	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	79	80



SP5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan	Nilai	81	82
		7	Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011)	Nilai	80	85
SP6	Meningkatnya kualitas layanan publik Ditjen PKH	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH	Skala Likert (1-4)	3,2	3,3
SP7	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	9	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Jumlah	132	127
SP8	Terjadinya keamanan pangan strategis nasional	10	Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia	Jumlah	20	18

Sumber : Renstra Ditjen PKH Tahun 2015-2019 Rev III

Kebijakan dan Strategi

1. Arah dan Kebijakan

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyesuaikan dengan Kementerian Pertanian. Dalam arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tersebut telah ditetapkan kebijakan untuk peternakan dan kesehatan hewan yaitu :

- a) Percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya peternakan. Arah kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional peningkatan produksi daging melalui:
 - 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
 - 2) Pengembangan pakan ternak;
 - 3) Kesehatan hewan;
 - 4) Dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan;
 - 5) Dukungan manajemen kesekretariatan
- b) Peningkatan komoditas peternakan bernilai tambah dan berdaya saing. Kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional berupa peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui:
 - 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak
 - 2) Pengembangan pakan ternak
 - 3) Kesehatan hewan
 - 4) Pengolahan dan pemasaran hasil ternak
 - 5) Penjaminan pangan asal hewan ternak
 - 6) Dukungan manajemen kesekretariatan



2. Strategi

Dalam peta strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah disesuaikan dengan strategi Kementerian Pertanian, sehingga Strategi Ditjen Peternakan dan Kesehatan hewan terkait dengan strategi:

- 1) Mendorong peningkatan konsumsi pangan berbasis produksi lokal
- 2) Peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing
- 3) Penyediaan bahan baku bio industri dan bio energi
- 4) Peningkatan pendapatan keluarga petani
- 5) Peningkatan kualitas petani dan kelembagaannya
- 6) Peningkatan kualitas aparatur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Program dan Kegiatan

1. Program

Dengan melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2015 –2019 maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah merumuskan programnya yaitu :

**“Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat”**

Arah program mengarah pada 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu: kata kunci pertama, pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada pencapaian peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan.

2. Kegiatan

Untuk mencapai Sasaran Program yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak, daya saing dan pendapatan peternak dalam mendukung terwujudnya 3 Sasaran Strategis Kementan yang terkait dengan Ditjen Peternakan dan Keswan, diperlukan langkah operasional sebagai berikut:

- a) Peningkatan produksi pakan ternak akan ditempuh dengan kegiatan/langkah operasional yaitu:
 - 1) Hijauan pakan ternak
 - 2) Pakan olahan dan bahan pakan
 - 3) Mutu dan keamanan pakan
- b) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dengan langkah operasional:
 - 1) Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan



- 2) Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan
 - 3) Penanggulangan gangguan reproduksi
 - 4) Pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan
 - 5) Obat hewan dan bahan biologik
 - 6) Kelembagaan veteriner
- c) Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak dengan langkah operasional:
- 1) Optimalisasi reproduksi
 - 2) Benih ternak unggul
 - 3) Bibit ternak unggul
 - 4) Pengembangan ternak ruminansia potong
 - 5) Pengembangan ternak ruminansia perah
 - 6) Pengembangan unggas dan aneka ternak
- d) Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH dengan langkah operasional:
- 1) Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH
 - 2) Pengawasan mutu dan keamanan produk
 - 3) Pengendalian pemotongan betina produktif
- e) Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dengan langkah operasional:
- 1) Sarana pengolahan pangan dan non pangan
 - 2) Sarana pemasaran peternakan
 - 3) Kelembagaan dan usaha peternakan
- f) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan dengan langkah operasional
- 1) Layanan dukungan manajemen eselon 1
 - 2) Layanan internal (*overhead*)
 - 3) Layanan perkantoran

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9110/Kpts/RC.010/F/10/2018. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019. Indikator Kinerja Utama Ditjen PKH Tahun 2018-2019 disajikan pada Tabel 5.



Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2019

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR		Satuan	Target	
					2018	2019
SP1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional	1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak	%	20,5	25,0
		2	Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak	%	2,7	4,2
SP2	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional	3	Produksi daging sapi dan kerbau	Ribu ton	695	755
SP3	Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan	4	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak)	%	27	30
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	5	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	79	80
SP5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan	Nilai	81	82
		7	Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011)	Nilai	80	85
SP6	Meningkatnya kualitas layanan publik Ditjen PKH	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH	Skala Likert (1-4)	3,2	3,3
SP7	Terkendalnya kasus soonosis pada manusia	9	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Jumlah	132	127
SP8	Terjadinya keamanan pangan strategis nasional	10	Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia	Jumlah	20	18

Sumber : Renstra Ditjen PKH Tahun 2015-2019 Rev III

2.3 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2019 Direktur Jenderal PKH menyepakati perjanjian kinerja dengan 10 indikator yang ingin dicapai yaitu: (1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak; (2) Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak; (3) Produksi daging sapi dan kerbau; (4) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak; (5) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular



strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; (6) Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan; (7) Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011); (8) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH; (9) Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia; (10) Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia. Selengkapnya target indikator kinerja perjanjian kinerja Dirjen PKH Tahun 2018 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2019

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Target 2019
SP1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional	1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak	%	25
		2	Penurunan volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak	%	4,2
SP2	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional	3	Produksi daging sapi dan kerbau	Ribu ton	755
SP3	Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan	4	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak)	%	30
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	5	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	80
SP5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan	Nilai	82
		7	Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 214/2017)	Nilai	85
SP6	Meningkatnya kualitas layanan publik Ditjen PKH	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH	Skala Likert (1-4)	3,30
SP7	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	9	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Jumlah	127
SP8	Terjadinya keamanan pangan strategis nasional	10	Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia	Jumlah	18

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Menteri Pertanian Tahun 2018 disampaikan pada Lampiran 3.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, pada tahun 2019 Ditjen PKH melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:



Tabel 7. Kegiatan/Output Ditjen PKH TA. 2019

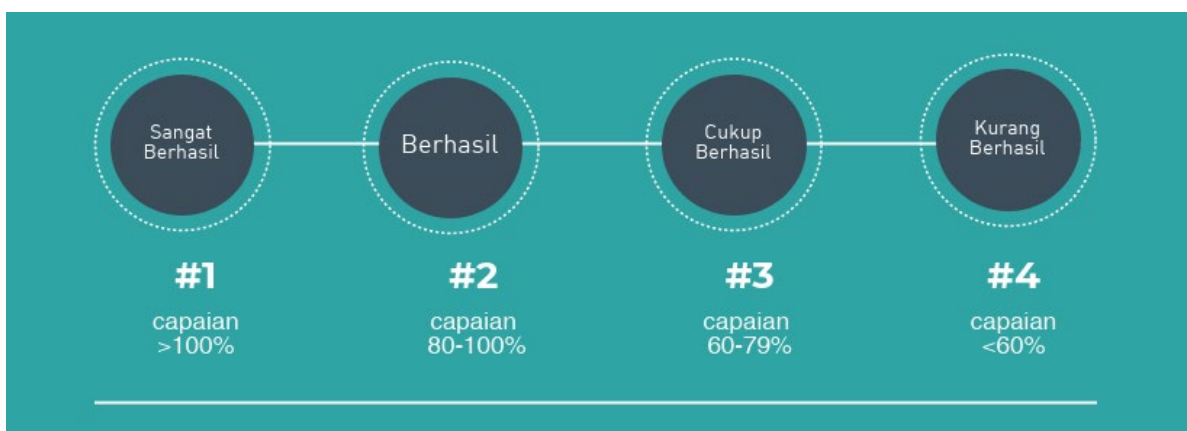
No	Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Target (Volume)
1	Direktorat Pakan		105.770.795.000	16.680,80
1	1783.400 Hijauan Pakan Ternak	Ha	31.414.054.000	1.752,00
2	1783.401 Pakan Olahan dan bahan pakan	Ton	62.252.155.000	9.928,80
3	1783.402 Mutu dan keamanan pakan	Sampel	12.104.586.000	5.000,00
2	Direktorat Kesehatan Hewan		234.586.295.000	9.155.953,40
1	1784.401 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	50.512.113.000	142.632,00
2	1784.402 Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	64.571.017.000	3.526.450,00
3	1784.403 Penanggulangan Gangguan Reproduksi	Ekor	18.380.169.000	67.780,00
4	1784.404 Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	13.536.452.000	1.610,40
5	1784.405 Obat Hewan dan Bahan Biologik	Dosis	17.037.974.000	5.417.100,00
6	1784.406 Kelembagaan Veteriner	Unit	70.548.570.000	381,00
3	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak		1.323.687.987.000	20.143.978,01
1	1785.319 Optimalisasi Reproduksi	Akseptor	356.514.905.000	3.000.000,00
2	1785.400 Benih Ternak Unggul	dosis	54.549.193.000	4.576.700,00
3	1785.401 Bibit Ternak Unggul	ekor	58.251.987.000	580.181,00
4	1785.402 Pengembangan ternak ruminansia potong	Ekor	117.498.324.000	9.490,00
5	1785.403 Pengembangan ternak ruminansia perah	Ekor	8.313.930.000	327,00
6	1785.404 Pengembangan unggas dan aneka ternak	Ekor	728.559.648.000	11.977.280,01
4	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner		45.494.135.000	26.036,04
1	1786.400 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	13.756.657.000	135,04
2	1786.401 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Sampel	22.147.397.000	25.821,00
3	1786.402 Pengendalian Pematangan Betina produktif	Lokasi	9.590.081.000	80,00
5	Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan		356.524.551.000	114,00
1	1787.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	86.447.868.000	65,00
2	1787.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	59.697.378.000	15,00
3	1787.994 Layanan Perkantoran	Layanan	210.379.305.000	34,00
6	Direktorat Pemasaran dan Pengolahan hasil Peternakan		23.528.274.000	92,01
1	5891.400 Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	3.400.000.000	17,00
2	5891.401 Sarana Pemasaran Peternakan	Unit	1.388.000.000	5,00
3	5891.402 Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Dokumen	18.740.274.000	70,01
Total			2.089.592.037.000	29.342.854,26



III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menggunakan metode *scoring*, yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60- <80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Ditjen PKH tahun 2019 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2019 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*:



Evaluasi kinerja Ditjen PKH tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2019 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

3.2 Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2019

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 (Revisi III) memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 10 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui 2 jenis target yaitu *maximize target* dan *minimize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Sebaliknya, yang dimaksud dengan *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya.



Indikator kinerja yang termasuk dalam kategori *maximize target* adalah sebagai berikut: (1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak; (2) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak; (3) Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan; (4) Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 214/2017); (5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH; (6) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; dan (7) Produksi daging sapi/kerbau.

Maximize target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

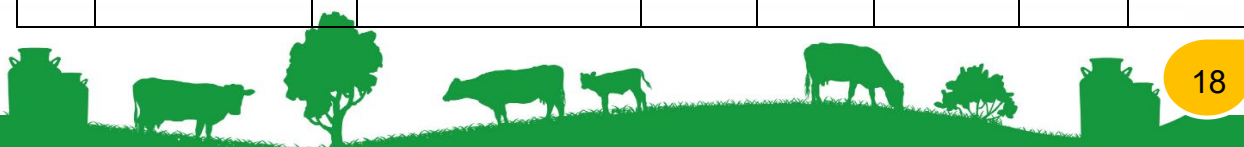
Indikator kinerja yang termasuk dalam kategori *minimize target* adalah sebagai berikut: (1) Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia; (2) Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia (3) Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak. Kategori *minimize target* dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2019 selengkapnya disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Ukuran Keberhasilan	
SP1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional	1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak	%	25	78,65	314,6	Sangat Berhasil
		2	Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak	%	4,2	3,82	90,99	Berhasil
SP2	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional	3	Produksi daging sapi dan kerbau	Ribu ton	755	514,4	68,13	Cukup Berhasil



Sasaran Program		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Ukuran Keberhasilan
SP3	Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan	4 Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak)	%	30	34,60	115,33	Sangat Berhasil
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	5 Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	80	78,10	97,63	Berhasil
SP5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	6 Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan	Nilai	82	83,30	101,59	Sangat Berhasil
		7 Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 214/2017)	Nilai	85	87,82	103,32	Sangat Berhasil
SP6	Meningkatnya kualitas layanan publik Ditjen PKH	8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH	Skala Likert (1-4)	3,30	3,40	103,03	Sangat Berhasil
SP7	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	9 Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Jumlah	127	122	103,94	Sangat Berhasil
SP8	Terjadinya keamanan pangan strategis nasional	10 Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia	Jumlah	18	10	144,44	Sangat Berhasil

Sumber: 1) Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2018; 2) Buku Statistik PKH 2018; 3) Direktorat lingkup Ditjen PKH; 6) Pusdatin.



Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 8 di atas, dapat dikatakan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan, serta segenap jajaran Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2019.

Dari 8 (delapan) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis, sebagian besar indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil dan berhasil (sangat berhasil 7 indikator dan berhasil 2 indikator). Dari hasil evaluasi terdapat 1 (satu) indikator yang cukup berhasil.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak; (2) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak; (3) Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan; (4) Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 214/2017); (5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH; (6) Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia; (7) Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak; (2) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis. Indikator kinerja yang masuk kategori **cukup berhasil** yaitu: produksi daging sapi/kerbau.

Selengkapnya analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis disampaikan sebagai berikut:

Sasaran Program 1 (SP1) MENINGKATNYA NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING KOMODITAS PANGAN HEWANI ASAL TERNAK NASIONAL

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas sub sektor peternakan telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti obat hewan dan produk unggas. Namun demikian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan impor melalui peningkatan produksi komoditas substitusi impor. Demikian pula dalam rangka mendukung akselerasi ekspor, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan sertifikasi kesehatan hewan dan produk hewan, serta



penjaminan keamanan produk pangan hewani asal ternak yang merupakan persyaratan ekspor.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak; dan (2) Penurunan volume impor untuk produk produk pangan hewani asal ternak.

SP1. IKU1	
Pertumbuhan Volume Ekspor Untuk Produk Pangan Hewani Asal Ternak	
Target 25%	Realisasi 78,65%
% Capaian 314,60%	

Volume ekspor produk pangan hewani asal ternak terdiri dari volume ekspor 7 (tujuh) komoditas, yaitu: kambing hidup, domba hidup, babi hidup, daging ayam potong, telur tetas, anak ayam (*Day Old Chick – DOC*), serta obat hewan. Target kinerja pertumbuhan volume ekspor produk pangan hewani asal ternak tahun 2019 adalah sebesar 25%. Cara perhitungan capaian indikator pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewan asal ternak ini adalah volume ekspor produk pangan hewani asal ternak tahun berjalan ($t = 2019$) dikurangi volume ekspor produk pangan hewani asal ternak tahun sebelumnya ($t-1 = 2018$), dibagi volume ekspor produk pangan hewani asal ternak tahun sebelumnya ($t-1 = 2018$) dikali 100%. Mempertimbangkan bahwa setiap jenis produk memiliki nilai ekonomi yang berbeda, tidak berarti produk yang berat selalu bernilai lebih tinggi, maka perhitungan pertumbuhan volume ekspor produk dilakukan terhadap masing-masing produk, selanjutnya untuk pertumbuhan total seluruh produk diperoleh dari rerata pertumbuhan seluruh produk. Berdasarkan manual perhitungan indikator tersebut dihasilkan capaian indikator kinerja ekspor tahun 2019 seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Volume Ekspor Produk Pangan Hewani Asal Ternak Utama Tahun 2015-2019

Komoditas	2015	2016	2017	2018	2019*	Pertumbuhan (%)
	Volume (Ton)	Volume (Ton)	Volume (Ton)	Volume (Ton)	Volume (Ton)	% 2019/2018
Babi Hidup	28.145,60	27.575,40	28.711,95	27.862,64	30.721,54	10,26
Domba Hidup	0,00	0,00	0,00	81,50	21,00	-74,23
Kambing Hidup	12,78	0,00	6,24	11,26	15,12	34,34
DOC	0,00	0,00	0,04	3,41	11,08	225,26
Daging Ayam Potong	4,25	16,13	311,91	400,65	722,77	80,40
Telur Tetas	9,20	303,05	376,19	46,07	166,71	261,87
Obat Hewan	562,40	616,44	549,03	739,51	832,92	12,63
Rerata Pertumbuhan						78,65

Sumber: Pusdatin



a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Rerata pertumbuhan volume ekspor tahun 2019 mencapai 78,05%, sehingga capaian kinerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk indikator kinerja sasaran program ini masuk dalam kategori sangat berhasil dengan capaian sebesar 314,60% (diatas 100% lebih dari target yang telah ditetapkan) sebagaimana Tabel 10.

Tabel 10. Pertumbuhan Volume Ekspor Untuk Produk Pangan Hewani Asal Ternak

Target dan Realisasi IKSP	2019	% Realisasi thd Target Thn 2019	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	25,00	314,60	314,60
Realisasi IKSP (%)	78,65		

Jika dilihat pada Tabel 10, Peningkatan volume ekspor pada tahun 2019 terjadi pada ternak babi hidup, kambing hidup, DOC, daging ayam potong, telur tetas dan obat hewan. Namun demikian, apabila dilihat dari besarnya volume ekspor, maka ternak babi hidup masih menduduki urutan pertama terbesar, diikuti oleh obat hewan, daging ayam potong dan obat hewan.

Kontribusi peningkatan volume ekspor terbesar tahun 2019 pada kelompok babi hidup, dimana ekspor terbanyak ke negara Singapura mencapai sebesar 30.721,62 ton atau tumbuh 10,26%. Ekspor babi ini dalam bentuk babi hidup bukan bibit, dengan berat 50 kg atau lebih. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan dalam periode Januari sampai Desember 2019 ekspor babi tercatat 60.684.537,52 US\$, tumbuh 8,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 55.930.137,44 US\$. Jenis ekspor babi selain babi hidup ada pula karkas dan daging babi. Secara rinci Nilai Ekspor Produk Pangan Hewani Asal Ternak Utama Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 11.

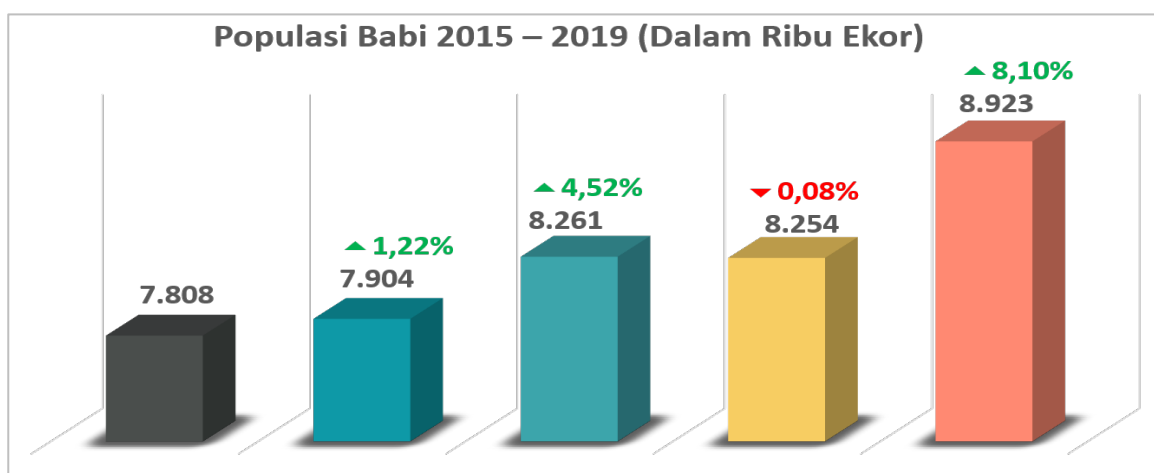
Tabel 11. Nilai Ekspor Produk Pangan Hewani Asal Ternak Utama Tahun 2015-2019

Komoditas	2015	2016	2017	2018	2019*
	Nilai (US\$)	Nilai (US\$)	Nilai (US\$)	Nilai (US\$)	Nilai (US\$)
Babi Hidup	55.424.868,24	53.033.284,33	59.884.046,82	55.930.137,44	60.684.537,52
Domba Hidup	0,00	0,00	0,00	346.771,94	97.704,04
Kambing Hidup	41.316,64	0,00	11.544,00	128.950,00	118.941,05
DOC	0,00	0,00	210,00	45.815,00	171.379,00
Daging Ayam Potong	68.251,87	252.612,82	617.373,77	842.986,47	1.691.914,27
Telur Tetas	100.459,83	1.804.065,21	2.283.883,01	769.392,49	1.763.206,62
Obat Hewan	11.784.321,01	12.133.854,83	10.210.191,08	13.126.424,82	14.126.497,08

Sumber: Pusdatin



Ekspor babi hidup selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,83% per tahun. Selama periode tersebut volume ekspor babi selalu terbesar diantara ekspor produk pangan hewani asal ternak. Peningkatan ekspor ternak babi ini karena pembiakan ternak babi berkembang dengan pesat yang dibuktikan dengan meningkatkannya populasi babi di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 8,10%. Persebaran Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Papua dan paling banyak di Nusa Tenggara Timur. Rekomendasi ke depan ekspor babi harus dikembangkan ke arah ekspor dalam bentuk karkas, sehingga dapat menjangkau negara-negara tujuan ekspor potensial, dengan memperluas pasar ekspor babi menuju negara-negara seperti Timor Leste, Myanmar, Vietnam, Kamboja dan Philipina. Pertumbuhan populasi babi pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik 2.

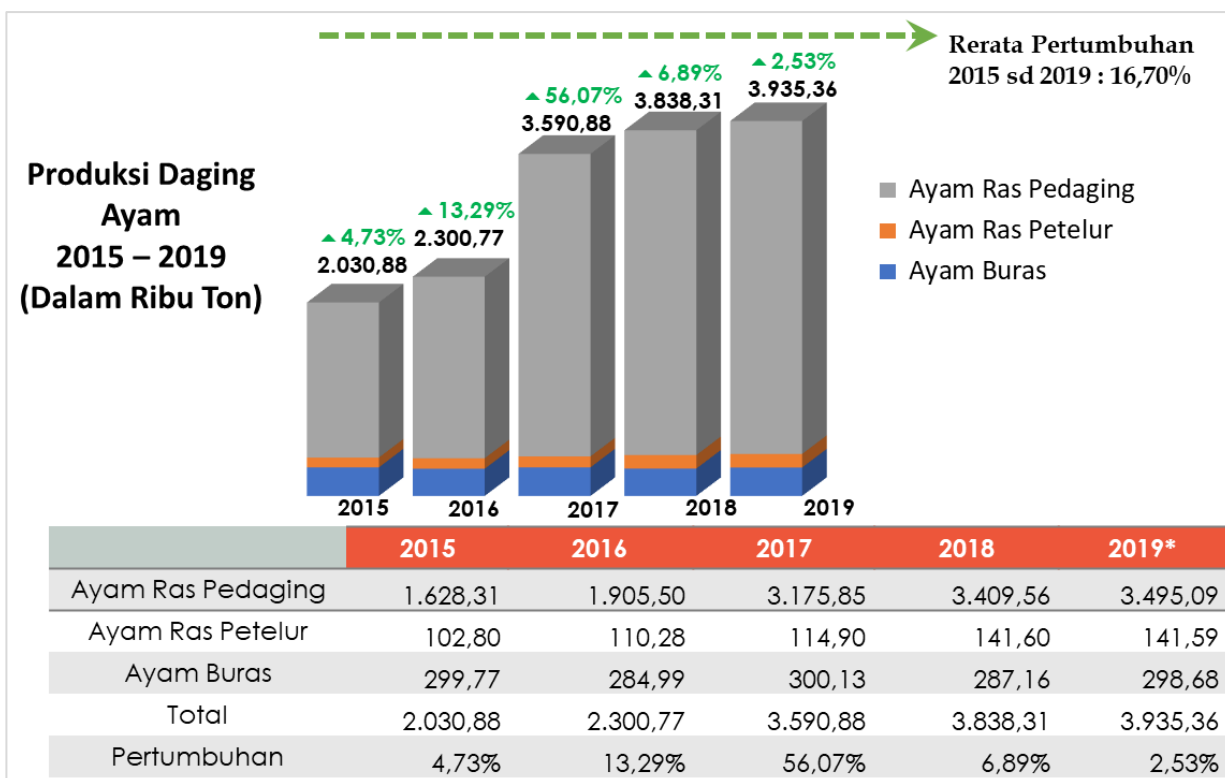


Grafik 2. Pertumbuhan Populasi Babi Tahun 2015-2019

Telur ayam tetas, daging ayam dan produk olahannya, serta DOC merupakan komoditas yang berkontribusi terhadap peningkatan volume ekspor pada tahun 2018-2019. Pada tabel 8 juga dapat dilihat bahwa ekspor komoditas peternakan pada periode 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 426,14%. Pertumbuhan ekspor pada periode tersebut tertinggi dicapai oleh daging ayam potong, DOC dan telur tetas. Peningkatan terbesar daging ayam potong sebesar 2089,17% diikuti DOC yang mencapai 1.749,05% dan telur tetas sebesar 698,46%.

Tujuan ekspor utama DOC adalah Timor Leste, sedangkan untuk hatching eggs ke Myanmar dan Timor Leste, dan daging ayam potong ke Jepang, Timor Leste dan Papua Nugini. Peningkatan ini terjadi sebagai hasil upaya Direktorat Jenderal PKH dalam mendorong percepatan peningkatan ekspor produk ayam ras, karena produksi ayam ras relatif sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga diarahkan untuk peningkatan ekspor. Pertumbuhan Produksi Daging Ayam pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.





Grafik 3. Pertumbuhan Produksi Daging Ayam pada periode 2015-2019

Keterangan :

*) Angka Sementara

Berdasarkan data Statistik Peternakan tahun 2019, jumlah ayam ras pedaging mencapai 3,15 miliar ekor; ayam ras petelur mencapai 263,92 juta ekor dan ayam bukan ras mencapai 311,92 juta ekor.

Tabel 12. Rata-rata Pertumbuhan Populasi Ayam di Indonesia Tahun 2015-2019

Komoditas	2015	2016	2017	2018	2019*	Rerata Pertumbuhan (%)
Ayam Buras	285.304	294.333	299.701	300.978	311.912	2,26
Ayam Ras Petelur	155.007	161.364	258.844	261.933	263.918	16,62
Ayam Ras Pedaging	1.528.329	1.632.801	2.922.636	3.137.707	3.149.382	23,39

Sumber : Buku Statistik Ditjen PKH

**) Tahun 2015 - 2016 Populasi Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging bersumber dari Laporan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Tahun 2017 - 2019 Populasi Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging bersumber dari data yang diolah berdasarkan hasil laporan perusahaan secara online. Populasi Ayam Ras Petelur merupakan induk produktif umur 19 - 92 minggu

Jika dilihat Tabel 12 rata-rata pertumbuhan populasi ayam di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 terjadi peningkatan yang cukup pesat terutama di ternak ayam ras pedaging sebesar 23,39% dan ayam ras petelur sebesar 16,62%. Pertumbuhan yang cukup besar ini yang menyebabkan Indonesia mengalami *over supply* untuk



telur dan daging ayam ras, sehingga Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan harus terus menerus mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator untuk melakukan ekspor dan bersaing di perdagangan global.

Komoditas lainnya yang mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu obat hewan, dimana dari tahun ke tahun berdasarkan data realisasi impor Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menduduki peringkat utama dalam nilai ekspor. Walaupun secara volume ekspor kontribusi obat hewan merupakan terbesar yang kedua setelah terbak babi hidup. Pada tahun 2019, volume ekspor obat hewan mencapai 832,92 ton dan tersebar ke 93 negara di benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika dan Australia. Obat hewan yang diekspor antara lain adalah *Vaccine (AI, ND, IB, IBD, ILT, Coryza* dan lain-lain), *Pharmacetyc (Antelmentika, Antidefisiensi, Antibakteria, Antiprotozoa, Antiseptika dan Desinfektansia)* dan *Premix (Asam amino (L-Threonine, Lysine Monohydrochloride, Lysine Sulphate, L- Tryptophan, L- Arginine))*. Sebaran pabrik obat hewan antara lain dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan dalam periode Januari sampai Desember 2019 ekspor obat hewan tercatat senilai 14.126.497 USD tumbuh 7,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan nilai 13.126.424 US\$. Berdasarkan data dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nilai realisasi ekspor obat hewan tahun 2019 dari laporan perusahaan eksportir obat hewan sebesar 348.230.961 US\$. Tingginya nilai ekspor obat hewan ini, sangat menggembarakan bagi dunia usaha di bidang obat hewan. Fakta ini sekaligus menunjukkan obat hewan mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan devisa negara. Nilai realisasi ekspor obat hewan tahun 2019 berdasarkan laporan perusahaan eksportir obat hewan secara rinci dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Nilai Realisasi Ekspor Obat Hewan Tahun 2019 Berdasarkan Laporan Eksportir

Jenis Sediaan		Volume	Nilai (US\$)
Biologik		3.826.650.600 dosis	10.958.052
Farmasetik		370 ton	2.180.555
Premiks	Feed Supplement & feed Additive	549 ton	2.196.829
	Bahan Baku Asam Amino	245.600 ton	332.714.487
	Bahan Baku Vitamin	6 ton	177.800
Alami		0,5 ton	3.238
TOTAL			348.230.961

Sumber : Dit. Keswan, 2019

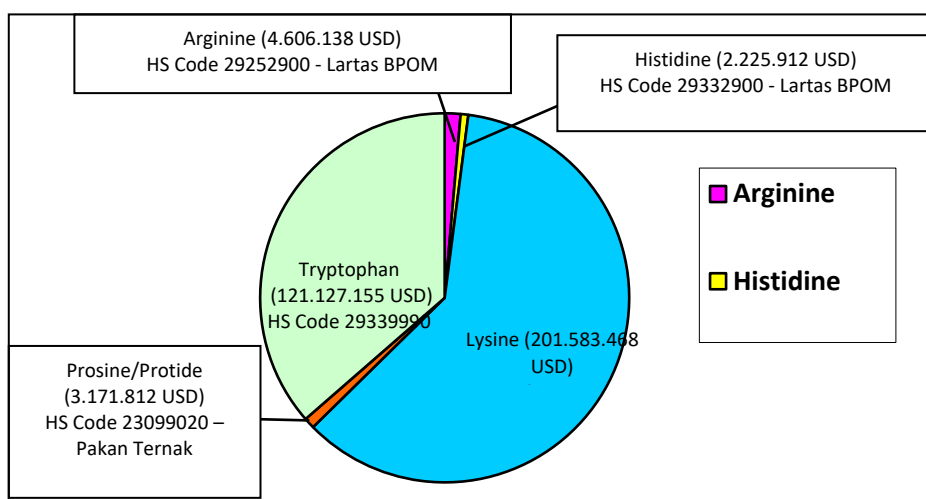
Dari tabel tersebut terdapat perbedaan antara data realisasi ekspor dari Kementerian Pertanian dengan data ekspor berdasarkan data BPS (832,92 Ton dengan nilai 14.126.497,08 US\$), hal tersebut disebabkan karena data BPS dibuat



berdasarkan lartas HS Code dalam INSW. Dimana dalam INSW, hanya ada 4 HS Code dengan jenis sediaan biologik yang masuk dalam cakupan obat hewan, yaitu:

- HS Code: 30023000 (Vaksin untuk obat hewan)
- HS Code: 30029000 (Darah manusia; darah hewan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis)
- HS Code: 30063020 (Reagen berasal dari mikroba, dari jenis yang cocok untuk diagnosis biologis veteriner)
- HS Code: 30063090 (Preparat opasitas untuk pemeriksaan sinar X; reagen diagnosis yang dirancang untuk diberikan kepada pasien)

Sedangkan untuk sediaan farmasetik, premiks dan obat alami, HS Code-nya sebagian besar masuk dalam larangan terbatas (lartas) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga dalam data BPS tidak masuk sebagai data ekspor obat hewan di Kementerian Pertanian. Adapun produk premiks berupa bahan baku asam amino yang diekspor antara lain terdiri dari arginine, histidine, lysine, prosine/protide dan tryptophan dengan gambaran sebagai berikut:



Grafik 4. Ekspor Produk Premiks Berupa Bahan Baku Asam Amino

Berdasarkan data realisasi ekspor tersebut pada Tabel 13, ekspor produk premiks berupa bahan baku asam amino menyumbang lebih dari 95% dari total nilai ekspor. Hal itu menyebabkan adanya perbedaan nilai ekspor yang sangat drastis antara data realisasi dari Kementerian Pertanian dengan data BPS.

Pada tahun 2019 juga terjadi peningkatan ekspor untuk ternak kambing. Ekspor kambing dan domba hidup selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan terutama pada tahun 2018, untuk domba hidup saja mencapai 81,5 ton, Walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Sedangkan untuk volume kambing hidup sejak tahun 2017 relatif naik sampai tahun 2019. Permintaan dalam negeri untuk ternak hidup dan daging kambing/domba juga relatif tinggi, begitu juga potensi ekspor terutama ke Negara-negara Timur Tengah. Pada tahun 2019 pada tabel 9 dapat dilihat adanya penurunan volume ekspor terjadi pada komoditas domba hidup sebesar 74,23% apabila dibandingkan dengan volume ekspor tahun



2018. Penurunan ekspor ini disebabkan adanya pertimbangan terkait upaya perlindungan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) Indonesia dari beberapa pelaku usaha ternak domba di Indonesia. Pengiriman ekspor domba Garut ke Arab Saudi yang telah dilakukan sebelumnya, dimana saat ini ternyata hasil domba Garut yang diekspor ke Arab Saudi semakin berkembang dengan baik, membuat kekhawatiran berbagai pihak akan menyebabkan terjadinya pengurasan SDGH Indonesia.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya:

Realisasi kinerja tahun 2019 diatas 100% atau sama dengan capaian tahun 2018 diatas 100%, dengan pertumbuhan 14,19% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebagaimana Tabel 13.

Tabel 14. Pertumbuhan Volume Ekspor Produk Pangan Hewani Asal Ternak Utama Tahun 2018-2019

Komoditas	2017	2018	2019*
	Volume (Ton)	Volume (Ton)	Volume (Ton)
Babi Hidup	28.711,95	27.862,64	30.721,54
Domba Hidup	0,00	81,50	21,00
Kambing Hidup	6,24	11,26	15,12
DOC	0,04	3,41	11,08
Daging Ayam Potong	311,91	400,65	722,77
Telur Tetas	376,19	46,07	166,71
Obat Hewan	549,03	739,51	832,92
Total (Ton)	29.955,36	29.145,04	32.491,14
		Pertumbuhan (%)	11,48
		Pertumbuhan t-(t-1) (%)	14,19

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah:

Pada Tabel 9 dan Tabel 10 dapat dilihat dari capaian kinerja tahun 2019 diatas 100% atau telah mencapai target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2019.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Realisasi capaian Kinerja tahun 2019 sebesar 100% telah mencapai standar nasional Kementerian Pertanian yaitu 100%. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

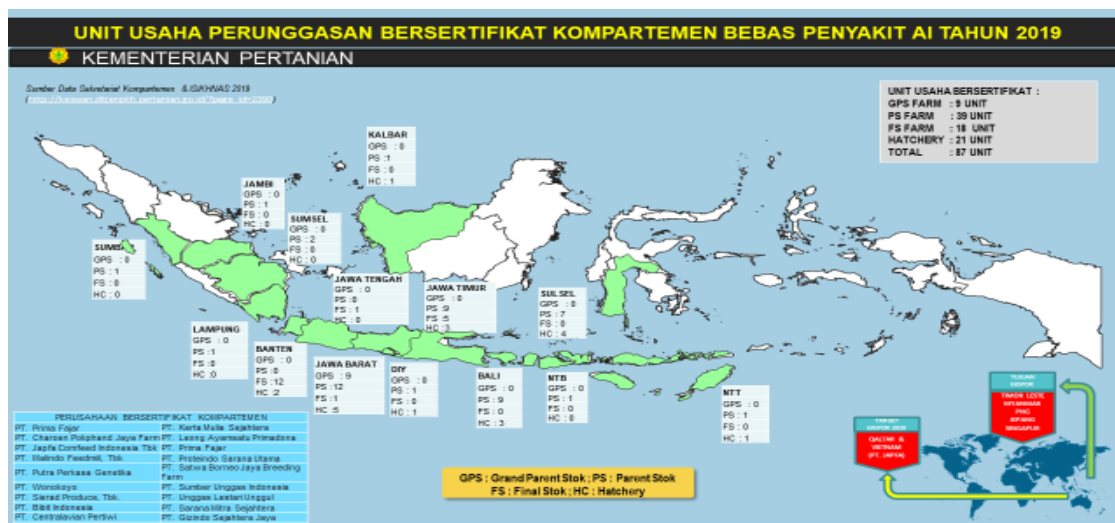
e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Peningkatan volume ekspor pada periode tahun 2015-2019 adalah hasil upaya Indonesia sejak penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2016, dimana Ditjen PKH Kementan terus menerus berupaya untuk mendorong



peningkatan ekspor semua komoditas sub sektor peternakan. Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan peningkatan ekspor diantaranya:

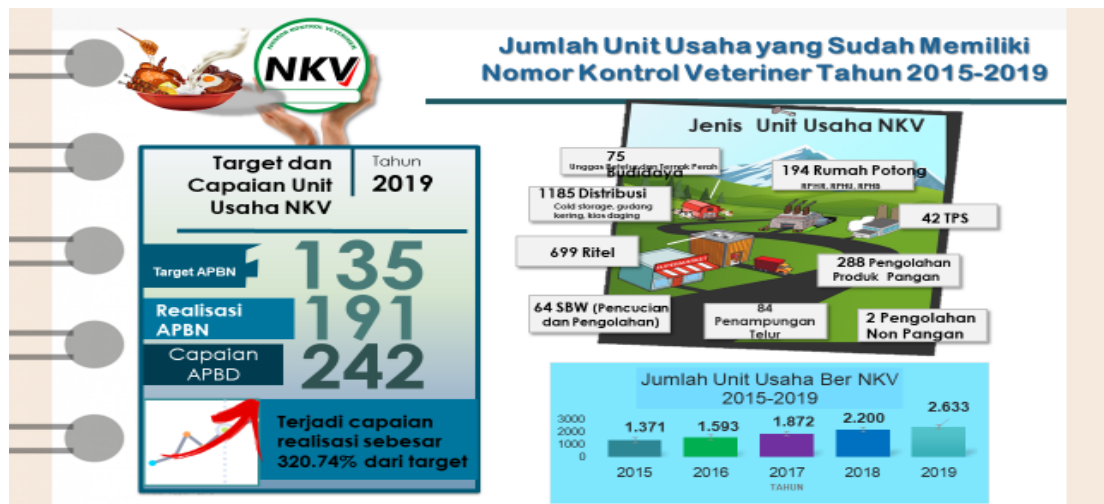
1. Produsen obat hewan dalam negeri menerapkan Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB). Produsen obat dalam negeri dari total 95 produsen, 61 produsen sudah mendapat Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB). Kementan juga terus menyarankan produsen obat hewan agar kreatif mengembangkan produk dari bahan lokal. Menggunakan bahan lokal diharapkan dapat mengurangi impor.
2. Penerapan Sistem Kompartemen bebas penyakit Avian Influenza (AI) yang merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan kualitas produk peternakan yang akan diekspor. Sejak merebaknya penyakit AI (Avian Influenza) di Indonesia pada tahun 2004, beberapa negara telah menutup impor produk unggas dari Indonesia. Untuk itu, Ditjen PKH Kementan telah mengambil langkah kebijakan dengan melakukan pembebasan melalui kompartemen, zona, pulau atau provinsi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian RI No. 28 Tahun 2008 tentang Penataan Kompartementalisasi dan Zonasi. Saat ini Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 87 kompartemen bebas AI untuk Breeding Farm aktif, yaitu: sebanyak 9 perusahaan GPS (Grand Parent Stock, 39 Perusahaan PS (Parent Stock), 18 perusahaan FS (Final Stock), 21 perusahaan Hatchery di 14 provinsi, diantaranya Jawa Barat (27), Lampung (1), Jawa Timur (8), Banten (14), Jawa Tengah (1), Bali (12), NTT (2), Yogyakarta (2), Jambi (1), Sumbar (1), Sumsel (1), sulsel (11), NTB (2) dan Kalimantan Barat (1).



Gambar 1. Peta Sebaran Unit Usaha Perunggasan Bersertifikat Bebas AI Tahun 2019



3. Pada tingkat produsen, dalam upaya memberikan jaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada unit usaha produk hewan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Propinsi dibawah pembinaan pusat. Sertifikat NKV diberikan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan hygiene sanitasi unit usaha produk hewan dan. Sertifikat NKV juga menjadi salah satu persyaratan bagi unit usaha yang akan melakukan pemasukan (import) dan/atau pengeluaran (ekspor) sebagai *establishment number* (nomor registrasi unit usaha) disamping menjadi salah satu nilai tambah dan daya saing bagi produk hewan yang dihasilkan. Sampai dengan tahun 2019 telah diterbitkan sertifikat NKV untuk 2.633 unit usaha produk hewan dengan capaian pada tahun 2019 sebanyak 433 unit usaha.



Gambar 2. Jumlah Unit Usaha yang sudah Memiliki NKV Tahun 2015-2019

4. Direktorat Jenderal PKH dalam upaya akselerasi peningkatan ekspor produk peternakan membentuk Tim Percepatan Pengeluaran Benih, Bibit, Hewan, Produk Hewan, Bahan Pakan atau Pakan dan Obat Hewan dari Wilayah RI dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 4542 tahun 2019. Tim ini bertugas untuk membantu kesiapan pelaku usaha calon eksportir dan pelaku usaha eksportir dalam proses ekspor baik secara teknis maupun membantu penyiapan dokumen persyaratan teknis dan kelengkapannya yang dipersyaratkan negara tujuan, dan membantu koordinasi dengan daerah dan kementerian/lembaga terkait.
5. Dalam upaya peningkatan jumlah pelaku usaha yang siap melakukan ekspor komoditas peternakan telah dilakukan beberapa upaya :
 - a) Melakukan promosi dan misi dagang di negara potensial ekspor dengan berkoordinasi bersama K/L terkait.
 - b) Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor bagi pelaku usaha berkoordinasi dengan direktorat teknis.
 - c) Melakukan identifikasi potensi produk siap ekspor dan identifikasi potensi Negara tujuan ekspor.



6. Sampai tahun 2019 pelaku usaha yang siap ekspor dengan produk dan tujuan ekspor tertentu sebanyak 70 pelaku usaha. Secara rinci 70 pelaku usaha dimaksud dapat dilihat pada lampiran 9. Pada tahun 2019, terdapat 9 pelaku usaha yang masih dalam proses penyiapan ekspor untuk produk dan tujuan negara tertentu, secara rinci daftar pelaku usaha dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Pelaku Usaha dalam Proses Penyiapan Ekspor Komoditas Peternakan

No	Perusahaan	Komoditas/Produk	Tujuan Negara
1	PT. Inkopmar	Domba	Brunai
2	PT. Japfa	Unggas	Brunai
3	PT.CPI	Telur Konsumsi	Singapura
4	PT.Malindo	Olahan unggas	Singapura
5	Agroinvestama	Domba	Singapura
6	PT. PPG	DOD	RDTL
7	Koperasi Pesat Blitar dan Inti Prima	Telur Konsumsi	Singapura
8	PT.PEKSI	Burung Puyuh	RDTL
9	PT.Kalbe	Obat Hewan	RDTL

Sumber : Dit. PPHnak, 2019

Beberapa kendala dan tindak lanjut dalam akselerasi ekspor produk peternakan, antara lain adalah :

- Masih terhambatnya penyelesaian G to G pada beberapa tujuan ekspor, khususnya bagi Negara yang mempersyaratkan Indonesia bebas dari penyakit tertentu.
- Terbatasnya informasi market akses dari para pelaku ekspor, dan belum adanya buyer/permintaan di luar negeri.
- Sulit mendapatkan perijinan di negara tujuan (izin impor) dan pemenuhan dokumen ekspor yang diminta oleh negara tujuan.

Langkah dan Tindak Lanjut yang telah dan sedang dilakukan terkait kendala di atas antara lain :

- Melakukan misi dagang, promosi dan temu bisnis antara pelaku usaha ekspor di negara tujuan potensi.
- Melakukan koordinasi dengan Kedutaan dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan G to G antar Negara.
- Melakukan pendampingan pemenuhan dokumen ekspor dengan melakukan koordinasi dengan K/L terkait antara lain BPS, Bea Cukai, BKF, Ditjen Pajak, Kemendag, BPOM, dan Kemenperin.
- Melakukan koordinasi dengan kementerian/instansi terkait sehubungan dengan pengembangan pemasaran ekspor komoditas peternakan antara lain dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional, dan Kemenko Perekonomian.



- e. Melakukan koordinasi di lingkup Kementerian Pertanian seperti Biro Kerjasama Luar Negeri dan Badan Karantina dan juga dengan instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian terkait penyelesaian perundingan kerjasama baik bilateral, regional, dan multilateral di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 - f. Melakukan FGD terkait dengan pengembangan pemasaran seperti koordinasi data ekspor dengan pihak BPS dan Bea cukai, FGD pembahasan peta bisnis proses perunggasan, pembahasan langkah kerja Tim Percepatan Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH, pembahasan pemetaan potensi ekspor
 - g. Melakukan pendampingan pelaku usaha ekspor untuk promosi produk dalam pameran yang bersifat internasional seperti Indolivestock serta penyebaran informasi pameran perdagangan yang dapat diikuti oleh pelaku usaha ekspor.
 - h. Mendorong peternak membentuk korporasi, sehingga akan lebih mudah membuka peluang pasar global.
 - i. Mendorong eksportir untuk terus memperkuat kemitraan dengan peternak, dengan pola kemitraan yang cocok untuk kedua belah pihak, sebagai upaya untuk menjaga kontinuitas ketersediaan ternak atau produk peternakan.
 - j. Untuk keberlanjutan ekspor ternak kambing dan domba, serta untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka upaya yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya: (1). telah memfasilitasi akses permodalan untuk para peternak pemasok ekspor, baik dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Program Kemitraan dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara); (2). pembinaan kepada sentra peternakan kambing/domba utamanya di wilayah perbatasan untuk tujuan ekspor, dan mengeluarkan sertifikat Good Farming Practices (GFP). Dengan potensi ekspor kambing domba yang besar, maka Ditjen PKH Kementerian Pertanian akan memperluas pasar ekspor yang selama ini ke Timor Leste, Brunai, Malaysia dan Uni Emirat Arab, akan memperluas lagi ke negara-negara seperti Qatar dan Kuwait.
7. Pengembangan investasi di bidang usaha peternakan yang dapat dikatakan berhasil, mampu mendorong peningkatan ekspor komoditas peternakan. Investasi usaha peternakan baik PMA maupun PMDN secara umum mengalami peningkatan. Usaha peternakan sapi/kerbau, kambing/domba, babi, unggas, dan jasa penunjang meningkat rata-rata 37,10% per tahun untuk PMDN dan 24,04% per tahun untuk PMA. Secara rinci nilai investasi per bidang usaha per tahun dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 16. Perkembangan Investasi Subsektor Peternakan, 2015-2019

No	Jenis Usaha (KBLI)	Nilai Investasi					Rerata Pertumbuhan (%) 2015 s.d 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	
A	PMA (US\$ Ribu)	72.910,7	48.611,3	156.333,1	119.039,3	37.778,5	24,04
1	Peternakan Sapi Dan Kerbau	10.288,8	18.997,4	2.574,2	47.632,5	9.855,1	417,32
2	Peternakan Babi	300,0	145,0	203,5	-	-	27,83
3	Peternakan Unggas	62.231,9	25.373,5	153.150,3	71.110,0	24.289,8	81,24
4	Peternakan Domba dan Kambing	-	180,0	3,5	93,8	1.900,3	1.126,96
5	Jasa Penunjang	90,0	3.915,4	401,6	203,0	1.733,3	1.216,27
B	PMDN (Rp Juta)	325.430,5	465.549,3	842.756,3	866.463,7	1.052.689,3	37,10
1	Peternakan Sapi Dan Kerbau	27.006,10	28.978,80	76.131,40	123.919,40	174.724,8	68,45
2	Peternakan Unggas	292.210,30	436.570,50	629.871,70	632.470,60	875.765,9	33,14
3	Peternakan Babi	-	-	97.317,50	26.000,00	-	18,32
4	Peternakan Domba dan Kambing	-	-	45,00	-	2.198,6	50,00
5	Jasa Penunjang	6.214,10	-	39.390,70	84.073,70	-	3,36

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak didapatkan hasil nilai efisiensi sebesar 56,26% atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017. Selengkapnya nilai efisiensi masing-masing indikator kinerja disampaikan pada Lampiran 8.

Tabel 17. Kegiatan Pendukung IKU I Tahun 2019

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	13.536	12.114	89,49	1.610	2.350	145,96
2	Obat Hewan dan Bahan Biologik	Dosis	17.038	15.565	91,35	5.417.100	7.544.100	139,26
3	Pengembangan unggas dan aneka ternak	Ekor	728.560	680.204	93,36	10.945.280	10.281.680	93,94
4	Sarana Pemasaran Peternakan	Unit	1.388	1.286	92,62	5	5	100,00
5	Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Dokumen	18.740	17.507	93,42	68	68	100,00

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2019

Pada tabel 17 diatas dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan pendukung ekspor, capaian fisiknya melebihi 100%, namun untuk kegiatan Pengembangan unggas dan aneka ternak capaian kinerja output tercapai 93,97%. Untuk mendukung peningkatan volume ekspor dilakukan melalui pengembangan ayam



ras petelur dan pedaging yang sangat signifikan dan efisien dalam mendukung peningkatan ekspor. Pertumbuhan produksi telur dan daging ayam ras Indonesia mengalami over supply, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mampu mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator melakukan ekspor dan bersaing di perdagangan global. Demikian juga untuk pengembangan aneka ternak, yaitu babi juga sangat signifikan dan efisien dalam mendukung peningkatan volume ekspor. Sedangkan untuk pengembangan unggas lokal (ayam dan itik) yang dilaksanakan melalui kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan pemenuhan protein hewani bagi Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTM-P).

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Dengan semakin meningkatnya produk olahan daging ayam dan telur ke beberapa negara, Indonesia saat ini telah dapat membuktikan bahwa dengan sistem kompartemen bebas AI yang diterapkan terdapat jaminan keamanan pangan. Aspek status kesehatan hewan ternyata menjadi persyaratan utama, dan menjadi salah satu daya saing dalam perdagangan internasional. Untuk mendapatkan persetujuan dari negara calon pengimpor maka produk peternakan yang akan diekspor harus sesuai dengan yang menjadi persyaratan Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE).

Berdasarkan aspek teknis kesehatan hewan, semua hewan dan produk hewan yang akan diekspor juga harus dipastikan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan Sertifikat Veteriner. Sertifikat Veteriner merupakan bukti jaminan kesehatan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang diterbitkan oleh otoritas veteriner di tempat asal hewan atau produk hewan. Sertifikat Veteriner juga menjadi salah satu persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan persetujuan dari negara calon pengimpor sebagai bukti jaminan keamanan hewan/produk hewan. Sertifikat Veteriner diterbitkan dalam bentuk Veterinary Certificate, Sanitary Certificate dan Health Certificate. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Cq. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 telah mengeluarkan sebanyak 2.633 Sertifikat Veteriner untuk ekspor produk pangan dan non pangan yang mengandung produk asal hewan.



SP1. IKU2	
Penurunan Volume Impor Untuk Produk Pangan Hewani Asal Ternak	
Target 4,2%	Realisasi 3,82%
% Capaian 90,99%	

Volume impor produk pangan hewani asal ternak terdiri dari volume impor 9 (sembilan) komoditas, yaitu: susu, mentega, keju, yoghurt, sapi hidup, daging lembu, jeroan lembu, sosis, dan itik. Penurunan volume impor pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 4,2%. Cara perhitungan capaian indikator penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak ini adalah volume impor produk pangan hewani asal ternak tahun berjalan ($t = 2018$) dikurangi volume impor produk pangan hewani asal ternak tahun sebelumnya ($t-1 = 2018$), dibagi volume impor produk pangan hewani asal ternak tahun sebelumnya ($t-1 = 2018$) dikali 100%. Mempertimbangkan bahwa setiap jenis produk memiliki nilai ekonomi yang berbeda, tidak berarti produk yang berat selalu bernilai lebih tinggi, maka perhitungan pertumbuhan volume impor produk dilakukan terhadap masing-masing produk, selanjutnya untuk pertumbuhan total seluruh produk diperoleh dari rerata pertumbuhan seluruh produk.

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Hasil perhitungan menunjukkan realisasi penurunan volume impor tahun 2019 sebesar 3,82%. Capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran program ini adalah 90,99%, sehingga dapat dikatakan kinerja penurunan impor masuk kategori **berhasil**. Secara rinci perkembangan volume impor Produk Pangan Hewan Asal Ternak tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Penurunan Volume Untuk Produk Pangan Hewani Asal Ternak

No	Komoditas	Volume Impor (Ton)					Target 2019 (-4,2%)	Capaian Minimize
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Susu dan kepala susu	212.386,75	237.483,57	223.855,34	256.657,19	296.413,45	245.877,59	79,45
2	Mentega	135.419,16	148.630,71	155.671,75	167.652,71	167.653,59	160.611,30	95,62
3	Keju dan dadih susu	20.717,63	24.278,09	30.253,28	30.048,51	30.124,33	28.786,47	95,35
4	Yoghurt	320,04	1.783,49	1.957,12	1.201,05	911,28	1.150,61	120,80
5	Sapi hidup	197.604,09	195.764,11	168.588,53	204.682,78	223.100,72	196.086,10	86,22
6	Daging lembu	50.309,02	116.761,38	118.646,84	164.260,57	201.554,33	157.361,63	71,92
7	Jeroan lembu	2.473,26	32.202,55	44.421,42	46.781,04	64.904,33	44.816,23	55,18
8	Sosis dan produk sejenisnya	5.541,37	5.640,69	46,87	30,05	47,92	28,79	33,53
9	Itik	2.572,00	3.499,00	617,26	1,20	0,22	1,15	180,86
Rerata Capaian							90,99	
% Penurunan							3,82	

Sumber: Pusdatin



b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya:

Realisasi indikator penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak pada tahun 2019 dari tahun 2018, yaitu berhasil menurunkan volume impor sebesar 3,82%. Secara rinci perkembangan volume impor Produk Pangan Hewan Asal Ternak tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Penurunan Volume Impor Untuk Produk Pangan Hewani Asal Ternak

Target dan Realisasi IKSP	2015	2016	2017	2018	2019	% Realisasi thd Target Thn 2019	% Realisasi th 2019 thd 2018	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	-	-	20,50	25,00	314,60	6,42	314,60
Realisasi IKSP (%)				1.225,41	78,65			

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah:

Pada Tabel 19 dapat dilihat dari capaian kinerja tahun 2019 berhasil menurunkan impor sebesar 90,99% terhadap target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2019 sebesar 4,2%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Realisasi capaian Kinerja tahun 2019 berhasil mencapai standar nasional Kementerian Pertanian sebesar 90,99%. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja:

Pada periode dua tahun (2018-2019), penurunan impor terjadi pada dua komoditas, yaitu itik dan yoghurt. Capaian kinerja ini dihasilkan dari makin berkembangnya pembibitan dan budidaya itik; serta berkembangnya Unit Usaha Pengolahan (UPH) yoghurt di tingkat peternak (terintegrasi dengan budidaya) maupun pada UPH yang terpisah. Hal ini didukung dengan fasilitasi sarana pengolahan susu dan sertifikasi ijin edar (MD) kepada UPH pengolahan susu oleh Direktorat Jenderal PKH, yaitu sebanyak 15 UPH pada tahun 2016 dan 4 UPH pada tahun 2019. Sedangkan peningkatan volume impor terjadi pada impor daging lembu dan jeroan lembu, serta kepala susu.

Hal ini disebabkan jeroan lembu masih menjadi pilihan bahan baku beberapa menu favorit masyarakat Indonesia, serta harga yang relatif murah juga menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen. Peningkatan impor daging lembu ini dikarenakan pada tahun 2017 mulai dibukanya impor daging kerbau dari India yang bertujuan untuk memberikan pilihan harga daging yang terjangkau bagi masyarakat, yaitu Rp.80.000,- per kg. Keberadaan daging kerbau beku dari India yang pemasukannya dilaksanakan oleh BULOG, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada



masyarakat yang belum bisa menjangkau harga daging sapi agar ada alternatif bagi mereka untuk menjangkaunya.

Selain itu, penyebab adanya peningkatan ekspor daging dan jeroan juga karena ada perubahan regulasi untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan WTO (*World Trade Organization*). Adanya perubahan regulasi mengenai pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya ke dalam wilayah NKRI. Permentan 42 Tahun 2019 merupakan perubahan dari permentan sebelumnya yaitu Permentan nomor 34 tahun 2016 dan Permentan nomor 23 tahun 2018 yang digabung menjadi satu.

Pasal dalam Permentan 23 tahun 2018 yang mengalami perubahan substansi, yaitu: dalam Pasal 1 angka 4 yang semula: Jeroan (*Edible Offal*) adalah jantung, hati, paru yang berasal dari jenis lembu dan selain jenis lembu yang lazim dan layak dikonsumsi manusia, menjadi berubah: Jeroan (*Edible Offal*) adalah organ dalam selain karkas dan daging, berasal dari jenis ruminansia dan selain jenis ruminansia yang lazim, layak, aman, dan sehat dikonsumsi manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa preferensi konsumen terhadap daging sapi saat ini mulai berkembang untuk mengkonsumsi berdasarkan bagian-bagian daging tertentu yang mendorong berkembangnya industri kuliner dengan permintaan daging berdasarkan potongan dan bagian tertentu. Daging sapi sebagai salah satu sumber protein yang ketersediaan pasokannya terus diupayakan oleh pemerintah, saat ini masih dianggap sebagai barang mahal sehingga konsumsinya meningkat pada hari besar pada hari besar keagamaan dan hari-hari tertentu. Namun sebenarnya ada daging yang harganya lebih murah, tergantung dari jenis dan potongan daging. Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari pemotongan sapi dengan melakukan perbaikan sistem pemotongan di RPH dan melakukan grading daging berdasarkan jenis potongan-potongan yang terstandar.

Untuk komoditas sapi hidup pada periode 2018-2019 mengalami peningkatan volume impor 7,97%, namun apabila dibandingkan pada periode dua tahun sebelumnya 2017-2018 dapat dikatakan mengalami penurunan pertumbuhan volume impor, karena pada periode 2017-2018 pertumbuhan volume impor sapi hidup mencapai 21.41%. Hal ini karena adanya kebijakan setiap importasi sapi bakalan harus impor 1 ekor sapi indukan, berdasarkan Permentan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/Pk.440/2/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/Pk.440/10/2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan ini diterbitkan untuk mendorong berkembangnya industri pembiakan sapi potong, sehingga ke depan diharapkan akan mengurangi impor daging dan bakalan. Selanjutnya, untuk mengakomodasi permasalahan di feedloter yang keberatan dengan kebijakan



dimaksud, pada tahun 2019 telah dilakukan revisi terhadap Permentan tersebut dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Salah satu pasal permentan tersebut mengatur bahwa Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, dan Kelompok Peternak yang melakukan Pemasukan Bakalan wajib memasukkan Indukan sebanyak 5% (lima persen) dari setiap Rekomendasi.

Kebijakan dimaksud juga didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu. Dimana fasilitas pengurangan pajak diberikan kepada investor yang melakukan usaha peternakan pembibitan dan pembiakan sapi potong, dan budidaya sapi perah. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan terjadi akselerasi peningkatan populasi sapi potong dan sapi perah di Indonesia. Sapi perah dapat sebagai dual purpose, dimana selain menghasilkan susu sapi, juga dapat menghasilkan daging, baik dari bakalan yang dihasilkan dari anak jantan, maupun dari betina afkir.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak didapatkan nilai efisiensi sebesar 79,49% (tercantum dalam Lampiran 8 atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017.

Tabel 20. Kegiatan Pendukung IKU II Tahun 2019

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengembangan ternak ruminansia perah	Ekor	8.314	7.116	86	327	327	100,00
2	Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	3.400	3.217	95	17	17	100,00

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2019

f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Penurunan volume impor pada komoditas itik sebagai dampak positif dari berkembangnya pembibitan dan budidaya itik di Indonesia. Begitu juga untuk komoditas yoghurt, karena telah berkembang pengolahan yoghurt di dalam negeri. Sedangkan belum tercapainya penurunan volume impor untuk komoditas daging lembu dan jeroan lembu, serta susu dan kepala susu, lebih dikarenakan meningkatnya kebutuhan komoditas tersebut di dalam negeri. Peningkatan kebutuhan ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kesadaran akan konsumsi protein hewani asal ternak. Untuk sapi hidup, penurunan



impor sebagai dampak positif dari kebijakan dan upaya pengembangan pembiakan sapi di dalam negeri, walaupun belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan baik.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung penurunan volume impor produk pangan asal ternak dimaksud antara lain:

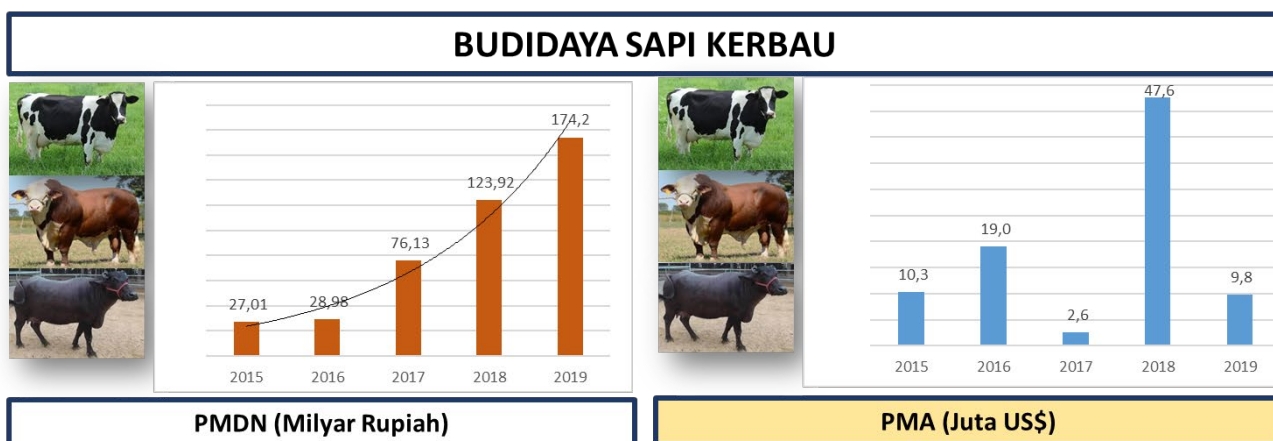
- a. Untuk mengurangi share impor daging sapi, Ditjen PKH terus berupaya untuk mempercepat peningkatan populasi sapi di Indonesia, dengan menyusun berbagai program strategis untuk meningkatkan pasokan daging sapi di dalam negeri. Upaya tersebut, yaitu: Pertama dengan mempercepat peningkatan populasi sapi di tingkat peternak, dengan melakukan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) sejak tahun 2017 hingga 2019 dengan target 10 (sepuluh) juta ekor akseptor dan 7,2 (tujuh koma dua) juta ekor sapi bunting.

Kedua, melalui penambahan indukan impor baik oleh pemerintah ataupun melalui peran dan kontribusi swasta (feedlotter) yang memasukkan indukan sebagai prasyarat impor sapi bakalan. Penambahan impor sapi indukan pada tahun 2016-2018 oleh pemerintah belum dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan oleh Pemerintah, hal ini tentunya juga berdampak terhadap ketersediaan indukan sebagai mesin-mesin produksi sapi. Demikian juga halnya dengan kontribusi swasta (feedlotter) yang memasukkan indukan sebagai prasyarat impor sapi bakalan juga kurang berhasil. Ketiga, Memperkuat aspek perbenihan dan perbibitan untuk menghasilkan benih dan bibit unggul berkualitas tersertifikasi dengan penguatan tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan.

Keempat, Pengendalian pemotongan betina produktif bertujuan untuk menurunkan jumlah pemotongan betina produktif, menambah atau mempertahankan jumlah akseptor Upsus SIWAB. Dalam pelaksanaannya kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif bekerjasama dengan Baharkam Polri berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen PKH dengan Kepala Baharkam Polri yang ditanda tangani pada tanggal 9 Mei 2017, yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan atau pencegahan pemotongan betina produktif di RPH (Rumah Potong Hewan) dan di luar RPH. Hasil dari pelaksanaan pengendalian ini tercatat telah dapat menurunkan pemotongan betina produktif pada tahun 2018 sebesar 47.10% dan di tahun 2019 sebesar 57,79% dari tahun 2017. Salah satu dampak dari kerjasama dengan Baharkam Polri di beberapa Propinsi telah dilakukan penindakan terhadap pelanggaran pemotongan betina produktif sampai tahap persidangan di pengadilan yaitu di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara.



- b. Peningkatan pengolahan peternakan untuk mendukung substitusi impor
 Pada tahun 2019 telah difasilitasi sarana pengolahan pangan nonpangan sebanyak 17 (tujuh belas) unit, meliputi : 1)Fasilitas Pengolahan Pupuk dan Sertifikasi Organik di 5 (lima) UPH ditunjukkan dengan semua telah siap disertifikasi organik, 2)Fasilitas Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan di 7 (tujuh) UPH ditunjukkan dengan semua siap disertifikasi MD, 3)Fasilitas Pengolahan Susu dan Pangan Asal Unggas Organik di 2 (dua) UPH ditunjukkan dengan semua siap disertifikasi organik, dan 4)Fasilitas Pengolahan Susu dan Pangan Asal Unggas (PiRT dan MD) di 3 UPH ditunjukkan dengan semua siap disertifikasi PiRT dan MD.
- c. Pengembangan investasi sapi (potong dan perah), yang dilakukan dengan mengusulkan fasilitas pengurangan pasak penghasilan bagi peternakan sapi yang telah disetujui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019; mempermudah perijinan usaha dengan bersama-sama Sekretariat Jenderal Kementan menyusun Permentan tentang perijinan usaha pertanian, yang telah ditetapkan terakhir dengan Permentan 45 tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian, serta mendampingi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam perijinan usaha. Untuk komoditas impor terutama sapi potong, upaya tersebut telah membuahkan hasil, dimana secara kumulatif nilai investasi sapi dan kerbau (yang sebagian besar adalah sapi) pada periode 2012-2018 mengalami peningkatan sebesar 77,6% untuk PMDN dan 582,85% untuk PMA. Secara rinci per tahun dapat dilihat pada grafik berikut.

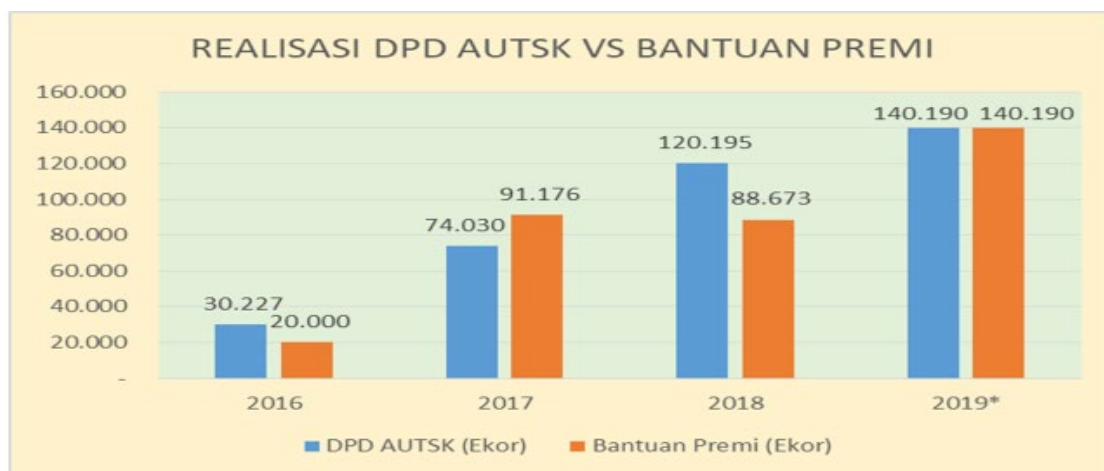


Grafik 5. Perkembangan Investasi PMDN dan PMA Peternakan Sapi/Kerbau 2015-2019

- d. Asuransi Usaha Ternak Sapi dan kerbau sebagai mitigasi resiko usaha peternakan sapi dan kerbau dengan pertanggungungan untuk resiko kematian karena sakit, beranak dan kecelakaan, serta kehilangan. Dengan adanya produk asuransi ini investor lebih tenang dalam menjalankan usahanya dan terjamin keberlanjutan usahanya. Untuk peternak skala mikro dan kecil, berdasarkan DPD Direktorat Jenderal PKH, pada tahun 2019 telah difasilitasi



bantuan premi bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PSP Kementerian Pertanian kepada 140.190 ekor sapi dan kerbau.



Ket:) * Realisasi Bantuan premi VS DPD AUTSK per 31 Desember 2019
(Sumber: Data Aplikasi 'SIAP' diolah Dit. PPHNak)

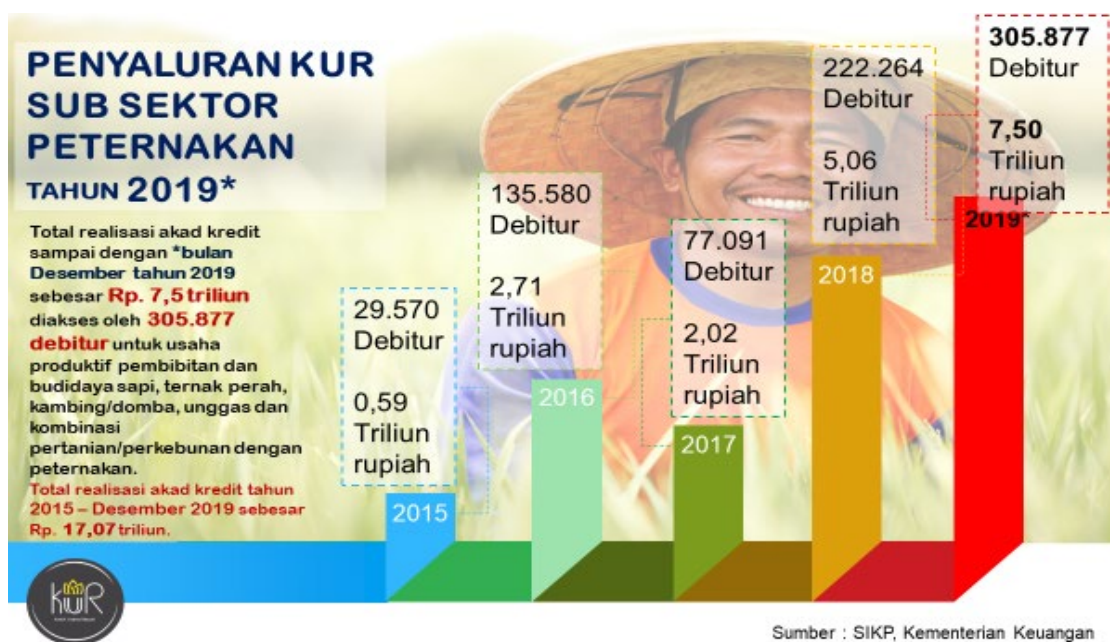
Grafik 6. Realisasi DPD AUTSK VS Bantuan Premi

- e. Pada aspek pembiayaan telah dilakukan koordinasi intensif kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam upaya penyediaan skema pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kriteria usaha peternakan. Pada tahun 2017, KUR yang telah dapat dimanfaatkan untuk usaha peternakan adalah KUR Mikro dan Retail dengan bunga 9% tanpa grace periode dan plafon maksimal 25 Juta rupiah untuk KUR Mikro dan 500 Juta rupiah untuk KUR Retail. Pada Skema pembiayaan ini dipandang masih belum dapat mengakomodasi karakteristik usaha peternakan khususnya pembiakan sapi yang memerlukan bunga rendah, jangka waktu lama dan grace periode.

Pembahasan secara intensif telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2015 - 2017. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Peraturan ini telah mengakomodasi usulan untuk pembiakan sapi dalam KUR Khusus dan penambahan subsidi bunga menjadi 7% serta sistem yarnen atau bayar setelah panen. Pada tahun 2018 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, maka telah disusun bahan sebagai masukan pada Petunjuk Teknis KUR Sub Sektor Pertanian tahun 2018 bahan KUR Khusus Peternakan sebagai bagian Petunjuk Teknis KUR Khusus yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. KUR Khusus masih dengan skema yang sama dengan KUR kecil, perbedaannya adalah dapat diakses oleh kelompok dalam kluster kemitraan dengan perusahaan/koperasi sebagai avalis dan atau offtaker.



Selanjutnya pada tahun 2019, pada bulan September telah dinaikan subsidi bunga KUR, sehingga debitur UMKM hanya harus membayar bunga 6%. Pada tahun 2019 telah difasilitasi KUR Realisasi KUR pada tahun 2019, jumlah debitur KUR usaha peternakan meningkat sebesar 37,62% dari tahun 2018, yaitu dari 222.264 debitur menjadi 305.877 debitur. Begitu juga nilai kreditnya meningkat sebesar 48,22%, yaitu dari Rp. 5,06 Triliun menjadi Rp. 7,50 Triliun. Realisasi akad kredit KUR Sub Sektor Peternakan pada tahun 2019 sebesar Rp. 7,50 triliun untuk 305.877 debitur tersebut dengan rincian : peternakan sapi/kerbau Rp. 3,62 triliun (48,27%), unggas Rp. 1,42 triliun (18,93%), peternakan integrasi dengan pertanian lainnya Rp. 1,33 triliun (17,73%), domba/kambing Rp. 0,64 triliun (8,53%), dan babi Rp.0,47 triliun (6,26%).



Grafik 7. Realisasi Kredit Usaha Rakyat Sub Sektor Peternakan, 2015-2019

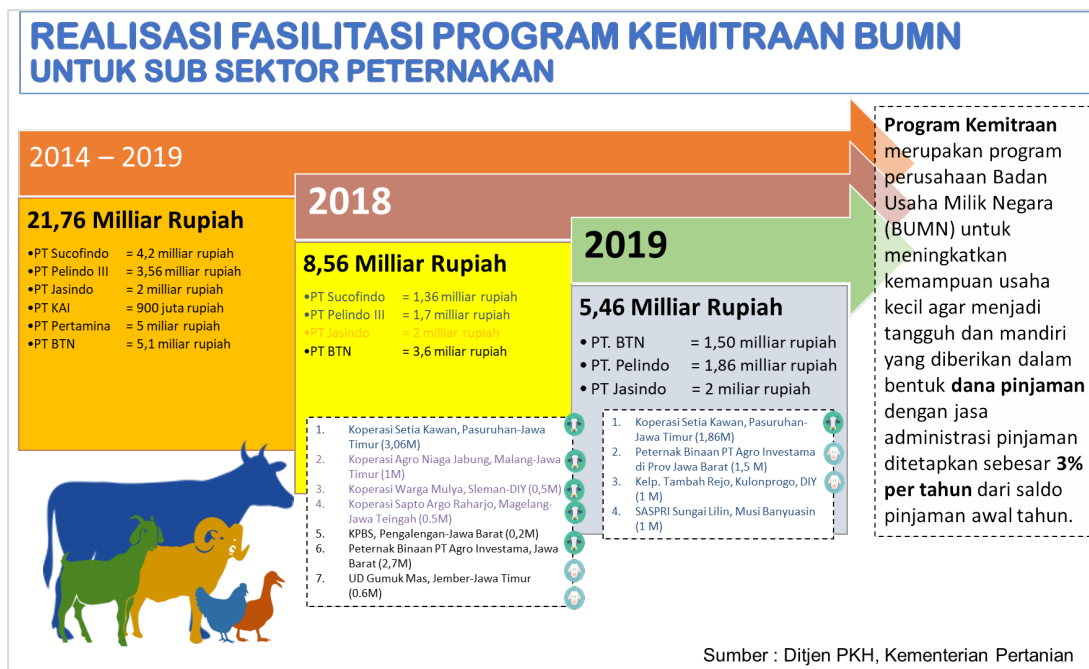
Penyaluran KUR pada usaha peternakan sapi masih mendominasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kepercayaan kreditur terhadap penerapan tata cara budidaya yang baik dan pengelolaan resiko usaha oleh peternak sapi/kerbau, selain tentu saja dengan dukungan asuransi usaha ternak sapi/kerbau. Rincian jumlah debitur dan realisasi akad kredit KUR tahun 2019 sub sektor peternakan per sektor usaha dapat dilihat pada grafik 7.





Grafik 8. Jumlah Debitur Dan Realisasi Akad Kredit KUR Tahun 2019

- f. Selain fasilitasi akses pembiayaan usaha melalui KUR, pada tahun 2019 telah dilakukan kerjasama dan pembinaan dalam upaya memanfaatkan program kemitraan (PK BUMN) sebesar Rp. 5,96 Milyar. PK tersebut diberikan koperasi peternak sapi perah, yaitu Koperasi Setia Kawan di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 1,86 Milyar; Kelompok Tambah Rejo Kulonprogo DIY sebesar Rp. 1 Milyar; Peternak binaan PT. Agro Investama di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1,5 Milyar; dan SPR Sungaililin di Kabupaten Musi Banyuasin untuk komoditas sapi potong sebesar Rp. 1,5 Milyar.



Gambar 3. Realisasi Fasilitasi Program Kemitraan BUMN Untuk Sub Sektor Peternakan

Berikut sebaran realisasi fasilitasi program Kemitraan BUMN Tahun 2018-2019 untuk sub sektor peternakan dan kesehatan hewan.





Gambar 4. Sebaran Realisasi Fasilitas Program Kemitraan BUMN Th. 2018-2019

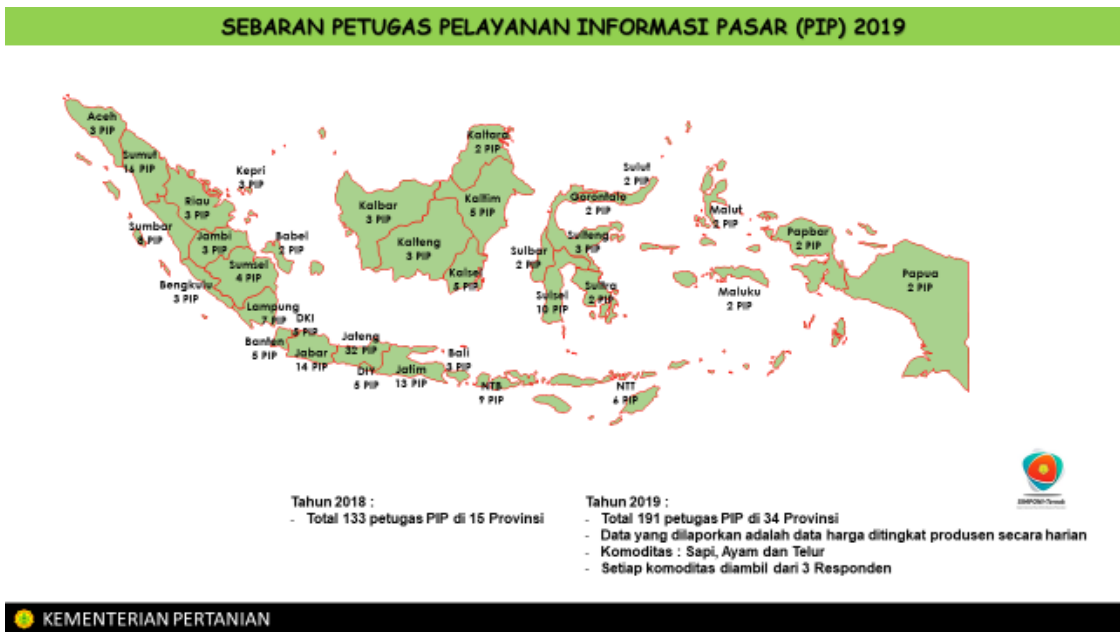
- g. Pembinaan pelaku usaha mendukung substitusi impor, terutama untuk pelaku usaha sapi potong, sapi perah dan itik. Pada tahun 2019 telah dibina 266 pelaku usaha dan ada penambahan 5 unit usaha baru. 266 pelaku usaha substitusi impor dimaksud dapat dilihat pada lampiran 10 Penambahan ini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang usaha peternakan sapi berdasar data BKPM tahun 2019 s.d. Triwulan III, yaitu 1) Timah Agro Manunggal, 2) Sumber Cipta Kencana, 3) Lingkar Agro Sejahtera, 4) Gangking Raya, dan 5) Great Giant Livestock. Investasi baru ini diharapkan dapat mendukung upaya substitusi impor daging dan bakalan sapi potong, yaitu untuk perusahaan Timah Agro Manunggal, Sumber Cipta Kencana, Lingkar Agro Sejahtera, Gangking Raya, dan untuk produksi susu, yaitu Great Giant Livestock.
- h. Pengembangan percontohan kawasan peternakan sapi potong berbasis korporasi peternak “Brahman Sejahtera” di Kabupaten Subang. Pengembangan kawasan ini. Beberapa kemajuan yang dicapai Brahman Sejahtera pada tahun 2019, antara lain : kemitraan penggemukan dengan Perkumpulan Pengusaha Minyak, sertifikasi pupuk organik dan penyerapan pupuk organik oleh BUMDES desa Balingbing kecamatan Pagaden Barat sebanyak 60 ton serta melalui KTNA; peternak menjual sapi melalui satu pintu ke bagian pemasaran koperasi dengan harga sesuai berat badan, sapi yang sakit di potong di RPH; dan penjualan pakan konsentrat ke Jabodetabek; serta penjualan saponak secara online. Dengan percontohan ini diharapkan dapat direplikasi di seluruh kawasan peternakan sapi perah seluruh Indonesia, yang berdasarkan Permentan Nomor 472 Tahun 2018 ada di 33 Provinsi pada 157 Kabupaten.





Gambar 5. Pengembangan Kawasan Korporasi Berbasis Peternak

- i. Pelayanan Informasi Pasar. Dalam upaya peningkatan akses informasi pasar, pada tahun 2019 telah dilakukan pengembangan informasi pasar di 187 lokasi (34 provinsi dan 153 kabupaten). Tujuan pengembangan informasi pasar adalah menyediakan informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu di tingkat produsen sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kerugian usaha ternak, sehingga memotivasi peternak dan calon peternak untuk berusaha di bidang peternakan.



Gambar 6. Peta Sebaran Petugas Pelayanan PIP

- j. Koordinasi tataniaga ternak dan hasil ternak sapi dilaksanakan di 2 (dua) provinsi, yaitu NTT dan NTB. Direktorat Jenderal PKH telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dalam upaya penataan tata niaga ternak dengan menggunakan kapal ternak. Pada tahun 2019 ada 6 kapal yang beroperasi, yaitu CN 1, CN 2, CN 3, CN 4, CN 5 dan CN 6. Pelabuhan angkut ternak yang sebelumnya hanya melalui Tenau dan Waingapu di Kupang



NTT saat ini bertambah 2, yaitu Pelabuhan Badas di Bima NTB dan Pelabuhan Kwandang di Gorontalo. Kapal Ternak selain berlabuh di Tanjung Priok juga berlabuh di Balikpapan dan Banjarmasin. Operasionalisasi kapal khusus ternak tahun 2019 telah berjalan 74 kali round voyage (pelayaran) sejak Januari-Desember 2019 dengan mengangkut ternak sebanyak 37.649 ekor. Loading factor mencapai 98%.

Tabel 21. Rekapitulasi Muatan Ternak 2015-2019

Tahun	Total Muatan (Ekor)	Asal Ternak (Provinsi)	Penerima Ternak (Provinsi)
2015	353	NTT	DKI Jakarta
2016	11,767	NTT	DKI Jakarta
2017	8,000	NTT	DKI Jakarta
2018	31,042	NTT, NTB, dan Sulteng	DKI Jakarta, Kaltim, Kalsel, dan Sulsel
2019*	37.649	NTT dan NTB	DKI Jakarta, Kaltim dan Kalsel
Total	88.811		

- k. Kegiatan dalam rangka meningkatkan produksi susu untuk mengurangi volume impor pada periode 2015-2019 diantaranya adalah: 1) pengembangan ruminansia perah sebanyak 138 kelompok atau 2.067 ekor, 2) mendorong farm swasta melakukan impor sapi bibit perah, dapat terealisasi sebanyak 10.976 ekor, 3) produksi bibit sapi FH oleh Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden untuk memperbaiki genetic sapi FH peternak sapi perah Indonesia sebanyak 2.221 ekor, 4) Produksi embrio sapi FH sebanyak 492 embrio, 5) produksi semen beku sapi FH oleh dua UPT BIB Nasional sebanyak 3,34 juta straw.

Sasaran Program 2 (SP2) TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN HEWANI ASAL TERNAK STRATEGIS NASIONAL

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan daging sapi/kerbau sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan pokok, Kementerian Pertanian menetapkan rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Strategis Nasional. Untuk sub sektor peternakan target indikator program yang ingin dicapai, yaitu peningkatan produksi daging sapi dan kerbau.



SP2. IKU3	
Produksi Daging Sapi Dan Kerbau	
Target 755 Ribu Ton	Realisasi 514,4 Ribu Ton
% Capaian 68,13%	

Produksi daging sapi/kerbau merupakan jumlah produksi daging sapi/kerbau nasional (ton) pada tahun 2019. Pada tahun 2019 produksi daging sapi dan kerbau dalam bentuk karkas ditargetkan dapat mencapai sebesar 755.000 ton. Data produksi daging sapi dan kerbau dihitung dengan rumus:

Jumlah sapi/kerbau nasional yang dipotong x berat karkas (kg) + *edible offal* (kg).

Proses pengumpulan data produksi daging sapi/kerbau dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilaksanakan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Perkembangan produksi daging sapi dan kerbau secara rinci dapat dilihat pada Tabel 22.

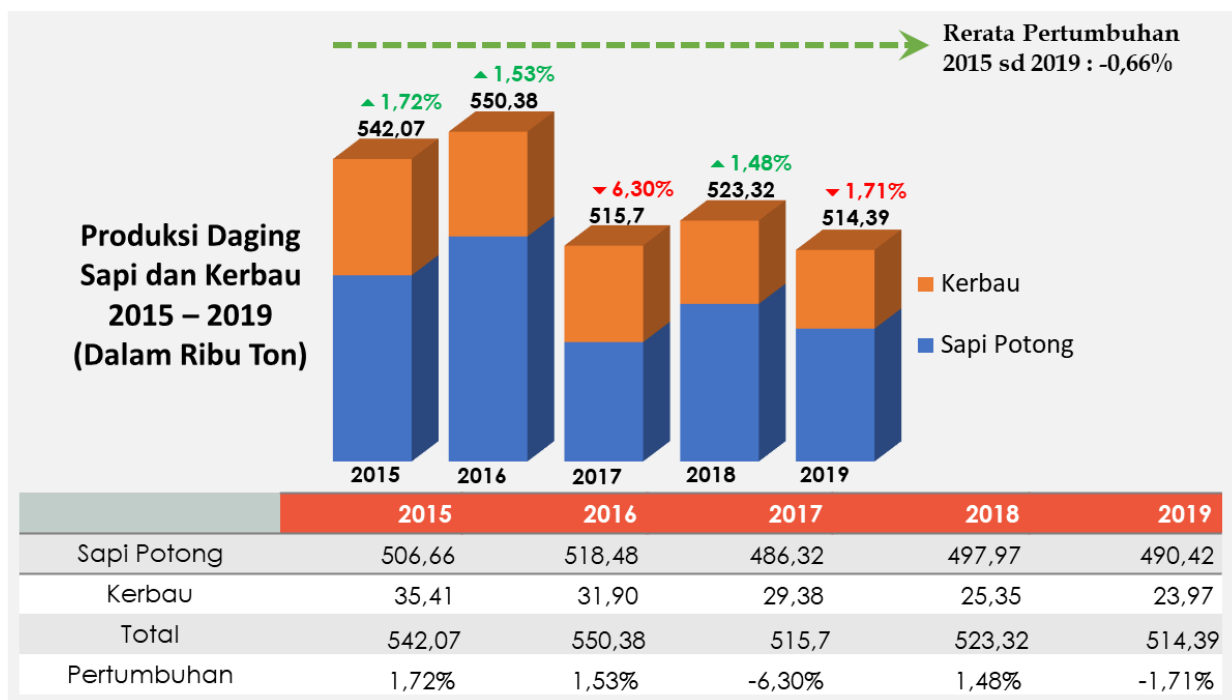
Tabel 22. Produksi daging sapi dan kerbau Tahun 2015-2019

Target dan Realisasi IKSP	2015	2016	2017	2018	2019	% Realisasi thd Target Thn 2019	% Realisasi th 2019 thd 2018	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (Ribu Ton)	545,29	588,56	639,61	695,00	755,00	68,13	98,29	68,13
Realisasi IKSP (Ribu Ton)	542,07	550,38	515,7	523,32	514,39			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Pada tahun 2019 produksi daging sapi dan kerbau dalam bentuk karkas sebesar 514.393 ton dari target sebesar 755.000 ton, capaian produksi daging sapi dan kerbau mencapai 68,13%, dengan kategori **Cukup Berhasil**. Secara rinci pertumbuhan produksi daging sapi dan kerbau pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 6.





Grafik 9. Produksi Daging Sapi dan Kerbau (Karkas) Tahun 2015-2019*

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya:

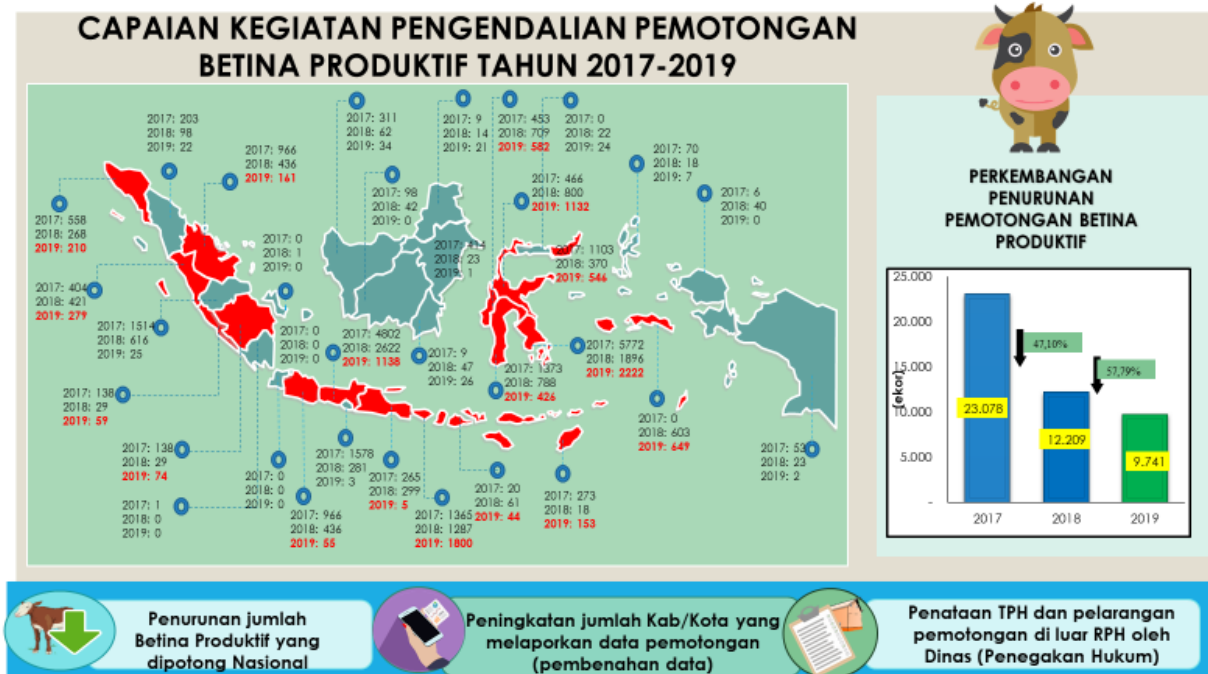
Dibandingkan dengan tahun 2018 produksi daging sapi dan kerbau sebesar 523 ribu ton, mengalami penurunan sebesar 1,71%. Penurunan produksi daging sapi di dalam negeri disebabkan oleh: (1) keberhasilan adanya program pengendalian pemotongan betina produktif di RPH, sehingga terdapat penurunan pemotongan sapi betina produktif; (2). Keberhasilan adanya program diversifikasi protein hewani dari daging sapi dan kerbau (*red meat*) ke daging unggas (*white meat*), serta menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan harga komoditi daging sapi dan kerbau (*red meat*) lebih mahal dibandingkan dengan daging unggas (*white meat*); (3) Peningkatan impor daging sapi dan kerbau.

Kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif merupakan salah satu program dari Upsus SIWAB yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah melakukan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau yang bertujuan untuk: (1). Menyelamatkan betina produktif dari pemotongan; (2). Mempertahankan dan/atau meningkatkan jumlah akseptor; dan (3). Menyelamatkan kelahiran pedet.

Sebagaimana diketahui bahwa sapi betina produktif merupakan mesin-mesin produksi penghasil pedet (anak sapi). Berdasarkan data yang dihimpun melalui iSIKHNAS, pada tahun 2018 pemotongan betina produktif secara nasional di lokasi target (17 provinsi) tercatat sebesar 12.209 ekor, sedangkan pemotongan sapi betina produktif pada tahun 2019 sebesar 9.471 ekor. Bila dibandingkan dengan



pemotongan betina produktif tahun 2018, maka secara nasional terjadi penurunan sebesar 47,10% dibandingkan tahun 2017, sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi penurunan lebih signifikan lagi yaitu sebesar 57,79% sebagaimana gambar 7 berikut:



Gambar 7. Capaian Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Keberhasilan penurunan pemotongan sapi betina produktif ini karena adanya pengawasan yang dilakukan dengan membentuk tim terpadu pengendalian pemotongan betina produktif tingkat provinsi yang melibatkan unsur Polda, Polres, Bhabinkamtibmas, Dinas Prov dan Dinas Kab/Kota pada lokasi target dan non target. Tim Terpadu Kabupaten/kota beranggotakan unsur dinas (Petugas Dinas), Polresta, RPH, Ceck Point, Puskesmas dan Bhabinkamtibmas. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dalam bentuk Sidak (inspeksi mendadak) yang frekuensinya disesuaikan dengan alokasi anggaran. Seluruh provinsi target telah membentuk Tim Pengawasan Terpadu bersama Kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas ataupun Kepala daerah. Seluruh Provinsi melakukan pengawasan dengan frekuensi sesuai ketersediaan anggaran. Untuk lokasi target, pengawasan oleh tim terpadu dilakukan minimal satu kali selama setahun sedangkan pengawasan rutin dilakukan oleh Bhabinkamtibmas setempat.

Provinsi Bengkulu, Bali, Sulawesi tenggara dan Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah dan Jawa Barat melakukan pengawasan tidak hanya dilokasi kabupaten/kota target tapi juga di lokasi non target dengan pertimbangan resiko pindahnya pemotongan dari lokasi target ke non target apabila pengawasan hanya terfokus ke lokasi target.



c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah:

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2019 cukup berhasil mencapai target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2019 sebesar 68,13% dari target sebesar 755.000 ton produksi daging sapi dan kerbau.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Realisasi capaian Kinerja tahun 2019 cukup berhasil mencapai target sebesar 68,13% dari target nasional sebesar 755 ton. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Kementerian Pertanian dan selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja:

Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi daging sapi dan kerbau ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan antara lain:

(1) Penerbitan beberapa regulasi terkait ruminansia besar, antara lain:

(a) Adanya kebijakan setiap importasi sapi bakalan harus impor 1 ekor sapi indukan, berdasarkan Permentan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/Pk.440/2/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/Pk.440/10/2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan ini diterbitkan untuk mendorong berkembangnya industri pembiakan sapi potong, sehingga ke depan diharapkan akan mengurangi impor daging dan bakalan. Selanjutnya, untuk mengakomodasi permasalahan di feedloter yang keberatan dengan kebijakan dimaksud, pada tahun 2019 telah dilakukan revisi terhadap Permentan tersebut dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Salah satu pasal permentan tersebut mengatur bahwa Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, dan Kelompok Peternak yang melakukan Pemasukan Bakalan wajib memasukkan Indukan sebanyak 5% (lima persen) dari setiap Rekomendasi. (b) Permentan Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2018 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Salah satu wujud regulasi tersebut, pada tanggal 14 Desember 2018, Kementerian Pertanian memfasilitasi penandatanganan MoU antara Bank dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mendorong peran aktif, serta sinergi antara Pemerintah Daerah, Perbankan dan investor dalam pengembangan peternakan sapi.

(2) Optimalisasi Reproduksi melalui Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)

Berdasarkan Permentan Nomor: 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting, SIWAB merupakan kegiatan yang terintegrasi untuk peningkatan populasi sapi dan



kerbau secara berkelanjutan. Percepatan peningkatan populasi dilaksanakan melalui Inseminasi Buatan (IB). Tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan kegiatan optimalisasi reproduksi melalui SIWAB. Capaian akseptor dari Januari s.d Desember 2019 sebanyak 3.586.374 akseptor atau 119,55% dari target 3.000.000 akseptor. Capaian bunting sebanyak 2.334.474 ekor atau 97,67% dari target 2.100.000 ekor, dan lahir sebanyak 1.995.528 ekor atau 118,78% dari target 1.680.000 ekor. Secara rinci kinerja optimalisasi reproduksi melalui kegiatan Upsus Siwab Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Kinerja Optimalisasi Reproduksi melalui Kegiatan Upsus Siwab Tahun 2017 – 2019

No	Tahun	Inseminasi Buatan			Kebuntingan			Kelahiran		
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1.	2017	4.000.000	3.976.470	99,41	3.000.000	1.892.462	63,08	-	911.135	-
2.	2018	3.000.000	3.987.661	132,92	2.100.000	2.051.108	97,67	1.680.000	1.832.767	109,09
3.	2019	3.000.000	3.586.374	119,55	2.100.000	2.334.474	111,17	1.680.000	1.995.528	118,78

Sumber : ISIKHNAS Ditjen PKH

Capaian akseptor IB dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 adalah 11.550.505 akseptor atau 115,50 % (Sangat Berhasil) dari target 10.000.000 akseptor, capaian bunting sebanyak 6.278.044 atau 87,19% dari target 7.200.000 ekor, dan lahir sebanyak 4.739.430 ekor.

(3) Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak ruminansia pada lokasi kegiatan melalui penanaman dan pemanfaatan tanaman pakan ternak yang berkualitas yang dapat diakses oleh kelompok ternak, dalam rangka mendukung Kegiatan SIWAB. Capaian pemenuhan hijauan pakan sampai bulan Desember 2019 sebanyak 1.893 Ha atau 108,06% dari target sebanyak 1.752 Ha.

(4) Penyediaan Semen Beku

Semen beku yang digunakan dalam SIWAB adalah yang ber-SNI atau telah melakukan uji lab berkala yang terstandar, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa semen beku yang beredar di masyarakat harus terjamin kualitasnya sehingga tidak merugikan peternak sebagai produsen. Pada tahun 2019 jumlah semen beku yang telah diterima oleh provinsi dari Balai Inseminasi Buatan dan Balai Inseminasi Buatan Daerah sebanyak 3.937.880 dosis, atau 81,55% dari target hibah 4.829.051 dosis dan distribusi semen beku dari provinsi ke



kabupaten/kota sebanyak 3.746.985 dosis atau 76,36% dari target distribusi sebanyak 4.907.223.

(5) Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif merupakan salah satu kegiatan dalam Program SIWAB. Pengendalian pemotongan betina produktif bertujuan untuk mencegah pemotongan sapi/kerbau betina produktif yang masih terjadi di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R). Sapi/kerbau betina produktif merupakan mesin produksi sapi/kerbau yang harus dilindungi, oleh sebab itu pemotongannya harus dikendalikan, sehingga sapi/kerbau betina produktif yang diselamatkan diharapkan akan mempertahankan keberadaan akseptor pelaksanaan SIWAB baik akseptor yang akan di-IB maupun akseptor yang sudah bunting. Pada tahun 2019, target pengendalian pemotongan betina produktif sebanyak 80 lokasi yang tercapai sebanyak 80 lokasi atau 100%.

Dalam upaya pengendalian pemotongan betina produktif telah dilakukan kegiatan kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif yang terdiri dari sosialisasi, perjanjian kerjasama (MoU) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri), dan pengawasan. Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepolisian Republik Indonesia dilakukan sejak tanggal 9 Mei 2018.

Pemotongan sapi dan kerbau betina produktif secara nasional pada periode Januari sampai Desember 2019 sebanyak 9.741 ekor. Jumlah pemotongan tersebut menurun 57,79% jika dibandingkan dengan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif pada rentang waktu yang sama pada Tahun 2018. Laporan pemotongan betina produktif tersebut berdasarkan data iSIKHNAS, dengan rata-rata partisipasi kabupaten/kota yang melaporkan sebanyak 368 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota se Indonesia (71,68%) pada Tahun 2019.

Dalam kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif dilakukan penolakan pemotongan betina produktif di Rumah Potong Hewan. Berdasarkan data iSIKHNAS, penolakan pemotongan betina produktif di RPH sejak bulan Januari sampai dengan Desember di 34 Provinsi target sebanyak 4.976 ekor dengan alasan penolakan bunting dan masih produktif.

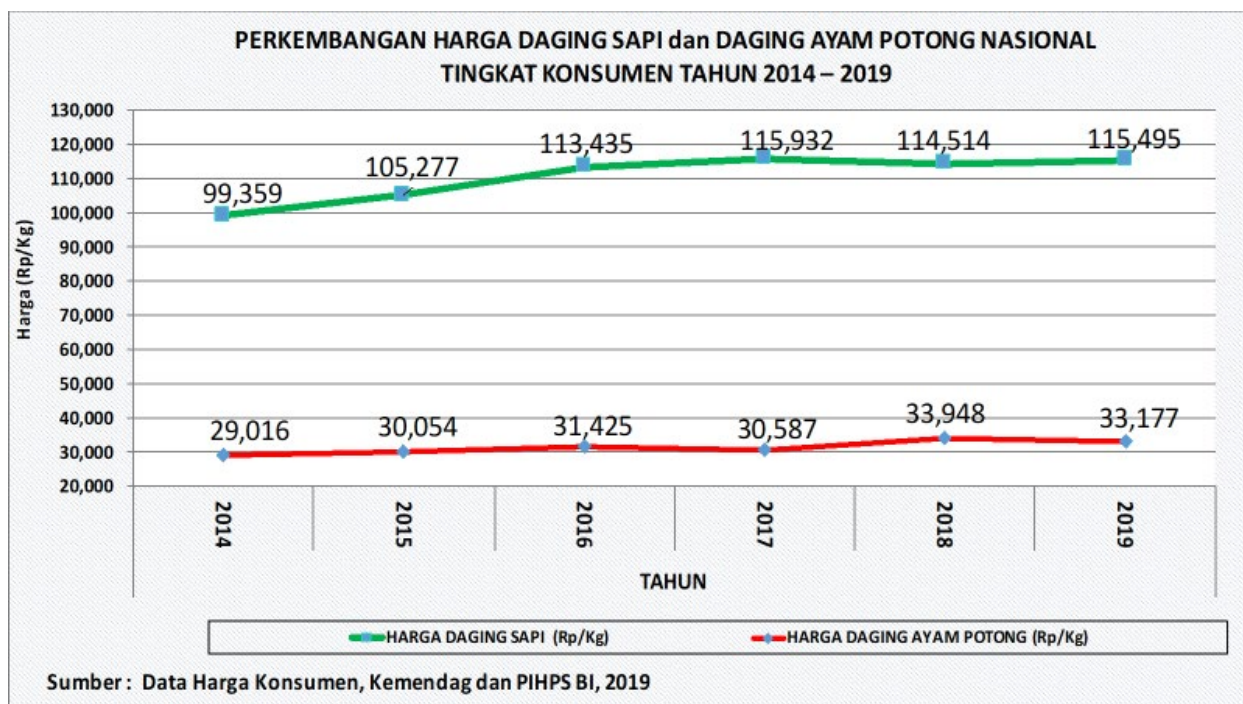
(6) Penanganan Gangguan Reproduksi

Kegiatan ini dilakukan oleh 8 UPT Veteriner dengan total wilayah penanganan sejumlah 27 provinsi. Capaian kinerja penanganan gangguan reproduksi nasional tahun 2019 sejumlah 61.859 ekor atau 91,26% dari target 67.780 ekor penanganan. Selanjutnya dari penanganan tersebut, tingkat kesembuhan nasional yang tercapai sejumlah 45.615 ekor atau 73,74%. Tindak lanjut dari



kesembuhan adalah dilakukannya Inseminasi Buatan (IB) dengan realisasi IB sejumlah 26.036 ekor atau 57,08%.

Penurunan produksi daging pada periode 2015-2019 diduga juga dipengaruhi oleh keberhasilan program diversifikasi protein hewani dari daging sapi dan kerbau (*red meat*) ke daging unggas (*white meat*). Selain itu juga karena menurunnya daya beli masyarakat karena harga komoditi daging sapi dan kerbau (*red meat*) lebih mahal dibandingkan dengan daging unggas (*white meat*). Berdasarkan data yang bersumber dari Dit. PPHNak harga rata-rata daging sapi nasional ditingkat konsumen periode 2015-2019 berada pada kisaran Rp.105.277 – Rp.115.495. Tingginya harga daging sapi tersebut memicu perubahan preferensi konsumsi masyarakat dari daging sapi ke daging unggas lebih khusus pada daging ayam ras pedaging (broiler) yang dianggap lebih terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan data yang bersumber dari Dit. PPHNak harga rata-rata daging ayam potong nasional ditingkat konsumen periode 2015-2019 berada pada kisaran Rp. 30.054 – Rp. 33.177.



Grafik 10. Perkembangan Harga Daging Sapi dan Daging Ayam Tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik 9 di atas dapat dilihat bahwa adanya impor daging kerbau dari India mampu menekan harga rerata daging sapi pada tahun 2018 menjadi turun 1,22% dan tahun 2019 menjadi turun 0,38% apabila dibandingkan dengan harga daging sapi pada tahun 2017.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Pada tahun 2019, dalam rangka mendukung terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional, Direktorat teknis Lingkup Ditjen PKH telah mengalokasikan anggaran dalam rangka Optimalisasi Reproduksi, Penanggulangan Gangguan Reproduksi, Hijauan Pakan Ternak, Pengendalian Pemotongan Betina Produktif, Benih Ternak Unggul, Bibit Ternak Unggul, dan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong. Alokasi Optimalisasi Reproduksi pada tahun 2019 sebesar 3.000.000 akseptor, alokasi Penanggulangan Gangguan Reproduksi sebesar 67.780 ekor, alokasi Hijauan Pakan Ternak sebesar 1.752 Ha, alokasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif sebesar 80 lokasi, alokasi Pengembangan Benih Ternak Unggul sebanyak 4.576.700 dosis, alokasi Pengembangan Bibit Ternak Unggul sebanyak 580.181 ekor, dan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong sebanyak 9.940 ekor. Dari segi besaran alokasi capaian kegiatan pendukung, nilai efisiensi yang didapatkan sebesar 114,67% atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya. Nilai efisiensi indikator kinerja tersebut tersaji pada lampiran 8.

Tabel 24. Kegiatan Pendukung IKU III Tahun 2019

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Hijauan Pakan Ternak	Ha	31.339	29.652	95	1.843	1.831	99,35
2	Pakan Olahan dan bahan pakan	Ton	62.252	59.539	96	9.587	9.238	96,36
3	Mutu dan Keamanan Pakan	Sampel	12.105	11.900	98	5.000	7.237	144,74
4	Penanggulangan Gangguan Reproduksi	Ekor	18.380	16.565	90	67.780	61.859	91,26
5	Optimalisasi Reproduksi	Akseptor	356.515	340.613	96	3.000.000	3.586.374	119,55
6	Benih Ternak Unggul	dosis	54.549	51.203	94	4.764.889	5.139.124	107,85
7	Bibit Ternak Unggul	ekor	58.087	53.472	92	667.935	1.054.597	157,89
8	Pengembangan ternak ruminansia potong	Ekor	117.498	109.532	93	9.590	8.638	90,07
9	Pengendalian Pemotongan Betina produktif	Lokasi	9.590	9.376	98	80	80	100,00

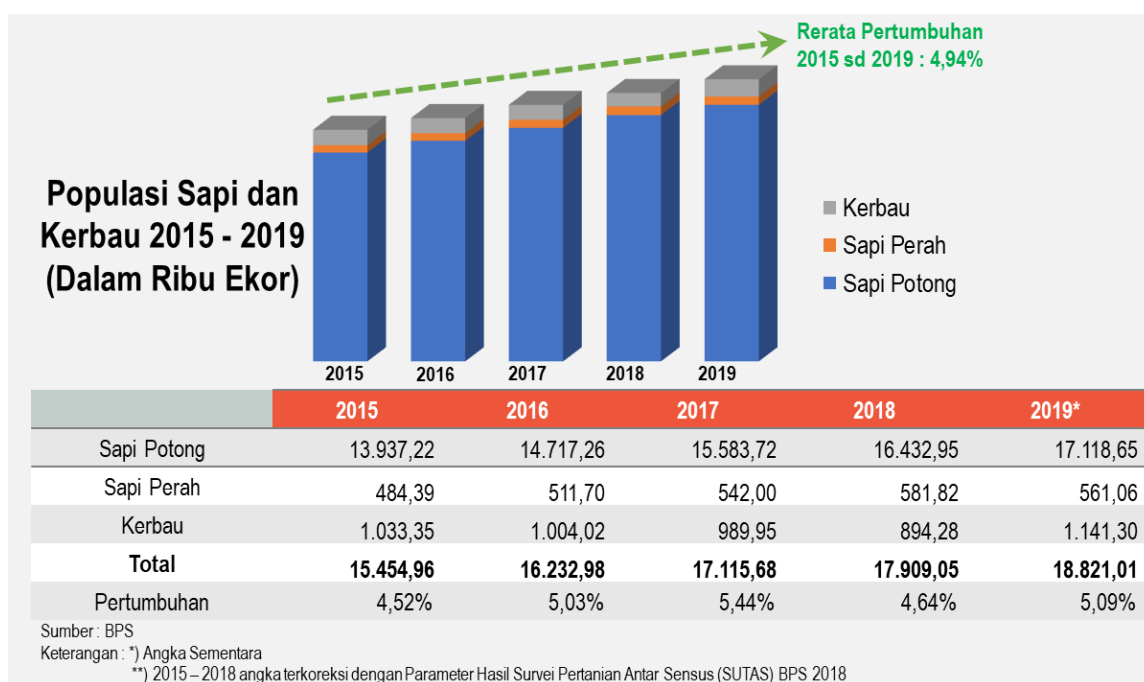
Sumber data: SMART Kemenkeu, 2019

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan Upsus Siwab (Sapi Indukan Wajib Bunting) yang dicanangkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2016. Kegiatan Upsus Siwab merupakan kegiatan lanjutan GBIB (Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan), namun lebih komprehensif



kegiatannya untuk optimalisasi reproduksi. Dampak kinerja Upsus Siwab dapat dilihat pada Grafik 8 terkait Perkembangan Populasi Sapi Dan Kerbau Selama 2015-2019 yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah populasi sapi dan kerbau sebanyak 15,455 juta ekor dan secara konsisten meningkat menjadi 16,233 juta ekor pada tahun 2016, 17,116 juta ekor pada tahun 2017, 17,909 juta ekor di tahun 2018, dan 18,465 juta ekor di tahun 2019. Secara rinci pertumbuhan populasi sapi potong tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik 11.



Grafik 11. Populasi Sapi dan Kerbau 2015-2019*

Jika dilihat dari capaian angka populasi sapi di dalam negeri terjadi peningkatan populasi sapi potong yang cukup signifikan. Dari Grafik 8 dapat dilihat trend pertumbuhan populasi Sapi dan Kerbau 2015-2019 yang menunjukkan rerata pertumbuhan populasi sapi dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sebesar 4,94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa program percepatan peningkatan populasi sapi melalui kegiatan Upsus Siwab memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan populasi, meskipun belum terlihat berpengaruh dalam peningkatan produksi dan menurunkan impor daging sapi.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Upsus SIWAB periode 2017-2019 berpengaruh dalam peningkatan jumlah populasi sapi dan kerbau, serta memberikan dampak nilai ekonomi secara nasional. Dampak nilai manfaat ekonomi tersebut dihitung dari nilai jual pedet lepas sapih (umur 6 bulan), dimana harga rata-rata pedet lepas sapih sebesar Rp 8 juta rupiah, jika dikalikan dengan jumlah kelahiran pedet sebanyak **4.739.430** ekor, maka dampak nilai manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan



UPSUS SIWAB sebesar Rp 37,91 Triliun. Sementara input pelaksanaan UPSUS SIWAB sebesar Rp 1,9 Triliun.

UPSUS SIWAB juga memberikan dampak lain seperti: (1) mampu menumbuhkan kesadaran petani peternak untuk melakukan kawin suntik atau Inseminasi Buatan (IB); (2) kelahiran ternak sapi dapat terdata secara realtime melalui ISIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Terintegrasi); (3) peningkatan lapangan kerja baru tenaga teknis bidang peternakan (inseminator dan paramedik) di pedesaan; dan (4) meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam usaha peternakan sapi dengan adanya insentif pelayanan.

Namun demikian, peningkatan populasi sapi potong yang terjadi belum diiringi dengan peningkatan produksi sesuai dengan yang ditargetkan dalam Road Map Pengembangan Sapi dan Kerbau di Indonesia yang disebabkan adanya kendala dalam program penambahan sapi indukan impor. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan program penambahan sapi indukan impor Kementerian Pertanian pada tahun 2015 hingga tahun 2018 realisasinya tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena adanya kendala dalam pengadaan sapi seperti pada tabel berikut:

Tabel 25. Penambahan Indukan Impor Tahun 2015-2018

TAHUN	TARGET	REALISASI		PERKEMBANGAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/ TINDAKLANJUT	KETERANGAN
	EKOR	EKOR	KELOMPOK				
2015	10.000	1.926	62	1.950	Lamanya proses persiapan lelang sampai dengan kontrak dan belum tersedianya IKH//IKHS sehingga diperlukan pembuatan IKH//IKHS	Lebih cermat dalam memilih penyedia	61 Kelompok dan 1 UPTD
2016	4.550	4.397	184	5.839	Adanya ternak yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebanyak 153 ekor	Pihak penyedia agar lebih cermat dalam memilih ternak sesuai spesifikasi	
2018	6.000	2.652	142	2836	Ketidakmampuan penyedia barang menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya kontrak	Lebih cermat dalam memilih penyedia	130 kelompok dan 12 UPTD

Selain itu, akar permasalahan tidak tercapainya target produksi daging sapi dan kerbau di tahun 2019 yaitu gangguan reproduksi pada indukan ternak sapi, pemotongan betina produktif, produktivitas sapi dan kerbau dengan *Body Conditioning Score* (BCS) yang masih rendah, skala kepemilikan peternak yang kecil, ternak sebagai usaha sampingan, kekurangan jumlah SDM tenaga teknis reproduksi (IB, PKb, dan ATR), dan kurangnya sarana dan prasarana.

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, disusunlah solusi sebagai rekomendasi perbaikan di masa mendatang dengan terus melanjutkan kegiatan



strategis percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau di dalam negeri, antara lain: (1) penanggulangan gangguan reproduksi pada indukan sapi, (2) penanganan pemotongan sapi betina produktif, (3) perbaikan pakan sapi, (4) penguatan kelembagaan peternak, (5) pelatihan dan bimbingan teknis, (6) penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana semen beku, N₂ Cair, dan kontainer dan (7) penambahan impor bibit sapi indukan untuk meningkatkan jumlah induk sapi/kerbau dalam negeri; (8) perbaikan pendataan terkait data capaian optimalisasi reproduksi (kelahiran IB dan kawin alam) melalui perbaikan identitas ternak; (9) Pengembangan sapi potong pada kelompok peternak.

Sasaran Program 3 (SP3)

TERSEDINYA INFRASTRUKTUR PETERNAKAN YANG SESUAI KEBUTUHAN

Penggunaan alat dan mesin untuk kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak dalam setiap aspek proses produksi merupakan bentuk transformasi pertanian modern dan mutlak harus dilakukan. Transformasi ke arah peternakan modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas, efisien dalam penggunaan sumberdaya dan teknologi, serta mampu menghasilkan output yang berkualitas, bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Dalam penyediaan daging bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal dibutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet). Penyediaan daging harus berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH), sedangkan untuk Hari Raya Kurban harus dilakukan pada lokasi yang memiliki fasilitas pemotongan hewan, serta penanganan karkas/daging. RPH maupun fasilitas pemotongan hewan kurban seharusnya dimiliki oleh semua provinsi bahkan kabupaten/kota diseluruh Indonesia sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengkonsumsi daging yang ASUH. Namun dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, adanya keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi di daerah maupun pusat menyebabkan terbatasnya penyediaan fasilitas tersebut di Indonesia.

Total kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) yaitu RPH atau fasilitas pemotongan hewan kurban berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) sebanyak 519 dengan pertimbangan bahwa RPH atau fasilitas pemotongan hewan kurban tersebut dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Jenis alsintan yang dibutuhkan dan telah difasilitasi oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, yaitu Rumah Potong Hewan (RPH) dan fasilitas pemotongan hewan kurban.



SP3. IKU4	
Rasio Ketersediaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan Kebutuhan Pasca Panen Pangan Hewani Asal Ternak	
Target 30%	Realisasi 34,60%
% Capaian 115,33%	

Pada tahun 2019 rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak ditargetkan sebesar 30%. Realisasi indikator Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan Kebutuhan Pasca Panen Pangan Hewani Asal Ternak diperoleh dengan cara membandingkan ketersediaan alat dan mesin yang tersedia terhadap total alat mesin yang dibutuhkan, atau dengan rumus:

$$x = \left[\frac{\sum \text{Alsintan Pra dan Pasca Panen yang tersedia}}{\sum \text{Alsintan Pra dan Pasca Panen yang dibutuhkan}} \right] \times 100\%$$

\sum Alsintan Pra dan Pasca Panen yang tersedia berasal dari jumlah alsintan pasca panen pangan hewani asal ternak yang dapat difasilitasi sampai dengan tahun 2019.

\sum Alsintan Pra dan Pasca Panen yang dibutuhkan berasal dari data kebutuhan alsintan pasca panen pangan hewani asal ternak di Ditjen PKH. Secara rinci Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak) dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak)

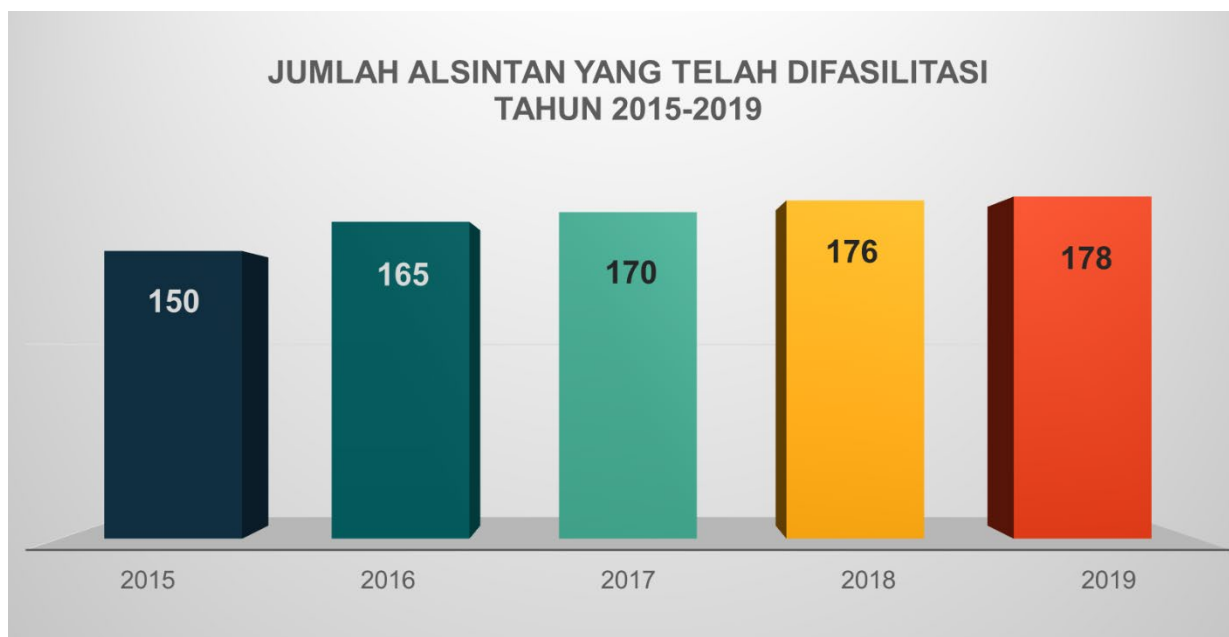
Target dan Realisasi IKSP	2015	2016	2017	2018	2019	% Realisasi thd Target Thn 2019	% Realisasi th 2019 thd 2018	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	-	-	27,0	30,0	115,33	102,03	115,33
Realisasi IKSP (%)	70	73,1	76,8	33,9	34,6			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Berdasarkan cara pengukuran diatas, jumlah kebutuhan alsintan pasca panen pangan hewani asal ternak sebanyak 519 dan jumlah ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga tahun 2019 sebanyak 178, sehingga realisasi indikator Rasio Ketersediaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) tahun 2019 sebesar 34,60% dari target 30% atau mencapai 115,33%, dengan kategori **Sangat Berhasil**. Dari tahun



sebelumnya terjadi peningkatan ketersediaan alsintan sebanyak 0,39%, meliputi 176 unit sampai dengan tahun 2018 menjadi 178 unit sampai dengan tahun 2019. Rincian jumlah ketersediaan alsintan pasca panen Tahun 2019 terlihat pada Grafik 11.



Grafik 12. Jumlah Alsintan yang telah difasilitasi 2015-2019 (unit)

Pada tahun 2019 bantuan untuk rincian penyediaan sarana prasarana tersebut untuk Sarana Prasarana Pemotongan Hewan Kurban di 3 lokasi yaitu Kota Tangerang Provinsi Banten, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 3 target ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) tahun 2019 terrealisasi sebanyak 2 lokasi yaitu di Masjid Uswatuh Khasanah Kota Tangerang Provinsi Banten dan Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Sedangkan 1 lokasi di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terealisasi karena terkendala izin dari Pemerintah daerah.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya:

Dibandingkan dengan tahun 2018 terdapat penambahan sebanyak 2 unit alsintan sehingga total ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) sampai dengan tahun 2019 sebanyak 178 unit, terdiri dari 176 unit dari kinerja sampai dengan tahun 2018 menjadi 178 unit sampai dengan tahun 2019. Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) tahun 2019 sebesar 34,60%, naik 0,7% dari tahun 2018.



c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah:

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2019 sebesar 115,33% atau sangat berhasil karena mencapai di atas 100% terhadap target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2019. Dibandingkan dengan target jangka menengah capaian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana RPH dan tempat pemotongan hewan kurban yang secara rinci dijelaskan pada tabel 28.

Tabel 27. Rasio ketersediaan Alsintan 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	70,00%	70,00%	100,00%
2016	73,00%	73,10%	100,14%
2017	76,00%	76,80%	101,05%
2018	27,00%	33,91%	125,56%
2019	30,00%	34,60%	115,33%

Capaian kinerja sebesar 115,33% menunjukkan bahwa target sasaran program Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan ketersediaan alsintan dengan indikator kinerja Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak pada tahun 2019 telah terpenuhi, meskipun realisasi kegiatan tidak mencapai 100%. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya pencapaian kinerja pada tahun 2018 yang telah melampaui target yaitu sebesar 33,91% melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pada saat penetapan target IKU tahun 2018 dan 2019 belum sepenuhnya terpantau. Keberhasilan pencapaian target didukung oleh telah disiapkannya Dokumen Model Sarana Pemotongan Hewan dalam bentuk desain dan gambar teknis di Pusat, sehingga Pemerintah daerah dapat mengadopsi model tersebut, menyesuaikan dengan ketersediaan lahan, sehingga fasilitas tersebut tepat sasaran.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Realisasi capaian Kinerja tahun 2019 sebesar 115,33% telah sangat berhasil mencapai target standar nasional Kementerian Pertanian. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja:

Capaian kinerja sebesar 115,33% menunjukkan bahwa target sasaran program tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan ketersediaan alsintan dengan indikator kinerja Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak pada tahun 2019



telah terpenuhi. Namun demikian, jika dilihat kondisi saat ini masih banyak sarana prasana di RPH (Rumah Potong Hewan) maupun lokasi pemotongan hewan kurban belum memenuhi syarat, sehingga tidak ada jaminan terhadap keamanan dan kelayakan daging yang akan dikonsumsi.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Sebagai dukungan terhadap tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan melalui ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak), Direktorat Kesmavet telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH. Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan hasil nilai efisiensi sebesar 192,28% atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel 28. Kegiatan Pendukung IKU IV Tahun 2019

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	13.757	11.865	86,25	135	191	141,48

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2019

h. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, namun adanya keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi di daerah menyebabkan terbatasnya penyediaan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang diterima oleh suatu daerah, sehingga penjaminan daging ASUH belum optimal. Di satu sisi keberadaan RPH merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sementara kemampuan daerah untuk fasilitasi RPH tersebut masih sangat terbatas.

Oleh karena itu Pemerintah Pusat mengalokasikan bantuan pembiayaan untuk pelaksanaan fungsi tersebut melalui alokasi dana Fasilitasi RPH berupa fasilitasi peralatan dan Fasilitasi Bangunan melalui sumber dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus. Alokasi Tugas pembantuan sendiri telah dihilangkan sejak tahun 2018 dan DAK RPH juga sudah dihapus sejak tahun 2019.

Rekomendasi yang diberikan adalah agar ada alokasi anggaran untuk pemenuhan alsintan, terutama alsintan pasca panen untuk peternakan seperti Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) sebagai sarana fasilitasi pemotongan hewan kurban. Selain itu, perlu juga dibahas bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana RPH.



Sasaran Program 4 (SP4)

MENINGKATNYA LUAS WILAYAH YANG TERBEBAS DARI PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

Status kesehatan hewan dapat meningkatkan produksi pangan asal ternak serta peningkatan daya saing peternakan melalui kegiatan pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Dan Zoonosis (PHMSZ). Status kesehatan hewan merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di masing-masing provinsi. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih difokuskan pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza* dan *Hog Cholera* atau yang sering dikenal dengan RABAH.

SP4. IKU5	
Rasio Wilayah Yang Terbebas Dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah Yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis	
Target 80%	Realisasi 78,1%
% Capaian 97,63%	

Status kesehatan hewan merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di masing-masing provinsi. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih di fokuskan pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza* dan *Hog Cholera* atau yang sering dikenal dengan RABAH. Tahun 2019 target yang ditetapkan adalah 80% dengan capaian 78,1% yang dihitung secara nasional. Penghitungan dilakukan di 34 provinsi dan 404 Kabupaten/Kota. Realisasi indikator ini diperoleh dengan cara membandingkan wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis, atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Luas wilayah terbebas dari penyakit hewan menular strategis}}{\sum \text{total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \right) \times 100\%$$

Penetapan daerah Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada tahun 2019 antara lain:

- a. Pembebasan *Rabies* di Pulau Makalehi, Buhias, Pahapa, Tagulandang, Ruang, Biaro Kepulauan Sitaro melalui SK Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/PK.320/M/7/2019 tanggal 2 Juli 2019.
- b. Pembebasan *Rabies* Provinsi Papua melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 600/Kpts/PK.320/M/7/2018 tanggal 2 Juli 2019.



- c. Pembebasan *Brucellosis* di Kabupaten Simeulue melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 438/Kpts/PK.320/M/07/2019 Tanggal 17 Juli 2019
- d. Pembebasan *Brucellosis* Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/PK.320/M/07/2019 Tanggal 17 Juli 2019.

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis adalah 78,1%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, maka tercapai 97,63% atau masuk kategori **berhasil**.

Tabel 29. Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis

Target dan Realisasi IKSP	2015	2016	2017	2018	2019	% Realisasi thd Target Thn 2019	% Realisasi th 2019 thd 2018	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	-	-	79,0	80,0	97,63	100,64	97,63
Realisasi IKSP (%)	64,5	71,4	76,9	77,6	78,1			

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya:

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang capaiannya sebesar 77,6% maka capaian tahun 2019 meningkat sebesar 0,64%. Pada tahun 2019, wilayah bebas rabies terdiri dari 8 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua dan Papua Barat (bebas historis), maupun yang dibebaskan dengan program pemberantasan (DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur). Jumlah provinsi bebas berkurang pada tahun 2019 ini karena telah terjadi wabah rabies di Pulau Sumbawa, Provinsi NTB (sesuai Keputusan Menteri Pertanian nomor 223/KPTS/PK320/M/3/2019). Wilayah ini sebelumnya merupakan wilayah bebas rabies. Penularan rabies di Pulau Sumbawa pertama kali terjadi di Kabupaten Dompu yaitu pada bulan Januari tahun 2019. Berdasarkan data sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan 47,56% sampel anjing positif rabies. Rincian hasil pemeriksaan sampel per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Rincian hasil pemeriksaan laboratorium

Kecamatan	Jumlah Sampel	Sampel Positif	Sampel Negatif
Kempo	24	6	18
Manggelewa	29	11	18
Woja	12	6	6
Dompu	28	17	11
Hu'u	32	17	15
Pajo	27	17	10
Pekat	7	0	7

Kilo	5	4	1
Total	164	78	86

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2019 telah berhasil mencapai sebesar 97,63% dari target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2019. Perkembangan wilayah yang terbebas penyakit menular strategis tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Perkembangan Wilayah yang Terbebas Penyakit Menular Strategis Tahun 2015- 2019

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah Wilayah yang Terbebas dari PHMS (lokasi)	394	436	470	474	477
Jumlah Wilayah yang Terdampak PHMS (lokasi)	611	611	611	611	611
Rasio (%)	64,5	71,4	76,9	77,6	78,1

Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan Ditjen PKH, 2019

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Realisasi capaian Kinerja tahun 2019 sebesar 78,1% masuk kategori **berhasil** mencapai standar nasional Kementerian Pertanian sebesar **97,63%** dari target. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja:

Kinerja indikator Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis berhasil mencapai sebesar **97,63%**. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa upaya diantaranya:

1. Penanggulangan wabah rabies yang dilakukan: 1). Pelaksanaan investigasi kasus rabies; 2). Pemberian bantuan vaksin rabies, operasional serta peralatan pendukung lain; 3). Pelaksanaan pelatihan penanggulangan rabies bag bagi petugas vaksinator; 4). Pelaksanaan pelatihan penghitungan populasi anjing.
2. Pengendalian AI, berdasarkan SK Menteri sebanyak 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Papua, Maluku dan Maluku Utara. Total wilayah yang bebas HPAI sebanyak 50 kabupaten/kota, sedangkan untuk kompartemen bebas AI selama tahun 2019 tercatat sebanyak 87 unit. Pada tahun 2019, dialokasikan 1.750.000 dosis vaksin AI di 6 wilayah risiko tinggi selain 1.565.000 dosis yang disediakan



sebagai stok pusat apabila terjadi wabah atau kekurangan vaksin. Untuk surveilans yang dilakukan oleh Balai Veteriner selama tahun 2019 dilakukan sebanyak 62.308 sampel.

3. Total Provinsi yang bebas brucellosis hingga tahun 2019 adalah 17 provinsi (222 kabupaten/kota) dan 3 pulau, serta 1 unit kompartemen. Kegiatan pengendalian brucellosis yang dilakukan antara lain alokasi vaksin brucellosis sebanyak 45.650 dosis pada 6 provinsi. Untuk surveilans yang dilakukan, telah dialokasikan sebanyak 30.789 sampel. Rencana selanjutnya dalam mencapai target bebas brucellosis tahun 2025 antara lain: 1). Surveilans di wilayah bebas untuk memastikan tidak ditemukannya agen penyakit, serta di wilayah endemis untuk mengukur prevalensi; 3). Melanjutkan program bebas brucellosis Pulau Jawa; 3). Menindaklanjuti surveilans di UPT perbibitan untuk dapat menetapkan status brucellosis.
4. Pada Tahun 2019, kasus positif anthrax ditemukan di wilayah yang memang berstatus endemis yaitu Sulawesi Selatan dan DIY. Tindakan yang dilakukan antara lain investigasi kasus, advokasi serta pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok ternak di wilayah tersebut.
5. Pengendalian dan penanggulangan hog cholera yang dilaksanakan adalah vaksinasi di daerah endemis dan pengobatan hewan sakit. Hingga saat ini, wilayah yang bebas Hog Cholera sebanyak 19 kabupaten/kota (Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014). Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hog cholera telah dilakukan rapat tentang rencana pembebasan hog cholera provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2017 dan 2018 Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan vaksinasi secara massal. Pada tahun 2017 lalu melalui Balai Besar Veteriner Maros telah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 150.000 dosis. Sedangkan pada tahun 2018 telah dilakukan vaksinasi sebanyak 45.000 dosis dari anggaran TP dan 30.000 dosis alokasi dari pusat. Pada tahun 2019 dilakukan alokasi vaksin hog cholera ke wilayah Sulawesi Utara sebesar 45.000 dosis dan Papua sebesar 5.000 dosis, sedangkan stok pusat yang disediakan sebanyak 43.000 dosis.
6. Langkah yang telah dilakukan dalam pengendalian penyakit ASF di Provinsi Sumatera Utara antara lain: a. Peningkatan kewaspadaan thd masuknya penyakit ASF (SE Dirjen PKH ke Dinas dan Kepala Daerah se Indonesia, pemasangan banner dan spanduk peringatan tentang bahaya penyakit ASF yang dapat terbawa dari negara / wilayah tertular; b. Sosialisasi ke dinas, peternak, asosiasi peternak tentang bahaya dan pencegahan masuknya penyakit ASF; c. Peningkatan kemampuan pengujian dan investigasi thd ASF oleh BBVet dan Bvet se-Indonesia; d. Pelaksanaan Surveilans dan Investigasi oleh Tim gabungan Ditjen PKH, Bvet Medan dan Dinas PKH Propinsi dan Dinas PKH Kabupaten (respon thd laporan adanya kematian ternak babi di Sumut); e. Pemberian bantuan berupa alat pelindung diri, desinfektan, obat-obatan serta keperluan penunjang lain oleh Direktorat Jenderal PKH; f. Rapat koordinasi dan advokasi terkait penanganan kasus kematian babi di Provinsi Sumatera Utara; g. Evakuasi dan Disposal Bangkai babi yang dibuang ke sungai bersama Tim Gabungan Lintas OPD di Provinsi Sumut; h. Pembentukan posko pengendalian ASF



Mengingat adanya wabah ASF di berbagai negara termasuk di Sumatera Utara, dilakukan peningkatan surveilans terkait ternak babi di Indonesia. Selain di Provinsi Sumatera Utara, dari hasil surveilans ditemukan peningkatan kematian babi di beberapa wilayah antara lain Sumatera Barat, NTT.

Capaian status kesehatan hewan dibawah target dikarenakan beberapa hal antara lain: (1). Adanya wabah Rabies di beberapa lokasi di Provinsi NTB; dan (2). Adanya penurunan jumlah provinsi bebas rabies semula 9 Provinsi menjadi 8 Provinsi karena Provinsi NTB sebelumnya merupakan wilayah bebas Rabies. Status kesehatan hewan Tahun 2018 sebesar 77% dari target 80%, untuk tahun 2019 target yang ditetapkan adalah 80% dengan capaian 78,1% yang dihitung secara nasional. Dibandingkan dengan tahun lalu terdapat peningkatan status kesehatan hewan sebesar 101,4%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah capaian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terjadi peningkatan karena kurun waktu 3 tahun tersebut dilakukan pembebasan terhadap 14 wilayah terhadap penyakit Rabies, AI, Brucellosis dan Septicemia Epizootica.

Peningkatan status kesehatan hewan dipengaruhi oleh pembebasan wilayah pada tahun 2019 yaitu Pembebasan Rabies di Pulau Makalehi, Buhias, Pahapa, Tagulandang, Ruang, Biaro Kepulauan Sitaro melalui SK Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/PK.320/M/7/2018 tanggal 2 Juli 2019 dan Provinsi Papua melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 600/Kpts/PK.320/M/7/2018 tanggal 2 Juli 2019, dan Pembebasan Brucellosis di Kabupaten Simeulue melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 438/Kpts/PK.320/M/07/2019 Tanggal 17 juli 2019 dan Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/PK.320/M/07/2019 Tanggal 17 juli 2019.

Tabel 32. Daerah bebas penyakit hewan

No.	Nama Penyakit	Daerah bebas	Dasar hukum
1.	Rabies	Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 892/Kpts/TN.560/9/1997 tanggal 15 September 1997
		DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat*	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 566/Kpts/PD.640/10/2004 tanggal 6 Oktober 2004
		Kepulauan Bangka Belitung	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4435/kpts/Pd/620/7/2013 tanggal 1 Juli 2013
		Kalimantan Barat*	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 885/Kpts/PD.620/8/2014 tanggal 14 Agustus 2014
		Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015



No.	Nama Penyakit	Daerah bebas	Dasar hukum
		Kepulauan Meranti (Riau)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		Kepulauan Riau	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		P. Weh, Kota Sabang Prov Aceh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/PK.320/5/2016 tanggal 10 Juni 2016
		Pulau Pisang (Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/PK.320/6/2016 tanggal 31 Mei 2016
		Provinsi NTB	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/PK.320/5/2017 tanggal 12 Mei 2017
		Pulau Tarakan, Nunukan dan Sebatik Provinsi Kaltara	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 6 November 2018
		Pulau Tabuan Lampung	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 783/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 12 November 2018
		Pulau makalehi, Buhias, Pahepa, Tagulandang, Ruang, Biaro Kab Kep Sitaro	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/PK.320/M/7/2018 tanggal 1 Juli 2019
		Provinsi Papua	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/PK.320/M/7/2018 tanggal 2 Juli 2019
2.	Avian Influenza	Maluku Utara	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 87/Kpts/PK.320/1/2016 tanggal 29 Januari 2016
		Maluku	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/PK.320/5/2016 Tanggal 31 Mei 2016
		Papua	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 600/Kpts/PK.320/9/2017 tanggal 26 September 2017
3.	Brucellosis	Bali	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/TN.540/7/2002 tanggal 15 Juli 2002
		Pulau Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/TN.540/7/2002 tanggal 15 Juli 2002
		Pulau Sumbawa (Provinsi Nusa Tenggara Barat)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/PO.660/2/2006 tanggal 27 Februari 2006



No.	Nama Penyakit	Daerah bebas	Dasar hukum
		Pulau Kalimantan	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2540/Kpts/PD.610/6/2009 tanggal 15 Juni 2009
		Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2541/Kpts/PD.610/6/2009 tanggal 15 Juni 2009
		Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568/Kpts/PD.620/12/2011 tanggal 31 Desember 2011
		Pulau Sumba (Provinsi Nusa Tenggara Timur)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 52/Kpts/PD.630/1/2015 tanggal 19 Januari 2015
		Pulau Madura (Provinsi Jawa Timur)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		Sumatera Utara	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 86/Kpts/PK.320/1/2016 tanggal 29 Januari 2016
		BBPTU-HPT Baturraden	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.400/4/2018 tanggal 27 April 2018
		Kabupaten Simeulue	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 438/Kpts/PK.320/M/07/2019 tanggal 17 Juli 2019
		Provinsi Banten	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/PK.320/M/07/2019 tanggal 17 Juli 2019
4.	Anthraks	Papua	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/PD.640/7/2003 tanggal 15 Juli 2003
5.	Hog cholera	Sumatera Barat	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 181/Kpts/PD.620/2/2014 tanggal 7 Pebruari 2014
6.	Septicaemia epizootica	P. Nusa Penida, Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/PK.320/3/2017 tanggal 3 Maret 2017

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Sebagai dukungan terhadap peningkatan status kesehatan hewan, Direktorat Kesehatan Hewan telah mengalokasikan anggaran surveillans dalam rangka pengamatan penyakit hewan dan alokasi vaksin dalam rangka pencegahan penyakit hewan. Alokasi pengambilan sampel dan surveillans pada tahun 2019 sebesar 141.637 sampel untuk sampel penyakit Rabies, AI, Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera, Ekstotik, parasiter dan wabah penyakit lainnya dan alokasi vaksin untuk sebesar 3.529.650 untuk penyakit Rabies, AI, Anthrax, Brucellosis, Anthrax



dan Jembrana. Dibandingkan tahun lalu alokasi pengamatan dan identifikasi penyakit hewan sebesar 285.712 sampel sedangkan alokasi pencegahan sebesar 4.517.880 dosis. Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan hasil nilai efisiensi sebesar 150,17% atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel 33. Kegiatan Pendukung IKU V Tahun 2019

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	50.512	48.292	95,6	142.632	264.371	185,35
2	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	64.571	59.933	92,82	3.526.450	3.529.546	100,09
3	Kelembagaan Veteriner	Unit	70.549	64.476	91	381	381	100,00

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2019

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Keberhasilan peningkatan status kesehatan hewan juga disebabkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan kelembagaan veteriner di daerah terpusat di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Puskeswan merupakan pelaksana pelayanan kesehatan hewan di tingkat lapangan yang langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa tindakan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi medik. Fasilitasi dan pengembangan Puskeswan sebagai unit terkecil pelayanan kesehatan hewan terus dilakukan, jumlah pembangunan Puskeswan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dari segi jumlah maupun sebaran wilayah pelayanan baik melalui dana APBN maupun APBD, jumlah Puskeswan saat ini 1.912 unit Puskeswan. Namun demikian, Pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan hewan lingkup kabupaten/kota bertumpu pada Puskeswan dengan tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan hewan dan sarana prasarana penunjangnya.

Sasaran Program 5 (SP5) TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP Ditjen PKH adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Ditjen PKH sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

SP5. IKU6	
Nilai AKIP Ditjen PKH Berdasarkan Penilaian Itjen Kementan	
Target 82 (Nilai)	Realisasi 83,3 (Nilai)
% Capaian 101,59%	

Pengukuran Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) seluruh eselon I Kementerian Pertanian dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Aspek yang dinilai yaitu: Perencanaan (35%), Pengukuran Kinerja (20%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%), Capaian Kinerja (20%).

Tabel 34. Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan

Target dan Realisasi IKSP	2015	2016	2017	2018	2019	% Realisasi thd Target Thn 2019	% Realisasi th 2019 thd 2018	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (Nilai)	-	-	-	81,00	82,0	101,59	101,65	101,59
Realisasi IKSP (Nilai)	74,31	74,69	72,60	81,95	83,3			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Pada tanggal 24 s.d 31 Mei 2019 telah dilakukan Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker Ditjen PKH oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dengan hasil evaluasi memperoleh nilai **83,30** dengan kategori **A** atau berpredikat **Memuaskan**.

Pada tahun 2019, target indikator kinerja utama untuk Nilai AKIP Ditjen PKH sebesar 82, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 101,59%, dengan



kategori “**sangat berhasil**”. Hasil evaluasi terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat dilihat secara rinci pada Tabel 35.

Tabel 35. Hasil Evaluasi AKIP Ditjen PKH Tahun 2013 s.d 2017

No	Aspek yang Dinilai	Nilai Tahun 2013	Nilai Tahun 2014	Nilai Tahun 2015	Nilai Tahun 2016	Nilai Tahun 2017	Nilai Tahun 2018
1	Perencanaan Kinerja (35%)	27,65	24,91	22,84	21,67	24,58	25,17
2	Pengukuran Kinerja (20%)	15,69	14,05	19,38	19,79	19,79	20,21
3	Pelaporan Kinerja (15%)	11,93	12,68	12,46	10,17	13,35	13,89
4	Evaluasi Kinerja (10%)	7,92	7,92	6,25	7,81	8,06	9,25
5	Capaian Kinerja (20%)	14,71	14,75	13,77	12,61	16,17	14,78
TOTAL		77,9 (A)	74,31 (B)	74,69 (BB)	72,60 (BB)	81,95 (A)	83,30 (A)

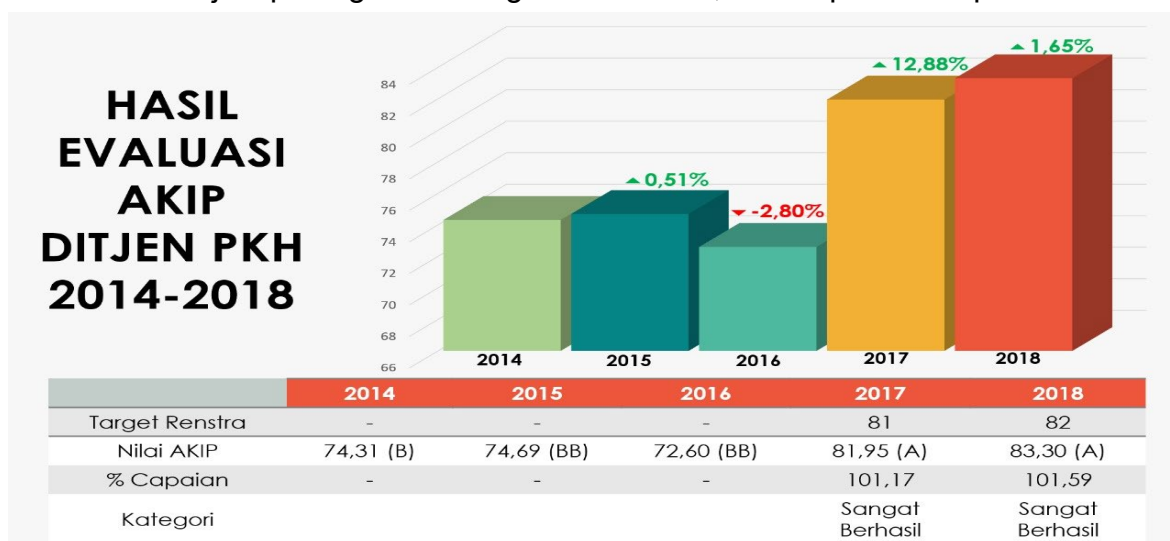
Sumber : Sekretariat Ditjen PKH, 2020

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya:

Kinerja SAKIP Ditjen PKH pada tahun 2019 dilihat berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dimana nilai AKIP Ditjen PKH tahun 2018 sebesar 83,30 dari target sebesar 82. Apabila dibandingkan dengan nilai AKIP tahun 2017 sebesar 81,95 maka terdapat kenaikan sebesar 1,65%. Selama dua tahun berturut-turut dari tahun 2017-2018 nilai SAKIP Ditjen PKH memperoleh nilai dengan kategori sangat berhasil.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah

Kinerja SAKIP Ditjen PKH pada tahun 2019 dilihat berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nilai AKIP Ditjen PKH tahun 2018 sebesar 83,30 dari target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2019 sebesar 82. Secara umum capaian target jangka menengah untuk nilai AKIP dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan dengan rata-rata 3,06% dapat dilihat pada Grafik 12



Grafik 13. Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen PKH Tahun 2014-2018

Sumber : Sekretariat Ditjen PKH

d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Berdasarkan pada Grafik 13 di atas dapat dilihat bahwa Ditjen PKH telah berhasil meningkatkan Nilai AKIP karena telah dilakukan beberapa upaya untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi rekomendasi terhadap Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker Ditjen PKH tahun 2018 sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan pada Perencanaan Kinerja, diantaranya:
 - a. Revisi terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Nomor 4, 9 dan 10, sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
 - b. Melakukan penyelarasan satuan target indikator kinerja kegiatan dalam Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dengan Renstra Kementerian Pertanian.
 - c. Melakukan penyelarasan satuan target indikator kinerja kegiatan dalam RKT (Renja) dengan Renstra.
 - d. Melengkapi rencana aksi dengan menetapkan dokumen data dukung yang harus dipenuhi setiap triwulan dan menetapkan unit kerja pelaksana masing-masing indikator.
2. Memperbaiki Pengukuran Kinerja antara lain:
 - a. Menggunakan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sebagai dasar pemberian reward & punishment.
 - b. Menggunakan hasil pengukuran kinerja atas Rencana Aksi untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
3. Melakukan perbaikan komponen Pelaporan Kinerja dengan menyajikan data perbandingan realisasi kinerja kumulatif sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah untuk seluruh IKU.
4. Melakukan perbaikan komponen Evaluasi Internal, antara lain:
 - a. Mendokumentasikan perbaikan pada setiap periode yang merupakan hasil evaluasi rencana aksi.
 - b. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang dalam bentuk langkah-langkah nyata perencanaan dan pelaksanaan program.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Sebagai dukungan terhadap terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Ditjen PKH, Sekretariat Ditjen PKH telah mengalokasikan anggaran dalam rangka Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan hasil nilai efisiensi sebesar 87,11% atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya.



Tabel 36. Kegiatan Pendukung IKU VI Tahun 2019

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	86.376	74.288	86,01	1	1	100

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2019

f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen PKH untuk menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP yaitu: (1) Pada Laporan Kinerja 2018 sudah menyajikan data perbandingan realisasi kinerja kumulatif sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah untuk seluruh IKU; (2) Pada penyusunan LAKIN 2018 sudah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan PMK 214 tahun 2017; (3) Perbaikan pada setiap periode yang merupakan hasil evaluasi rencana aksi telah terdokumentasikan; (4) Hasil evaluasi telah dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, seperti adanya perbaikan Indikator Kinerja Kegiatan pada 15 Output yang awalnya tidak memiliki Indikator dan Target di beberapa Satker. Perbaikan tersebut telah disetujui oleh Bappenas diaplikasi KRISNA dan disetujui oleh DJA melalui SatuDJA. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH yang menjadi salah satu IKU Ditjen PKH; (5) Indikator Kinerja Sasaran Program nomor 4 yaitu “Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak)”; nomor 9 yaitu “Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia”; dan nomor 10 yaitu “Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia” merupakan indikator dari cascading yang diadopsi langsung dari indikator Kementerian Pertanian sehingga tidak dapat direvisi pada RENSTRA 2015-2019, namun telah ditindaklanjuti untuk direvisi pada RENSTRA Ditjen PKH Tahun 2020-2024.



SP5. IKU7	
Nilai Kinerja Ditjen PKH (Berdasarkan PMK 249/2011)	
Target 85 (Nilai)	Realisasi 87,82 (Nilai)
% Capaian 103,32%	

Untuk mengukur efisiensi dan manfaat penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing-masing instansi pemerintah, maka pada tahun 2011 Kementerian Keuangan telah membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Penganggaran Kementerian Keuangan yang diamanatkan PMK 249 untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi agar lebih efektif dan efisien. Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran berbasis web yang pada tahun 2015 berubah nama menjadi Aplikasi SMART (Sistem Monitoring Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan diharapkan mampu menggantikan proses monev sebelum PMK 249 yang masih dilakukan secara manual menjadi *user friendly*, *paper less*, *real time*, dan akurat. Dengan ditetapkannya PMK 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L pada tanggal 29 Desember 2017 sebagai pengganti PMK 249/PMK.02/2011, maka aplikasi SMART Kementerian Keuangan perlu melakukan penyesuaian dan pengembangan yang cukup signifikan.

Target Nilai Kinerja (NK) sesuai dengan PMK 214/2017 untuk tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir RPJMN adalah sebesar 85. Indikator yang dinilai pada tahun 2019 ada enam yaitu: Capaian Keluaran Program, Penyerapan Anggaran, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, Efisiensi, Capaian Sasaran Program, dan Rata-rata Nilai Satker. Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 214/2017). Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 214/2017) untuk tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 214/2017)

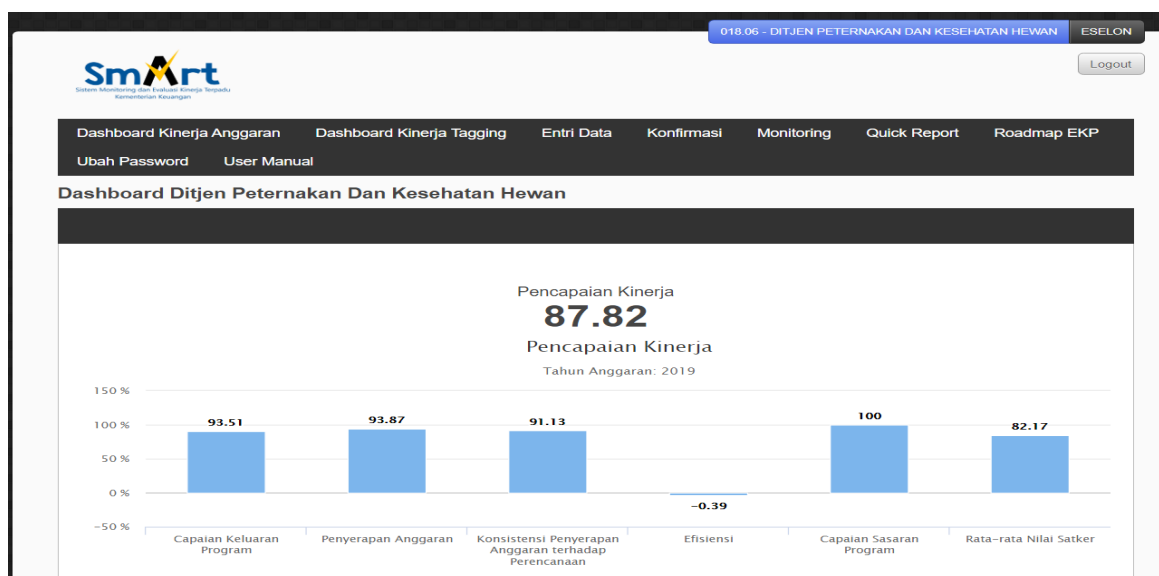
Target dan Realisasi IKSP	2015	2016	2017	2018	2019	% Realisasi thd Target Thn 2019	% Realisasi th 2019 thd 2018	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (Nilai)	-	-	-	80,00	85,0	103,32	148,90	103,32
Realisasi IKSP (Nilai)	64,08	71,36	89,56	58,98	87,8			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Realisasi capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan yang dipantau melalui aplikasi SMART per tanggal 07 Februari 2020 adalah sebesar 87,82% atau mencapai 103,32% dari target yang ditetapkan dengan kategori nilai "**Sangat Berhasil**". Adapun rincian realisasi indikator capaian yang dinilai sebagai berikut:



1. Capaian sasaran program dengan nilai sebesar 100%
2. Capaian keluaran program dengan nilai sebesar 93,51%
3. Capaian Penyerapan anggaran dengan nilai sebesar 93,87%
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan nilai sebesar 91,13%.
5. Efisiensi -0,39 (dengan range nilai batas maksimal 20% dan batas minimal -20%). Apabila ditransformasi ke nilai 100%, maka diperoleh Nilai Efisiensi **48%**.
6. Rata-rata Nilai Kinerja Satker 82,17% (23 Satker dengan nilai “sangat baik”; 16 satker dengan nilai “baik”; 7 satker dengan nilai “cukup”; 3 Satker dengan nilai “kurang” dan 8 satker dengan nilai “sangat kurang”)



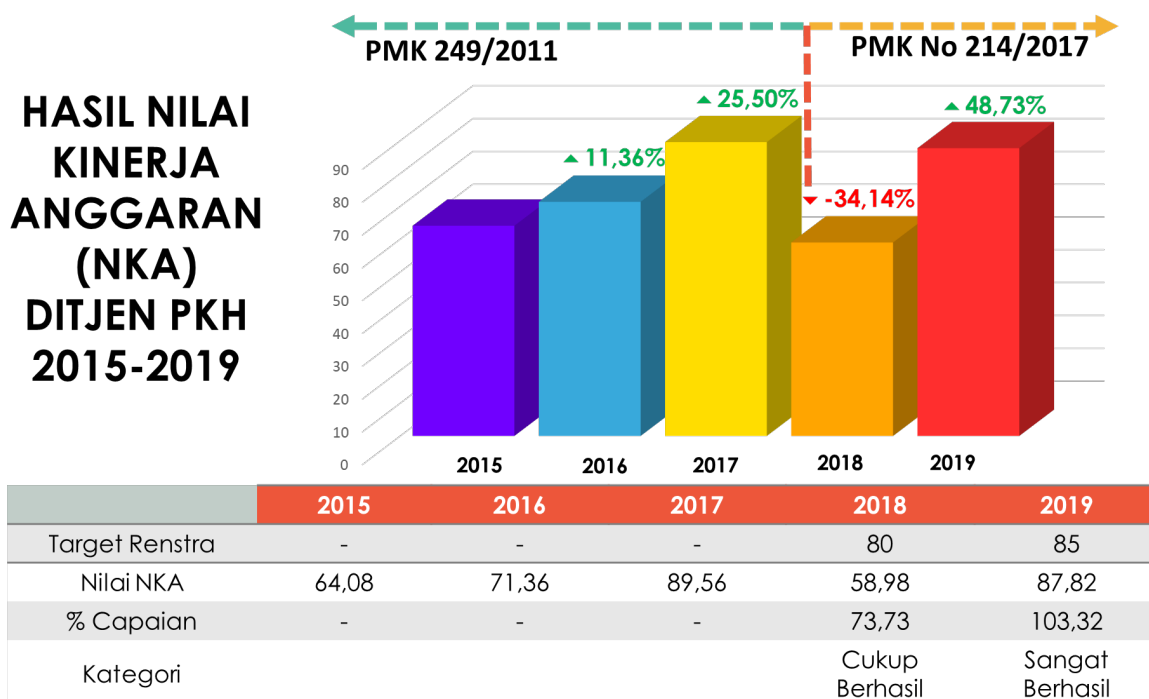
Gambar 8. Dashboard Nilai Kinerja (NK) Ditjen PKH Per 7 Februari 2020

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya:

Capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH pada tahun 2019 sebesar 87,82% atau naik 46,62% apabila dibandingkan dengan NK tahun 2018 yang hanya sebesar 58,98%. Pada tahun 2019 petugas Monev masing-masing Satker lingkup Ditjen PKH sudah mulai adaptasi dengan aplikasi SMART yang baru yang mengacu PMK 214/2017. Pada tahun 2018 merupakan awal mulainya adanya perubahan sistem pada aplikasi SMART yang semula menggunakan aplikasi berdasarkan PMK 249/2011 menjadi PMK 214/2017. Perubahan ini tentunya memerlukan penyesuaian bagi petugas Monev baik dalam pengentri-an maupun evaluasi dan analisis masing-masing komponen pencapaiannya. Selain itu juga pada tahun 2018 terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) di pertengahan tahun, namun perubahan output tersebut tidak disertai dengan perubahan output di aplikasi SMART, sehingga berpengaruh dalam pencapaian output keluaran kegiatan di masing-masing satker yang berdampak terhadap rendahnya Rata-Rata Nilai Kinerja Satker Ditjen PKH.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah

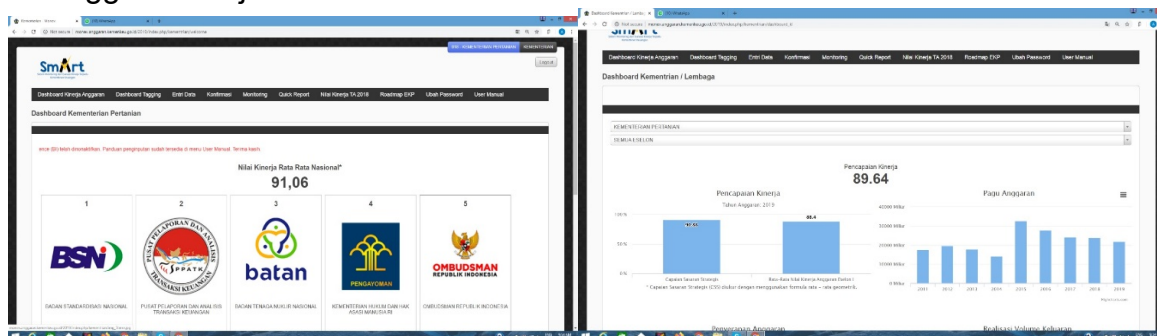
Nilai Kinerja (NK) Anggaran mulai masuk dalam target Renstra Ditjen PKH Revisi III. Penambahan target Indikator ini ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PKH karena adanya penyusunan Cascading Indikator Kinerja Ditjen PKH yang baru menyesuaikan dengan Indikator Kementerian Pertanian. Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH tahun 2019 sebesar 87,82% atau melebihi target jangka menengah (Renstra Revisi III tahun 2015-2019) yaitu mencapai 103,32% dari target 85%.



Grafik 14. Nilai Kinerja (NK) Ditjen PKH Tahun 2015-2019

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Nilai Kinerja Anggaran rata-rata Nasional mencapai 91,06% dan Nilai kinerja Anggaran Kementerian Pertanian mencapai sebesar 89,64%, sedangkan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH hanya sebesar 87,82% per tanggal 7 Februari 2019, sehingga NK Ditjen PKH masih dibawah nilai rata-rata Kementan dan nasional.



Nilai Kinerja Anggaran rata-rata Nasional

Nilai kinerja Anggaran Kementan



e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya :

1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang menangani monitoring dan evaluasi (Monev) masing-masing Satker karena telah dilakukan (tiga) kali Workshop dan pendampingan.
2. Peran aktif dari Tim Monev masing-masing satker yang meningkat dalam melakukan penginputan data capaian keluaran program/kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian Rata-rata Nilai Kinerja Satker sebesar 82,17%. Yang naik apabila dibandingkan dengan capaian Rata-rata Nilai Kinerja Satker yang hanya mencapai sebesar 14,64%.
3. Koordinasi yang intensif antara petugas Monev pusat dengan Petugas Monev unit kerja UPT dan Satker dinas Provinsi, baik melalui komunikasi WA group maupun kunjungan langsung ke Satker untuk melakukan bimbingan teknis jika ada yang mengalami kendala.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH adalah

1. Beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi salah satu sasaran program Ditjen PKH tahun 2019 belum tercapai 100%, diantaranya:
 - a. Target Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak. Hal ini karena beberapa komoditas yang ditetapkan dalam manual indikator perhitungan yang seharusnya mengalami penurunan impor justru mengalami peningkatan impor. Komoditas tersebut yaitu sosis dan produk sejenis (50,80%), jeroan lembu (38,74%), daging lembu (22,70%), sapi hidup (9%), susu dan kepala susu (15,48%).
 - b. Produksi daging sapi dan kerbau. Produksi daging sapi/kerbau hanya terealisasi sebesar 68,13% dari target yang telah ditetapkan. Produksi daging sapi pada tahun 2019 mengalami penurunan atau (-2,39%) bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Capaian kinerja makro pada indikator Tenaga Kerja Subsektor Peternakan, mengalami penurunan pada tahun 2019. Namun kenaikan tersebut perlu memperhatikan sebaran tenaga kerja, sehingga tidak terjadi data yang bias.
3. Capaian output strategis Ditjen PKH tahun 2019 secara umum telah tercapai. Namun pada output Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak yang diimplementasikan melalui program #BEKERJA terkendala sejumlah penerima bantuan meninggal, pindah atau mengundurkan diri.
4. Kinerja SIWAB periode 2015-2019 mengalami peningkatan jumlah populasi sapi/kerbau, tetapi belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka importasi daging.
5. Pada aspek kesehatan hewan, perlu mendapat perhatian beberapa hal diantaranya: terkait manajemen risiko terutama, ketika terjadi wabah penyakit, keterlambatan pendeklarasian status kesehatan hewan di OIE, jejaring



penanganan outbreak dan kompartemen penyakit hewan yang dapat mendukung kinerja ekspor komoditas peternakan.

Rekomendasi untuk perbaikan target output Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke depan yaitu:

- a. Satuan capaian *output* Layanan Dukungan Manajemen hendaknya menggunakan satuan Laporan jika dalam satu tahun anggaran menghendaki target *output* 1 (satu) atau dapat menggunakan satuan Layanan jika dalam satu tahun anggaran menghendaki target *output* 12 (dua belas). Langkah tersebut dilakukan agar tercapai keselarasan antara capaian *output* dengan realisasi anggaran.
- b. Untuk kegiatan BEKERJA disarankan untuk tidak dilanjutkan karena belum menunjukkan dampak yang signifikan, sehingga diharapkan alokasi anggaran BEKERJA dapat dialokasikan untuk pemberian insentif bagi pelaksanaan kegiatan prioritas lainnya.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Sebagai dukungan terhadap terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Ditjen PKH, Sekretariat Ditjen PKH telah mengalokasikan anggaran dalam rangka Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan hasil nilai efisiensi sebesar 87,11% atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel 38. Kegiatan Pendukung IKU VII Tahun 2019

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	86.376	74.288	86,01	1	1	100

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2019

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH pada tahun 2019 melebihi dari target yang telah ditetapkan karena adanya penguatan dalam tata kelola anggaran juga merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam mengembangkan proses dan layanan kerja yang pada akhirnya memberikan hasil yang lebih baik.

Selain itu, Ditjen PKH berupaya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja anggaran melalui pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun. Pertemuan Monev tersebut menghadirkan peserta Tim Monev dari masing-masing Satker baik dari pusat maupun dari Unit Pelaksana Teknis dan Provinsi yang disii dengan bimbingan teknis penginputan data, juga



sekaligus dilakukan workshop pengeitrian data, serta diskusi untuk penyelesaian masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Ditjen PKH.

Tingginya peningkatan capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 merupakan hasil sinergi seluruh Satker lingkup Ditjen PKH, yang dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, proses, metode kerja, sistem pengendalian, dan koordinasi yang didasari oleh kerja professional, mengikuti aturan serta integritas dan komitmen diri yang kuat.

Capaian sasaran program diperoleh nilai sebesar 100%. Hal ini karena realisasi capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Ditjen PKH banyak yang melebihi 100% dari target, diantaranya: a) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak (314,6%); b) Penurunan volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak (141,67%); c) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak (115,33%); d) Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan (101,59%); d) Nilai Kinerja Ditjen PKH berdasarkan PMK 214/2017 (103,32%); e) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH (103,03%); f) Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (103,94%); Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia (144,44%).

Capaian keluaran program diperoleh dengan nilai sebesar 93,51%. Hal ini karena beberapa capaian keluaran program Ditjen PKH melebihi target seperti: Peningkatan Produksi Telur; Peningkatan Produksi Daging Ternak Lainnya; Ternak yang bersertifikat/SKLB; Volume ekspor komoditi peternakan; dan Investasi subsektor peternakan PMDN

Capaian Penyerapan anggaran sebesar 93,87% karena adanya koordinasi yang intensif antara satker pusat dan satker daerah dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan diperoleh nilai sebesar 91,13%. Terdapat konsistensi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) awal dengan RPD akhir.

Sasaran Program 6 (SP6)

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PUBLIK DITJEN PKH

Kualitas layanan publik instansi pemerintah diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 dimaksudkan agar setiap Unit



Pelayanan Instansi Pemerintah menyusun IKM. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan instansi pemerintahan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada Tahun 2019, Ditjen PKH menargetkan nilai IKM sebesar 3,30 skala likert.

SP6. IKU8	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH	
Target 3,30 (Skala Likert)	Realisasi 3,40 (Skala Likert)
% Capaian 103,03%	

Metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen PKH mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat diawali dengan penyebaran kuesioner ke Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen PKH. Kuesioner ini digunakan sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Sebagai pedoman penilaian telah ditetapkan Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 39. Nilai Persepsi, Interval IKM, Konversi IKM, Mutu dan Kinerja Pelayanan Semester I

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 40. Nilai Persepsi, Interval IKM, Konversi IKM, Mutu dan Kinerja Pelayanan Semester II

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,065 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,533 – 4,00	88,31 - 100.00	A	Sangat Baik

Secara rinci, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Ditjen PKH Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel 41.



Tabel 41. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH

Target dan Realisasi IKSP	2015	2016	2017	2018	2019	% Realisasi thd Target Thn 2019	% Realisasi th 2019 thd 2018	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (Skala Likert)	-	-	-	3,20	3,3	103,03	101,80	103,03
Realisasi IKSP (Skala Likert)	3,27	3,30	3,36	3,34	3,40			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Capaian nilai IKM tahun 2019 adalah 3,40 atau 103,03% dengan kategori **Sangat Berhasil** dari target 2019 sebesar 3,30 yang merupakan target jangka menengah sesuai Renstra. Perhitungan Nilai IKM 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel 42.

Tabel 42. Perhitungan Nilai IKM

No	Unit Kerja	Nilai IKM Semester 1	Nilai IKM Semester 2
1	Subbag Layanan Rekomendasi	3,28	3,40
2	PUSVETMA Surabaya	3,25	3,42
3	BBPMSOH Gunung Sindur	3,30	3,78
4	BBVET Wates	3,04	3,26
5	BBVET Maros	3,09	3,30
6	BBVET Denpasar	3,66	3,19
7	BBPTU-HPT Baturraden	3,63	3,37
8	BBIB Singosari	3,68	3,73
9	BIB Lembang	3,29	3,30
10	BET Cipelang	3,19	3,42
11	BPMSPH Bogor	3,17	3,55
12	BPMSB Bekasi	3,67	3,69
13	B-Vet Medan	3,34	3,39
14	B-Vet Bukittinggi	3,29	3,47
15	B-Vet Lampung	3,20	3,73
16	B-Vet Banjarbaru	3,28	3,22
17	BPTU-HPT Indrapuri	3,13	3,23
18	BPTU-HPT Siborongborong	3,36	3,39
19	BPTU-HPT Padang Mangatas	3,35	3,54
20	BPTU-HPT Sembawa	3,57	3,50
21	BPTU-HPT Pelaihari	3,38	3,37
22	BPTU-HPT Denpasar	3,36	3,29
23	B-Vet Subang	3,16	3,21
	∑ Nilai / Unsur	77.00	78.23
	NRR Unsur	3.36	3.40

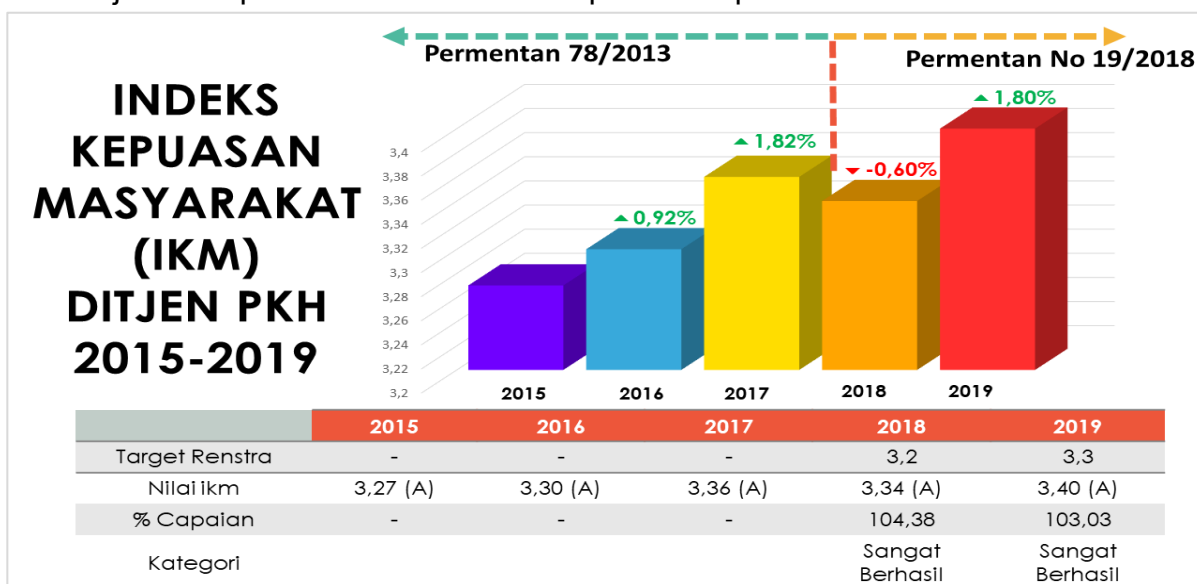


b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya:

Capaian kinerja tahun 2019 atau 103,03% dengan kategori **Sangat Berhasil**, apabila dibandingkan dengan capaian 2018 sebesar 3,34 mengalami peningkatan sebesar 1,80%. Unit Pelayanan Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai tahun 2018 sudah menerapkan IKM *online* melalui portal website masing-masing unit kerja, yang lebih memudahkan para pengguna layanan untuk mengakses IKM secara *realtime* dan dimanapun. Peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan pada unsur-unsur yang mempunyai nilai dibawah rata-rata mutu pelayanan walaupun nilai yang dicapai telah masuk dalam kategori penilaian baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2019 sangat berhasil mencapai sebesar 103,03% dari target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2019. Nilai IKM Ditjen PKH dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terus meningkat. Secara rinci perkembangan nilai IKM Ditjen PKH pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 14.



Grafik 15. Perkembangan Nilai IKM Ditjen PKH Tahun 2015-2019

Beberapa unsur pelayanan yang dinilai dari masing-masing unit kerja untuk mengetahui kualitas pelayanannya yaitu: (1) persyaratan pelayanan; (2) prosedur pelayanan; (3) waktu pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk layanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan, saran dan keluhan; (9) Sarana dan prasarana yang secara rinci dijabarkan pada Tabel 43.

Tabel 43. Nilai Unsur Pelayanan Ditjen PKH

No	UNSUR PELAYANAN	PERIODE I		PERIODE II	
		NRR Unsur	∑ Nilai	NRR Unsur	∑ Nilai
1	Persyaratan Pelayanan	3,34	77,29	3,39	77,57
2	Prosedur Pelayanan	3,32	76,86	3,37	76,87
3	Waktu Pelayanan	3,29	76,03	3,27	75,26
4	Biaya/tarif	3,36	77,94	3,41	77,78
5	Produk Layanan	3,39	77,96	3,38	77,32
6	Kompetensi Pelaksana	3,41	78,54	3,36	76,91
7	Perilaku Pelaksana	3,35	76,99	3,39	77,41
8	Penanganan pengaduan, saran, dan keluhan	3,34	77,32	3,43	78,35
9	Sarana dan Prasarana	3,37	77,96	3,49	79,98

d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Keberhasilan peningkatan nilai IKM Ditjen PKH disebabkan saat ini semua unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib menyusun indeks kepuasan masyarakat secara periodik di lingkungan masing-masing dalam upaya peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Sebagai dukungan terhadap meningkatnya kualitas layanan publik Ditjen PKH, Sekretariat Ditjen PKH telah mengalokasikan anggaran dalam rangka penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Ditjen PKH. Berdasarkan analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, nilai efisiensi yang didapatkan adalah sebesar 56,12% atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel 44. Kegiatan Pendukung IKU VIII Tahun 2019

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	59.697	58.472	98	1	1	100,00
2	Layanan Perkantoran	Layanan	210.691	205.299	97	1	1	100,00

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2019



f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Semua usaha peningkatan kualitas pelayanan publik tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh dua syarat utama, yaitu komitmen para pimpinan atau pejabat pelayanan publik di bidang pertanian dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kemajuan teknologi.

Nilai Unsur IKM yang belum optimal pada tahun 2019 yaitu pada unsur pelayanan waktu penyelesaian. Rencana tindak lanjut pada 2020 untuk meningkatkan nilai unsur tersebut diantaranya: (1) Pelayanan Ditjen PKH yang sudah *online* diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih transparan, efisien akuntabel, dan adil agar tidak ada lagi interaksi langsung antara pemohon dan petugas; (2) Meningkatkan kecepatan waktu pelayanan masing-masing komoditas; (3) Menyempurnakan aplikasi/Website untuk pemberitahuan rekomendasi yang sudah selesai; (4) Meningkatkan prasarana dan sarana terkait pelayanan terhadap masyarakat.

Sasaran Program 7 (SP7) TERKENDALINYA KASUS ZONOSIS PADA MANUSIA

Pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit dan infeksi yang secara alami dapat ditularkan dari hewan-hewan vertebrata ke manusia dan atau sebaliknya. (zoonosis) serta penyakit yang ditularkan melalui pangan (*Foodborne diseases*), dalam hal ini pangan yang berasal dari hewan sangat penting karena menyangkut kesehatan manusia. Sehubungan dengan upaya pencegahan dan pengendalian zoonosis, melalui KPTS 237/KPTS/PK.400/M/3/2019 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas telah ditetapkan Penyakit Zoonosis yang diprioritaskan pengendaliannya bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait yang merupakan Revisi dari KPTS 4971/KPTS/OT.140/12/2013. Dalam Keputusan Menteri Pertanian ini ditetapkan 3 penyakit prioritas pertama yang dilakukan penanggulangannya secara bersama-sama yaitu *Avian Influenza*, *Rabies* dan *Anthrax* dari 15 jenis penyakit zoonosis prioritas dengan pertimbangan alokasi sumberdaya yang tersedia.

SP7. IKU9	
Jumlah Kasus Zoonosis Yang Terjadi Penularan Kepada Manusia	
Target 127 Kasus	Realisasi 122 Kasus
% Capaian 103,94%	

Pada tahun 2019, Ditjen PKH menetapkan target indikator program untuk jumlah kasus zoonosis yang terjadi pada penularan kepada manusia sebanyak 127 kasus.



Formula/cara menghitungnya, yaitu dengan menghitung jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia berdasarkan jumlah laporan yang masuk. Cara mengambil data yaitu: menghitung jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia berdasarkan laporan yang masuk. Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia dapat dilihat pada Tabel 45.

Tabel 45. Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia

Target dan Realisasi IKSP	2015	2016	2017	2018	2019	% Realisasi thd Target Thn 2019	% Realisasi th 2019 thd 2018	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (Jumlah)	-	-	-	132	127	103,94	90,09	103,94
Realisasi IKSP (Jumlah)	123	143	128	111	122			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Realisasi pengendalian kasus zoonosis pada tahun 2019 sebanyak 122 kasus dari target 127 kasus atau 103,94%. Tahun 2019, kasus Lyssa tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, NTT, NTB dan Sumatera Utara. Provinsi tertular baru yaitu Nusa Tenggara Barat. Penurunan kasus signifikan (tidak ada kasus > 2 tahun) yaitu Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Aceh, dan Maluku Utara. Kasus Anthraks pada tahun 2019 sebanyak 15 kasus, terjadi di Provinsi Gorontalo (3 kasus), Provinsi DIY (3 kasus), Provinsi Sulawesi Selatan (7 kasus), dan Provinsi NTT (2 kasus). Tidak ada laporan manusia yang meninggal akibat anthrax. Kabupaten baru yang tertular adalah Gunung Kidul, Provinsi DIY. Anthrax terjadi pada Bulan Mei 2019.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya:

Dibandingkan tahun 2018 (111 kasus) jumlah kasus pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 11 kasus atau 9,90%. Jumlah kasus rabies tahun 2019 sama dengan tahun 2018, namun ada peningkatan dan penurunan jumlah kasus rabies di beberapa provinsi. Jumlah kasus rabies yang mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Gorontalo, sedangkan yang mengalami peningkatan kasus pada tahun 2019 yaitu provinsi NTT. Dinamika perkembangan kasus rabies pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebagaimana tabel 46 berikut.

Tabel 46. Jumlah Kasus Lyssa tahun 2018-2019

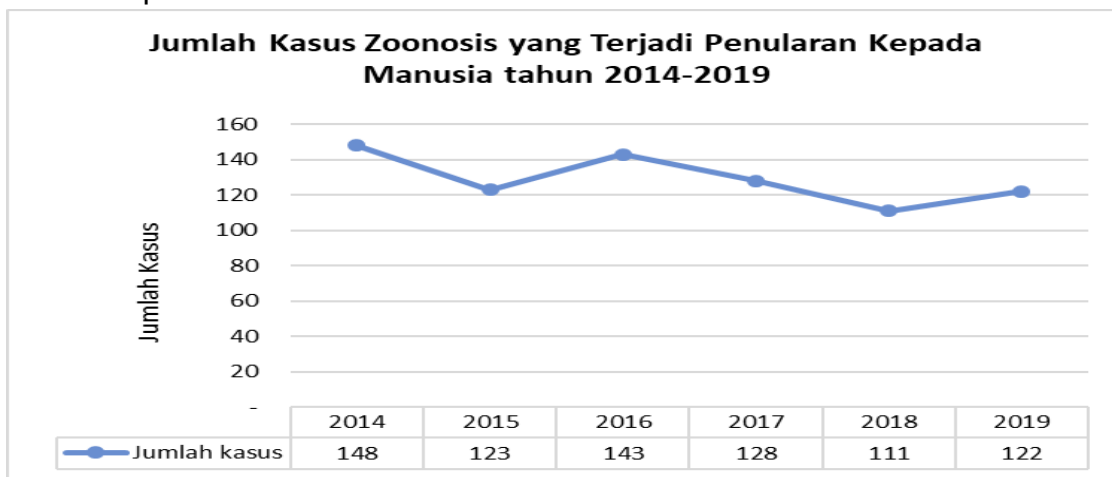
No	Provinsi	Lyssa Total	
		2018	2019
1	Aceh	0	0
2	Riau	0	1
3	Jambi	0	8
4	Bengkulu	1	0
5	Sumatera Utara	7	11
6	Sumatera Barat	2	0
7	Sumatera Selatan	1	0
8	Lampung	5	0
9	Banten	0	0
10	Jawa Tengah	0	0

No	Provinsi	Lyssa Total	
		2018	2019
11	Jawa Barat	0	0
12	Bali	4	4
13	NTT	12	14
14	Sulawesi Barat	0	1
15	Sulawesi Utara	16	15
16	Sulawesi Tengah	5	8
17	Sulawesi Selatan	15	12
18	Sulawesi Tenggara	5	1
19	Gorontalo	6	3
20	Kalimantan Tengah	0	0
21	Kalimantan Barat	25	14
22	Kalimantan Utara	0	0
23	DKI JAKARTA	0	0
24	Kalimantan Selatan	1	0
25	Maluku Utara	0	0
26	Maluku	2	2
27	NTB	0	13
28	DIY	0	0
29	Kalimantan Timur	0	0
Jumlah		107	107

Dibandingkan tahun 2018 (4 kasus) jumlah kasus pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 11 kasus atau 275%. Pada tahun 2019 tidak ada laporan kasus AI pada manusia.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2019 sangat berhasil mencapai sebesar 103,94% dari target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2019. Jumlah kasus rabies yang dilaporkan pada tahun 2014 sebesar 98 kasus mengalami kenaikan sebesar 20,41% pada tahun 2015, sedangkan tahun 2016 sampai 2017 menurun sekitar 13% sampai 22%, dan kembali mengalami kenaikan sebesar 35,44% pada tahun 2018 serta pada tahun 2019 sebesar 275%.



Grafik 16. Jumlah kasus Zoonosis (Rabies, AI, Antraks) Tahun 2014-2019

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Realisasi capaian Kinerja tahun 2019 sebesar 103,94% masuk kategori **berhasil** dan mencapai standar nasional Kementerian Pertanian. Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan pencegahan dan pengendalian zoonosis adalah menurunnya kasus zoonosis, khususnya penyakit AI, Rabies dan Anthrax. Adapun jumlah kasus penularan zoonosis dari hewan ke manusia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 47 berikut.

Tabel 47. Data Kasus Zoonosis Tahun 2014-2019

Kasus	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rabies	98	118	91	79	107	107
AI	2	2	0	2	0	0
Anthrax	48	3	52	47	4	15
Jumlah	148	123	143	128	111	122

Sumber : Direktorat Kesmavet, diolah 2019

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Sebagai dukungan terhadap terkendalinya kasus zoonosis pada manusia, Direktorat Kesmavet telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH. Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan hasil nilai efisiensi sebesar 192,28% atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel 48. Kegiatan Pendukung IKU IX Tahun 2019

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	13.757	11.865	86,25	135	191	141,48

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2019

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Strategi Pencegahan Penularan Zoonosis dilakukan melalui koordinasi antar kelembagaan terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan



penularan zoonosis. Ditjen PKH memperkuat strategi ini melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia dilakukan melalui kegiatan komunikasi risiko dengan memberikan pemahaman akan pentingnya pengendalian zoonosis kepada pemegang kebijakan di daerah dan *stakeholder* terkait serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun penguatan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli zoonosis.
2. Pencegahan penularan zoonosis dari produk hewan ke manusia dilakukan melalui penerapan strategi penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui pemeriksaan ante mortem dan post mortem di Rumah Potong Hewan. Selain itu pemeriksaan antemortem dan post mortem juga memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari kegiatan surveilans pengendalian penyakit hewan, khususnya zoonosis.

Faktor risiko yang berperan dalam mendukung dan munculnya penyakit rabies diantaranya: 1) Cakupan vaksinasi yang masih rendah, vaksinasi anjing secara massal dan serentak merupakan kebijakan yang dipakai dalam pengendalian rabies di Indonesia, namun diperlemah oleh adanya tantangan *turn-over* populasi, kepemilikan anjing yang tidak bertanggung jawab seperti menolak pemberian vaksinasi pada anjing, membuang anak anjing atau anjing dewasa karena tidak ingin memeliharanya akan mengakibatkan menurunnya cakupan vaksinasi; 2) Kondisi geografis di beberapa wilayah Indonesia yang sulit dijangkau, mengakibatkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai rabies serta cakupan vaksinasi menjadi rendah, karena itu penyampaian KIE pada desa-desa target, dengan akses yang sulit dijangkau serta vaksinasi di desa tersebut akan meningkatkan cakupan vaksinasi; 3) Tingginya lalu-lintas HPR dari pulau tertular ke pulau bebas rabies, jumlah pelabuhan informal yang semakin banyak serta tidak adanya pos karantina hewan disepanjang garis pantai mengakibatkan semakin tingginya probabilitas introduksi rabies ke pulau bebas rabies; 4) Banyaknya anjing yang tidak berpemilik/liar sehingga menyulitkan pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Perlu dipertimbangkan adanya kebijakan khusus terkait pengendalian rabies pada anjing tak berpemilik; dan 5) Tidak adanya data populasi anjing yang valid sehingga menyulitkan penganggaran program vaksinasi rabies.

Adapun faktor risiko yang memungkinkan kejadian kasus anthrax diantaranya faktor musim (terjadi pada musim hujan), sistem pemeliharaan ternak yang dilepas, ketidaktahuan masyarakat tentang anthrax, masih melakukan pemotongan terhadap ternak yang terinfeksi anthrax. Perlu adanya peningkatan pemahaman kepada masyarakat melalui KIE tentang bahaya anthrax dalam rangka mencegah penularan anthrax dari hewan kepada manusia.

Insiden kasus HPAI H5N1 terjadi secara musiman, mekanisme munculnya HPAI secara musiman terkait beberapa aspek diantaranya cuaca, lalu-lintas unggas yang



dipengaruhi permintaan dan penawaran, beberapa kajian mengidentifikasi bahwa pasar unggas hidup berperan dalam keberadaan virus HPAI H5N1, maka perlu dilakukan surveilans berbasis risiko dan intervensi pengendalian guna menurunkan prevalensi HPAI, paparan pada manusia dan munculnya virus AI varian baru.

Sasaran Program 8 (SP8) **TERJADINYA KEAMANAN PANGAN STRATEGIS** **NASIONAL**

Pangan asal hewan berupa daging, telur, dan susu merupakan protein hewani yang mengandung asam amino esensial yang tidak dapat diganti dengan protein nabati atau protein sintetis lainnya, sehingga sangat bermanfaat bagi pertumbuhan, kesehatan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable food*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan.

Salah satu indikator dari pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan produk hewan, terutama pangan segar asal hewan adalah jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia. Melalui kegiatan pengawasan ini diharapkan kasus penyimpangan produk hewan yang berpotensi merugikan masyarakat/konsumen dapat berkurang serta dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait/berwenang.

SP8. IKU10	
Jumlah Kasus Pangan Segar Hewani Asal Ternak Nasional Yang Membahayakan Kesehatan Manusia	
Target 18 Kasus	Realisasi 10 Kasus
% Capaian 144,44%	

Cara menghitung: mengumpulkan pemberitaan di media massa cetak dan/atau elektronik nasional pada tahun berjalan terkait kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia.

Cara mengambil data yaitu:

1. Kumpulkan pemberitaan di media massa cetak dan/atau elektronik nasional pada tahun berjalan terkait Kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia.



2. Hitung jumlah total Kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia berdasarkan pemberitaan media massa/elektronik tersebut.

Tabel 49. Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia

Target dan Realisasi IKSP	2015	2016	2017	2018	2019	% Realisasi thd Target Thn 2019	% Realisasi th 2019 thd 2018	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (Jumlah)	-	-	-	20	18	144,44	137,50	144,44
Realisasi IKSP (Jumlah)	-	-	18	16	10			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Berdasarkan hasil inventarisir kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia tercatat 10 kasus yang terjadi pada tahun 2019. Jumlah kasus ini dibawah dari estimasi jumlah kasus yang diperkirakan sebelumnya (target) sebanyak 18 kasus sehingga capaian indikator program ini mencapai 144,44% atau masuk dalam kategori **sangat berhasil**.

Tabel 50. Kasus-kasus Penyimpangan Pangan Segar Hewani Asal Ternak

No	Waktu Kejadian	Lokasi Kejadian	Informasi Kasus
1	Januari 2019	Kota Padang, Sumatera Barat	Kasus Sate Padang menggunakan daging babi hutan (celeng)
2	Januari 2019	Kota Ambon, Maluku	Penjualan produk daging ayam yang dikemas ulang oleh pelaku usaha
3	Januari 2019	Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta	Kasus penjualan daging oplosan (daging sapi dan daging babi)
4	Mei 2019	Kota Magelang, Jawa Tengah	Penjualan daging sapi gelongongan
5	Juli 2019	Kab. Malang, Jawa Timur	Gudang penyimpanan daging impor yang tidak memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi (tidak ber-NKV)
6	Juli 2019	Kota Metro, Lampung	Kasus penjualan daging oplosan (daging sapi dan daging babi) secara online
7	Oktober 2019	Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur	Keracunan makanan daging bangkai sapi (60 orang)
8	November 2019	Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Penjualan ayam tiren
9	November 2019	Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Kasus Telur Ayam Kampung mengandung cemaran Dioksin
10	Desember 2019	Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur	Keracunan makanan daging bangkai kambing (11 orang)

Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2019



b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya:

Jika dibandingkan dengan data kejadian di tahun 2018 sebanyak 16 kasus, jumlah kasus tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 6 kasus atau sebesar 37,5%. Faktor pendukung terjadinya penurunan kasus tersebut adalah adanya kegiatan pembinaan rutin dalam rangka mencegah kejadian penyimpangan di lapangan dan adanya tindak lanjut oleh otoritas berwenang pada setiap kasus baik dari hasil laporan maupun temuan saat kegiatan inspeksi di lapangan.

Tabel 51. Data Kasus Pangan Segar Hewani Asal Ternak Nasional

Kasus	Tahun		
	2017	2018	2019
Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia	18	16	10

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah

Berdasarkan data kejadian/kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia tahun 2017 sd 2019, terlihat adanya penurunan kasus pangan segar hewani asal ternak yang dilaporkan secara nasional. Pada tahun 2017 dilaporkan sebanyak 18 kasus, mengalami penurunan menjadi 16 kasus pada tahun 2018 hingga mencapai 10 kasus pada tahun 2019.

d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Mengacu pada ketentuan perundangan-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tanggung jawab dalam Penjaminan Produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Upaya tersebut dilaksanakan melalui serangkaian upaya dimulai dari pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan.

Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan, dan guna mendorong pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan yang diproduksi, dimasukkan dari dan/atau dikeluarkan ke luar negeri, dan yang diedarkan di dalam negeri, perlu dilakukan pengawasan terhadap unit usaha produk hewan dan pengawasan peredaran produk hewan. Produk hewan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memenuhi persyaratan teknis Kesmavet dan diproduksi di unit usaha asal hewan yang menerapkan sistem penjaminan keamanan pangan serta dibuktikan dengan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat/konsumen yang mengkonsumsi produk



hewan maka pelaksanaan pengawasan menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia didapatkan hasil nilai efisiensi sebesar 139,55% (disampaikan pada Lampiran 8). Maka dari itu kegiatan ini dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel 52. Kegiatan Pendukung IKU X Tahun 2019

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Sampel	22.147	20.152	90,99	25.821	30.745	119,07

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2019

f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam pemerintahan daerah telah dilakukan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten-kota). Untuk sub urusan kesehatan masyarakat veteriner, fungsi pengawasan peredaran produk hewan menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner. Sampai dengan tahun 2019, terdata Pengawas Kesmavet sebanyak 271 orang yang tersebar di 32 Provinsi.

Penguatan fungsi pengawasan yang didukung dengan fungsi pengujian produk hewan, baik yang dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap unit usaha produk hewan maupun peredaran produk hewan baik secara rutin yang ditargetkan pada unit usaha/produk hewan prioritas, pengawasan pada saat hari besar keagamaan nasional maupun respon cepat pada saat terjadi dugaan kasus penyimpangan produk hewan merupakan faktor yang mendukung pencapaian upaya penjaminan produk hewan yang ASUH.

Untuk mendukung fungsi pengujian produk hewan, peran laboratorium kesmavet Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga sangat diperlukan. Sampai dengan tahun 2019, terdata 132 laboratorium kesmavet meliputi 9 laboratorium kesmavet Pusat, 34 laboratorium provinsi dan 89 laboratorium kesmavet kabupaten/kota. Untuk memperkuat kapasitas laboratorium ini, upaya pembinaan termasuk dukungan fasilitasi sarana prasarana terus dilakukan.



Selain itu, berkaitan dengan tantangan pengawasan keamanan produk hewan di era revolusi industri 4.0, pada November 2019 juga telah dikembangkan sistem pelaporan pengawasan kesemavet berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Digital Pelayanan dan Pelaporan Kesehatan Masyarakat Veteriner (DILAN KESMAVET) yang merupakan sistem data dan informasi yang terintegrasi terkait fungsi Kesmavet. Pada aplikasi DILAN KESMAVET terdapat dua aplikasi yaitu Sistem Pelaporan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (SILAWAS) untuk memudahkan pelaporan kegiatan pengawasan kesmavet dan Kolom Laporan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Veteriner (KOLAM) untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan temuan/kasus penyimpangan keamanan produk hewan. Sistem ini akan terus dikembangkan terkait dengan fungsi kesmavet lainnya.

3.3 Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya yang diraih oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2019 diantaranya:

1. Ditjen PKH meraih penghargaan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) terbaik ke-2 pada acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Sosialisasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Apresiasi untuk Satker Ditjen PKH ini, diberikan karena tata kelola keuangan Ditjen PKH dinilai terbaik ke-2 untuk kategori pagu sedang dengan nilai 96.53.



Gambar 9. Piagam Penghargaan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

2. Ditjen PKH memperoleh sertifikat penghargaan penerapan SNI ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuaan.





Gambar 10. Sertifikat Penghargaan Penerapan ISO 37001 : 2016

3. Tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian di bawah Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yakni Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dan Balai Besar Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTHPT Baturraden) mendapatkan penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).





Gambar 11. Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

4. Dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), mendapatkan penghargaan SNI Award dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam ajang Standar Nasional Indonesia (SNI) Award 2019. Dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), mendapatkan penghargaan SNI Award dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam ajang Standar Nasional Indonesia (SNI) Award 2019, 20 November 2019 di Balai Kartini, Jakarta. Kedua UPT tersebut yakni Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang dan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari masing-masing memperoleh peringkat perak untuk kategori Perusahaan / Organisasi Kecil Barang dan Perusahaan/Organisasi Menengah Barang sektor pangan, pertanian dan kesehatan.



Gambar 12. Penghargaan SNI Award

5. Tiga Aplikasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yakni SISCOBETI dan SIMREK masing-masing mendapatkan peringkat II dan III kategori aplikasi layanan publik dalam Lomba Inovasi Teknologi informasi Komunikasi (TIK) 2019, sedangkan Aplikasi SIBETI mendapatkan peringkat III aplikasi layanan internal.



Gambar 13. Piala Lomba Inovasi Teknologi Informasi

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 sebesar Rp.2,073 triliun. Selama berjalannya tahun anggaran terdapat beberapa perubahan anggaran melalui revisi DIPA yang menyebabkan terjadinya penambahan pagu anggaran menjadi Rp2.089.592.073.000. Revisi anggaran selama Tahun 2019 antara lain revisi refocusing, revisi buka blokir anggaran Bekerja, OPAL dan Loka Papua, revisi penambahan pagu BLU BBIB Singosari (Kanwil), Revisi penambahan pagu BLU Pusvetma dan revisi anggaran Bekerja

kedua, revisi belanja pegawai, revisi pemanfaatan sisa kontraktual dan penambahan target serta pagu PNBPN.

Revisi pertama adalah revisi pergeseran anggaran untuk memenuhi kegiatan Bekerja, Petani Milenial, Serasi dan OPAL dengan pagu anggaran tetap, dengan rincian:

- a. Anggaran sebesar Rp673.600.560.000,- digunakan untuk memberikan bantuan ayam usia 4 minggu dan pakannya bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 11 juta ekor di 13 provinsi dan 57 kabupaten;
- b. Anggaran sebesar Rp25.500.000.000,- digunakan untuk kegiatan Petani Milenial yaitu bantuan ternak ayam/unggas/itik 500 ekor/kelompok, bantuan kandang Rp3.000.000,-/kelompok, dan bantuan pakan 500 kg/kelompok, dengan pelaksanaan kegiatan BPTU HPT Sembawa;
- c. Anggaran sebesar Rp25.500.000.000,- digunakan untuk kegiatan Serasi yaitu bantuan ternak 500.000 ekor itk untuk 500.000 Ha rawa di Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Anggaran sebesar Rp7.100.000.000,- digunakan untuk kegiatan OPAL.

Revisi kedua adalah revisi buka blokir kegiatan OPAL sebesar Rp7.100.000.000,- dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Loka Veteriner di BBVet Maros sebesar Rp35.000.000.000,-. Revisi ketiga adalah penambahan pagu BLU di BBIB Singosari (revisi DIPA Kanwil) sebesar Rp4.000.000.000,- sehingga pagu total menjadi Rp2.077.121.296.000,-. Revisi keempat adalah revisi penambahan BLU di Pusvetma sebesar Rp5.746.547.000,- sehingga terjadi penambahan pagu total menjadi Rp2.082.867.843.000,- dan penyesuaian lokasi (Kab. Soppeng dan Selayar) dan biaya operasional Bekerja. Revisi kelima adalah revisi belanja pegawai dimana Ditjen PKH mendapat tambahan anggaran sebesar Rp1.081.859.000,- untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja pegawai. Penambahan alokasi belanja pegawai ini menyebabkan penambahan pagu total menjadi Rp2.083.949.702.000,-. Revisi keenam adalah revisi anggaran terkait pemanfaatan sisa kontraktual dan penambahan target dan pagu PNBPN dimana dalam revisi terjadi penambahan pagu PNBPN di 8 satker UPT sebesar Rp5.642.335.000,- sehingga pagu total menjadi Rp2.089.592.037.000,-. Kronologis revisi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2019 secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



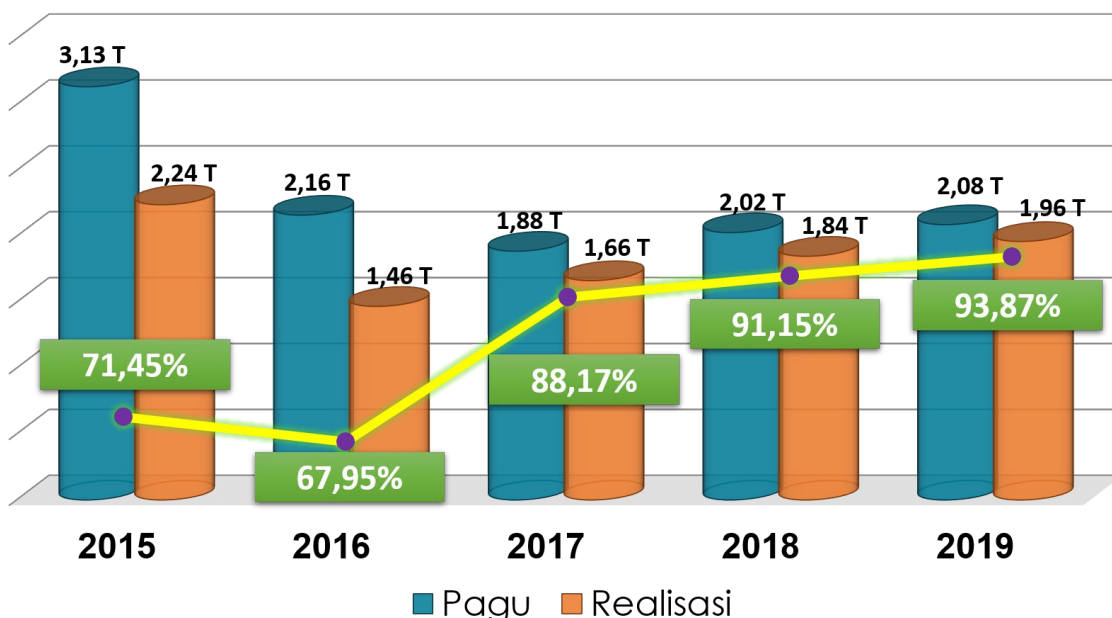
KRONOLOGI PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2019



Gambar 14. Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2019

Dari total anggaran 2,089 triliun, sebesar 24,06% (Rp502 milyar) anggaran dialokasikan di kantor pusat. Sedangkan untuk kantor daerah sebesar 64,14% (Rp. 1,34 triliun), dan TP Provinsi sebesar 11,80% (Rp. 246 milyar). Anggaran tersebut dialokasikan di 57 satker, terdiri dari 1 kantor pusat, 22 kantor daerah (UPT) dan 34 satker TP Provinsi.

Serapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun anggaran 2019 adalah sebesar 93,87% atau Rp.1,849 triliun dari total alokasi anggaran Ditjen PKH Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2,028 triliun.



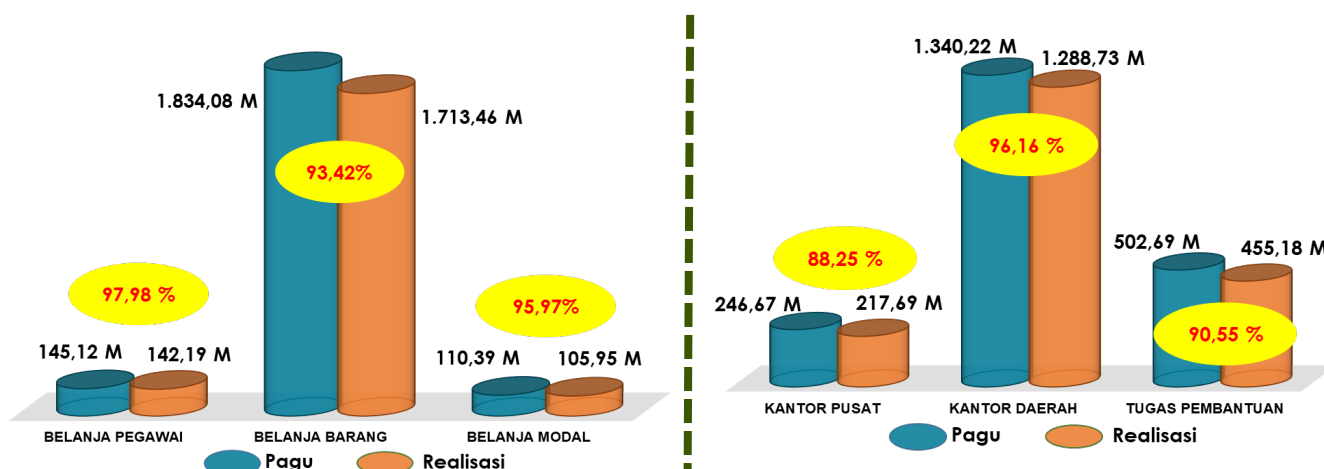
Grafik 17. Serapan Anggaran Ditjen PKH 2015-2019

Sumber data: Aplikasi OM-SPAN per 15 Januari 2020

Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis kewenangan adalah: (i) Satker Pusat sebesar 88,25% atau Rp 217,687 miliar dari anggaran sebesar Rp.246,674



miliar, (ii) Satker UPT sebesar 96,16% atau Rp 1,288 triliun dari anggaran sebesar Rp 1,340 triliun, dan (iii) Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 90,55% atau Rp 455,176 miliar dari anggaran sebesar Rp 502,694 miliar.



Grafik 18. Komposisi dan Penyerapan Anggaran 2019

Sumber data: Aplikasi OM-SPAN per 15 Januari 2020

Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis belanja adalah (i) Belanja Pegawai sebesar 97,98% atau Rp 142,187 miliar,- dari pagu anggaran Rp.145,121 miliar,- (ii) Belanja Barang sebesar 93,42% atau Rp 1,713 triliun dari pagu anggaran Rp 1,834 triliun,- (iii) Belanja Modal sebesar 95,97% atau Rp 105,949 miliar,- dari pagu anggaran Rp.110,39 miliar.

Realisasi serapan anggaran berdasarkan kegiatan utama adalah: (i) Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar 93,84% atau Rp 1,242 triliun,- dari pagu anggaran Rp 1,323 triliun,- (ii) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak 95,58% atau Rp 101,091 miliar,- dari pagu anggaran Rp 105,770 miliar,- (iii) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 92,48% atau Rp 216,943 miliar,- dari pagu anggaran Rp 234,586 miliar,- (iv) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) 90,99% atau Rp 41,393 miliar,- dari pagu anggaran Rp 45,494 miliar,- (v) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak 93,54% atau Rp 22,008 miliar,- dari pagu anggaran sebesar Rp 23,528 miliar,- dan (vi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 94,82% atau Rp 338,059 miliar,- dari pagu anggaran Rp 356,524 miliar.



IV. PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada masyarakat (publik).

Laporan Kinerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 disusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2019. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 8 (delapan) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran program, sebagian besar indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil dan berhasil (sangat berhasil 7 indikator dan berhasil 2 indikator), serta terdapat 1 (satu) indikator yang cukup berhasil. Oleh karena itu, pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dikatakan berhasil.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan, serta segenap jajaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam peningkatan kinerja masing-masing unit kerja. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2019.

Keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2019 khususnya perkembangan capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran program tersebut juga tidak terlepas dari dukungan seluruh kegiatan yang ada di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran program, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, juga dukungan pengendalian internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak; (2) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak; (3) Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan; (4) Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 214/2017); (5) Indeks



Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH; (6) Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia; (7) Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia. Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; dan (2) Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak, sedangkan Indikator kinerja yang masuk kategori **cukup berhasil** yaitu: produksi daging sapi/kerbau.

Selain berbagai keberhasilan telah dicapai pada tahun 2019, pembangunan peternakan dan kesehatan hewan masih menghadapi beberapa permasalahan dan kendala dalam pencapaian, antara lain:

1. Produksi daging sapi/kerbau hanya terealisasi sebesar 68,13% dari target yang telah ditetapkan. Produksi daging sapi pada tahun 2019 mengalami penurunan atau (-2,39%) bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja Upsus SIWAB periode 2017-2019 telah berpengaruh dalam peningkatan jumlah populasi sapi dan kerbau, namun belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka importasi daging. Akar permasalahan tidak tercapainya target produksi daging sapi dan kerbau di tahun 2019 yaitu: (a) meningkatnya volume impor daging sapi; (b) tidak berhasilnya pengadaan sapi indukan impor; (c) gangguan reproduksi pada indukan ternak sapi; (d) pemotongan betina produktif; (e) produktivitas sapi dan kerbau dengan *Body Conditioning Score* (BCS) yang masih rendah; (f) skala kepemilikan peternak yang kecil, ternak sebagai usaha sampingan; (g) kekurangan jumlah SDM tenaga teknis reproduksi (IB, PKb, dan ATR); dan (f) kurangnya sarana dan prasarana.
2. Tahun 2019 target status kesehatan hewan yang ditetapkan adalah 80% dengan capaian 78,1%. Capaian status kesehatan hewan dibawah target dikarenakan beberapa hal antara lain: (1) Adanya wabah Rabies di beberapa lokasi di Provinsi NTB; dan (2) Adanya penurunan jumlah provinsi bebas rabies semula 9 Provinsi menjadi 8 Provinsi karena Provinsi NTB sebelumnya merupakan wilayah bebas Rabies.

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, disusunlah solusi sebagai rekomendasi perbaikan di masa mendatang dengan terus melanjutkan kegiatan strategis percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau di dalam negeri, antara lain: (a) penanggulangan gangguan reproduksi pada indukan sapi, (b) penanganan pemotongan sapi betina produktif, (c) perbaikan pakan sapi, (d) penguatan kelembagaan peternak, (e) pelatihan dan bimbingan teknis, (f) penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana semen beku, N₂ Cair, dan container; (g) penambahan impor bibit sapi indukan untuk meningkatkan jumlah induk sapi/kerbau dalam negeri dengan mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tahun-tahun sebelumnya.; (h) perbaikan pendataan terkait data capaian optimalisasi reproduksi (kelahiran IB dan kawin alam) melalui perbaikan identitas



ternak; (i) Pengembangan sapi potong pada kelompok peternak. Selain itu juga perlu ada alokasi anggaran untuk pemenuhan alsintan pasca panen untuk peternakan seperti Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) sebagai sarana fasilitasi pemotongan hewan kurban. Selain itu, perlu juga dibahas bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana RPH.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, untuk tahun 2019 Kementerian Pertanian telah mulai melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pertanian ke depan, seperti: (1) meningkatkan penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat; (2) mendorong peningkatan peran kelembagaan petani/peternak; (3) meningkatkan meningkatkan produksi daging sapi dan kerbau untuk mengurangi volume importasi; (4) Mendorong kemitraan; Meningkatkan investasi dan sumber pembiayaan serta (4) mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan alsintan pasca panen dan produksi vaksin rabies.

Selain itu dalam upaya untuk mendorong ekspor sub sektor peternakan juga dilakukan beberapa langkah yaitu: (a) Melakukan misi dagang, promosi dan temu bisnis antara pelaku usaha ekspor di negara tujuan potensi; (b) Melakukan koordinasi dengan Kedutaan dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan Government to Government antar Negara; (c) Melakukan pendampingan pemenuhan dokumen ekspor dengan melakukan koordinasi dengan K/L terkait antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Bea Cukai, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Ditjen Pajak, Kemendag, Badan Pengujian Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Perindustrian; (d) Melakukan koordinasi dengan kementerian/instansi terkait sehubungan dengan pengembangan pemasaran ekspor komoditas peternakan antara lain dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional, dan Kemenko Perekonomian; (e) Melakukan koordinasi di lingkup Kementerian Pertanian seperti Biro Kerjasama Luar Negeri dan Badan Karantina dan juga dengan instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian terkait penyelesaian perundingan kerjasama baik bilateral, regional, dan multilateral di bidang peternakan dan kesehatan hewan; (f) Melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan pengembangan pemasaran seperti kordinasi data ekspor dengan pihak BPS dan Bea cukai, FGD pembahasan peta bisnis proses perunggasan, pembahasan langkah kerja Tim Percepatan Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH, pembahasan pemetaan potensi ekspor ; (g) Melakukan pendampingan pelaku usaha ekspor untuk promosi produk dalam pameran yang bersifat internasional seperti Indolivestock serta penyebarluasan informasi pameran perdagangan yang dapat diikuti oleh pelaku usaha ekspor; (h) Mendorong peternak membentuk korporasi, sehingga akan lebih mudah membuka peluang pasar global; (i) Mendorong eksportir untuk terus memperkuat kemitraan dengan peternak, dengan pola kemitraan yang cocok untuk



kedua belah pihak, sebagai upaya untuk menjaga kontinuitas ketersediaan ternak atau produk peternakan; (j) Pengembangan investasi di bidang usaha peternakan yang dapat dikatakan berhasil, mampu mendorong peningkatan ekspor komoditas peternakan.

Tahun 2019, alokasi APBN (anggaran Pendapatan Belanja Negara) Ditjen PKH sebesar 2,08 Triliun dengan realisasi serapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sebesar 93,87% atau Rp.1,96 Triliun. Selain memperoleh dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, Kinerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2019 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani/Peternak.

Rencana Kerja Tahun 2020 untuk peningkatan produksi sapi di dalam negeri Ditjen PKH akan mencanangkan SIKOMANDAN yang merupakan kepanjangan dari Sapi Kerbau Komoditas Andalan Dalam Negeri. SIKOMANDAN merupakan strategi atau upaya peningkatan produksi daging sapi/kerbau, yang dalam operasionalnya terdiri dari sinergi/integrasi kegiatan dari Hulu-On Farm-Off Farm, antara lain:

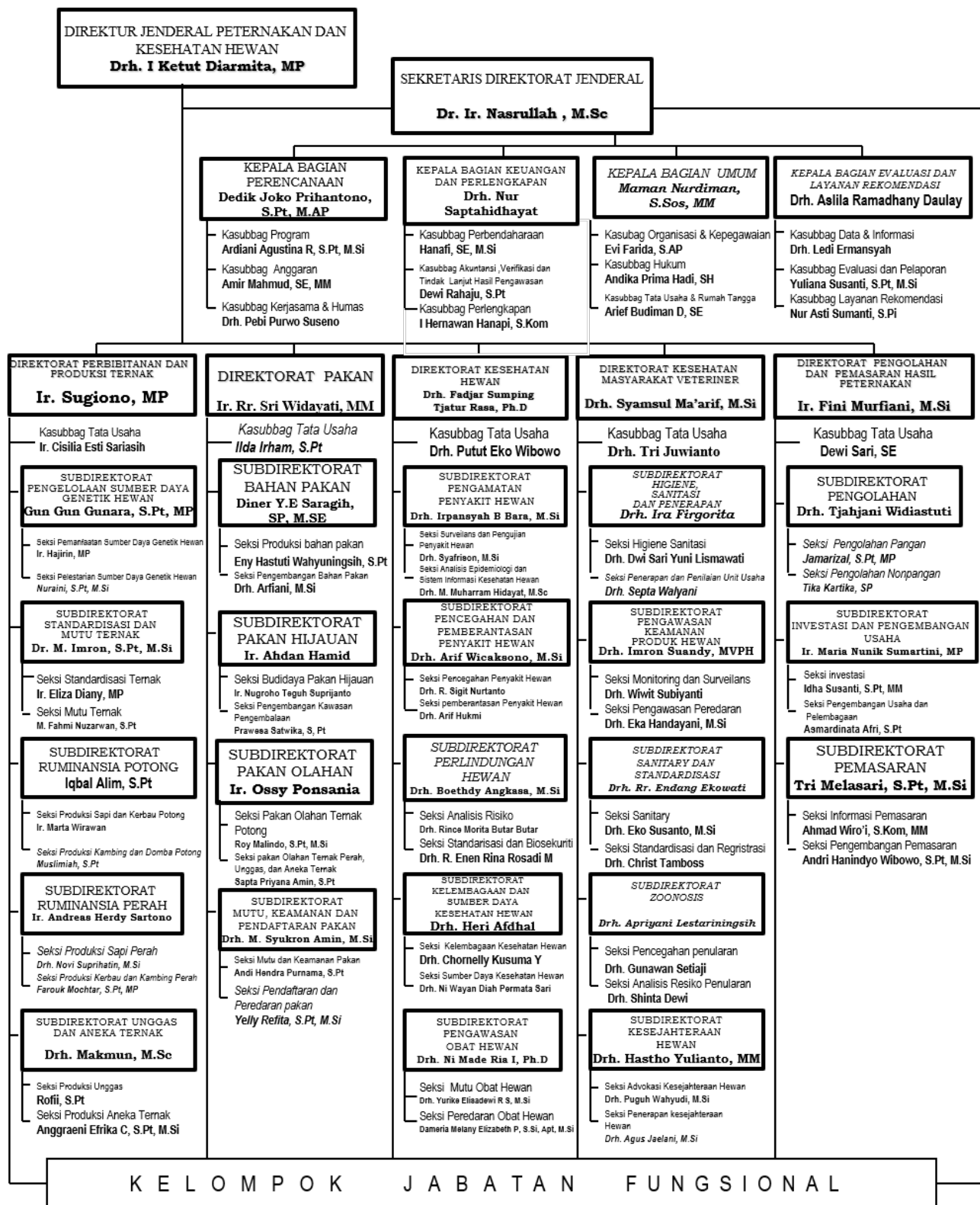
- a. peningkatan kelahiran (Inseminasi Buatan dan Kawin Alam);
- b. Produktifitas (tunda potong, pengemukan dan pemenuhan pakan);
- c. Manajemen keswan (pencegahan penyakit dan penanganan gangguan reproduksi)
- d. Keamanan dan mutu pangan (penyediaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia; penjaminan produk ASUH)
- e. Pemerataan penyediaan pangan (supply demand, distribusi dan pemasaran)
- f. Manajemen database (penguatan system data dan pelaporan on line melalui ISIKHAS)



LAMPIRAN



Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



Data 1 Oktober 2019

(Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015)



Lampiran 2.Rekapitulasi Pegawai Ditjen PKH berdasarkan pendidikan terakhir

NO	UNIT KERJA	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SUTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	25	64	0	0	7	0	0	28	1	2	128
3	DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK	1	25	32	1	0	3	0	0	4	0	0	66
4	DIREKTORAT PAKAN	1	12	31	0	0	3	0	0	3	1	1	52
5	DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN	5	53	3	0	0	1	0	0	6	0	0	69
6	DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	38	3	0	0	0	0	0	5	0	1	47
7	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN	0	21	22	0	0	0	0	0	3	1	0	47
8	PUSVETMA, SURABAYA	1	32	21	1	0	13	0	0	52	2	3	125
9	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNG SINDUR, BOGOR	2	25	8	2	0	10	0	0	37	0	0	84
10	BBVET WATES	1	31	9	2	0	15	0	0	24	2	0	84
11	BBVET MAROS	1	24	12	0	0	9	0	0	19	0	2	67
12	BBVET DENP ASAR	2	17	7	0	0	9	0	0	24	4	1	64
13	BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN	0	16	31	8	0	16	0	0	39	16	19	145
14	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI MALANG	1	16	26	3	0	17	0	0	17	4	1	85
15	BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG BANDUNG	2	10	16	5	0	14	1	0	26	4	3	81
16	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR	0	8	19	4	0	7	0	0	16	5	7	66
17	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	1	21	11	0	0	5	1	0	17	0	1	57
18	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN BEKASI	0	4	16	0	0	8	0	0	13	1	0	42
19	BALAI VETERINER MEDAN	1	19	10	0	0	4	0	0	19	1	2	56
20	BALAI VETERINER BUKITTINGGI	0	20	0	0	0	7	0	0	31	0	1	59
21	BALAI VETERINER LAMPUNG	0	16	7	3	0	16	0	0	15	0	0	57
22	BALAI VETERINER BANJARBARU	0	10	14	0	0	10	0	0	20	0	0	54
23	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI	0	13	26	0	0	5	0	0	25	1	2	72
24	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG	0	6	13	0	0	6	0	0	48	3	3	79
25	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MANGATAS	1	7	15	3	0	11	0	0	35	4	3	79
26	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA	0	5	26	3	0	6	0	0	43	2	4	89
27	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI	0	10	12	0	0	12	0	0	23	1	1	59
28	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR	0	7	16	2	0	3	0	0	26	1	2	57
29	BALAI VETERINER SUBANG	0	21	5	5	0	15	0	0	4	0	0	50
	TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	22	512	475	42	0	232	2	0	622	54	60	2021

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : dltjennak@pertanian.go.id
Website : <http://dltjenpkh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Diarmita

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo

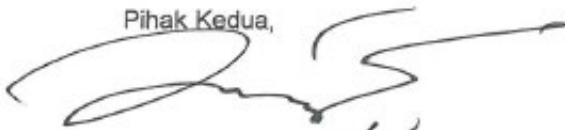
Jabatan : Menteri Pertanian


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2019

Pihak Kedua,

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama,

I Ketut Diarmita



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal temak nasional	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal temak	25,0 %
		Penurunan volume impor untuk produk pangan hewani asal temak	4,2 %
2	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal temak strategis nasional	Produksi daging sapi dan kerbau	755 Ribu Ton
3	Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan	Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal temak)	30 %
4	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	80 %
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	82 Nilai
		Nilai Kinerja (NK) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (berdasarkan PMK 214 Tahun 2017)	85 Nilai
6	Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Skala Likert 1-4)	3,3 Skala Likert
7	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	127 Kasus
8	Terjaminnya keamanan pangan strategis nasional	Jumlah kasus pangan segar hewani asal temak nasional yang membahayakan kesehatan manusia	18 Kasus

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Rp 105.770.795.000
2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp 234.586.295.000
3. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp 1.323.687.987.000
4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	Rp 45.494.135.000
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp 356.524.551.000
6. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Rp 23.528.274.000
Jumlah	Rp 2.089.592.037.000

Menteri Pertanian,

Syahrul Yasin Limpo

Jakarta, Oktober 2019
Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan

Ketut Diahmita



Lampiran 4. Pernyataan Telah Direviu Oleh Itjen Kementan



**KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORATIF**

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 3 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Telepon / Fax. 021 - 78831857
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk tahun anggaran 2019, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2020



Inspektur IV
drb. I.G.M.Ngr. Kuswandana, MM
NIP. 19660408 199403 1 001

Lampiran 5. Tabel Populasi Ternak Tahun 2015-2019

(000 Ekor/000 Head)

No	Jenis/ Species	Tahun/Year				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	TERNAK BESAR/LARGE LIVESTOCK					
1	Sapi Potong/Beef Cattle	13.937	14.717	15.584	16.433	17.119
2	Sapi Perah/Dairy Cattle	484	512	542	582	561
3	Kerbau/Buffalo	1.033	1.004	990	894	1.141
4	Kuda/Horse	430	424	409	378	393
II	TERNAK KECIL/SMALL LIVESTOCK					
1	Kambing/Goat	19.013	17.862	18.208	18.306	18.976
2	Domba/Sheep	17.025	15.717	17.142	17.611	17.794
3	Babi/Pig	7.808	7.904	8.261	8.254	8.923
III	TERNAK UNGGAS/POULTRIES					
1	Ayam Buras/Native Chicken	285.304	294.333	299.701	300.978	311.912
2	Ayam Ras Petelur/Layer	155.007	161.364	258.844	261.933	263.918
3	Ayam Ras Pedaging/Broiler	1.528.329	1.632.801	2.922.636	3.137.707	3.149.382
4	Itik/Duck	45.322	47.423	49.056	50.528	51.950
5	Itik Manila/Muscovy Duck	7.975	8.170	8.502	9.024	9.371
IV	ANEKA TERNAK/VARIOUS LIVESTOCK					
1	Kelinci/Rabbit	1.103	1.202	1.244	1.332	1.350
2	Puyuh/Quail	13.782	14.088	14.570	14.062	14.107
3	Merpati/Pigeon	2.154	2.476	2.503	2.644	2.624

Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures

Populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2015 - 2018 adalah angka terkoreksi dengan Parameter Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) BPS 2018

Tahun 2015 - 2016 Populasi Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging bersumber dari Laporan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan

Tahun 2017 - 2019 Populasi Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging bersumber dari data yang diolah berdasarkan hasil laporan perusahaan secara online. Populasi Ayam Ras Petelur merupakan induk produktif umur 19 - 92 minggu

Lampiran 6. Tabel Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2015-2019

(000 ton)

No	Jenis/	Tahun/Year				
	Species	2015	2016	2017	2018	2019 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	DAGING/MEAT					
1	Sapi Potong/Beef Cattle	506,66	518,48	486,32	497,97	490,42
2	Kerbau/Buffalo	35,41	31,90	29,38	25,35	23,97
3	Kambing/Mutton	64,9	67,8	70,4	70,2	72,6
4	Domba/Lamb	44,5	45,9	55,1	82,3	91,0
5	Babi/Pork	330,2	339,6	317,4	215,8	224,0
6	Kuda/Horse	2,2	2,6	2,7	2,4	2,3
7	Ayam Buras/Native Chicken	299,8	285,0	300,1	287,2	298,7
8	Ayam Ras Petelur/Layer	102,8	110,3	114,9	141,6	141,6
9	Ayam Ras Pedaging/Broiler	1.628,3	1.905,5	3.175,9	3.409,6	3.495,1
10	Itik/Duck	34,9	41,9	36,4	38,7	38,3
11	Kelinci/Rabbit	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4
12	Puyuh/Quail	0,9	1,0	1,1	1,3	1,2
13	Merpati/Pigeon	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6
14	Itik Manila/Muscovy Duck	5,3	5,6	5,9	6,0	5,9
II	TELUR/EGG					
1	Ayam Buras/Native Chicken	190,7	196,7	221,0	212,3	220,2
2	Ayam Ras Petelur/Layer	1.372,8	1.485,7	4.632,8	4.688,1	4.753,4
3	Itik/Duck	278,5	292,0	302,7	306,5	321,0
4	Puyuh/Quail	22,1	23,6	25,0	29,0	29,1
5	Itik Manila/Muscovy Duck	31,4	33,2	35,1	32,0	31,9
III	SUSU/MILK	835,1	912,7	928,1	951,0	996,4

Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary

Tahun 2015 - 2016 Produksi daging Ayam Ras Pedaging dan produksi telur Ayam Ras Petelur bersumber dari Laporan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan

Tahun 2017 - 2019 Produksi daging Ayam Ras Pedaging dan produksi telur Ayam Ras Petelur dan bersumber dari data yang diolah berdasarkan hasil laporan perusahaan secara online

Lampiran 7. PDB Atas Dasar Harga Konstan Subsektor Peternakan Tahun 2015-2019

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.171.445,8	1.210.955,5	1.258.375,7	1.307.373,9	1.354.957,3
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	906.805,5	936.356,9	970.262,9	1.005.775,9	1.039.255,1
a. Tanaman Pangan	280.018,8	287.216,5	293.858,0	298.146,1	293.127,0
b. Tanaman Hortikultura	127.110,0	130.832,3	135.649,0	145.131,2	153.157,8
c. Tanaman Perkebunan	345.164,9	357.137,7	373.194,2	387.496,7	405.147,5
d. Peternakan	136.936,4	143.036,5	148.688,8	155.539,9	167.741,5
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	17.575,4	18.133,9	18.872,9	19.462,0	20.081,3
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	60.623,5	60.002,0	61.279,6	62.981,8	63.217,6
3 Perikanan	204.016,8	214.596,6	226.833,2	238.616,2	252.484,6

Sumber : BPS

Keterangan : **) Angka Sangat Sementara

*) Angka Sementara



Lampiran 8. NTPT Peternakan (NTPT) Tahun 2019

Sektor NTPT	NTP NTPT (Nilai Tukar Petani Peternakan) Menurut Subsektor 2019											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI	138.58	138.47	138.28	138.46	140.06	140.67	142.06	143.67	142.26	141.59	141.68
- Ternak Besar	142.31	142.61	142.55	142.30	143.80	144.70	146.86	149	147.54	146.82	146.69	146.79
- Ternak Kecil	127.39	127.56	127.58	127.67	128.72	130.32	132.69	135.03	133.28	132.41	132.09	131.99
- Unggas	139.47	138.42	137.28	138.11	140.53	140.59	139.55	139.45	138.49	139.06	139.44	139.83
- Hasil Ternak	130.16	129.15	128.89	129.97	131.63	131.07	131.11	131.72	130.84	129.60	130.46	132.18
INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI	129.05	128.88	128.99	129.59	130.01	130.32	130.73	130.94	130.53	130.66	130.99	131.33
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	139.83	139.44	139.95	141.11	141.82	142.57	143.41	143.56	142.53	142.62	143.04	143.52
a) Bahan Makanan	149.34	147.84	148.96	151.66	152.75	154.25	156.17	156.25	153.17	152.90	153.66	154.39
b) Makanan Jadi	139.49	139.98	140.30	140.61	141.26	141.62	141.81	141.97	142.26	142.75	143.13	143.73
c) Perumahan	134.87	135.07	135	135.13	135.37	135.56	135.69	135.89	136.10	136.28	136.41	136.58
d) Sandang	136.66	136.94	137.19	137.62	139.08	139.61	139.91	140.27	140.56	140.83	141.03	141.29
e) Kesehatan	130.82	131.24	131.52	131.73	131.91	132.21	132.42	132.71	133.07	133.30	133.49	133.75
f) Pendidikan, Rekreasi & Olah raga	122.61	122.77	122.92	122.96	123.07	123.23	123.74	123.86	123.92	124.06	124.19	124.26
g) Transportasi	128.09	128.16	128.28	128.36	128.46	128.61	128.70	128.84	128.98	129.19	129.31	129.55
- Indeks BPPBM	119.22	119.26	119.06	119.18	119.33	119.29	119.37	119.65	119.77	119.94	120.19	120.38
a) Bibit	120.42	120.97	121.15	121.63	122.19	121.51	121.31	121.64	121.09	120.83	121.35	121.46
b) Obat-obatan & Pupuk	119.22	118.80	118.10	118.06	118.02	118.07	118.30	118.69	119.12	119.60	119.78	120.07
c) Transportasi	117.07	117.29	116.92	116.93	117.05	117.11	117.16	117.12	117.24	117.30	117.35	117.46
d) Sewa Lahan, Pajak & Lainnya	127.92	127.87	127.87	127.96	128.12	128.20	128.28	128.38	128.49	128.63	128.91	129.08
e) Penambahan Barang Modal	115.06	115.49	115.75	115.85	115.95	116.01	116.03	116.14	116.19	116.18	116.39	116.57
f) Upah Buruh Tani	121.48	121.60	121.89	122.01	122.38	122.76	122.92	123.45	123.50	123.76	123.93	124.01
NILAI TUKAR PETANI PETERNAKAN	107.39	107.44	107.20	106.84	107.73	107.95	108.67	109.72	108.99	108.36	108.15	108.11
NILAI TUKAR USAHA PERTANIAN	116.24	116.11	116.15	116.18	117.37	117.93	119.01	120.08	118.79	118.05	117.88	117.94

Lampiran 9. Perhitungan Nilai Efisiensi

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	Satuan	PAK Pagu Anggaran Keluaran	RAK Realisasi Anggaran Keluaran	CK Capaian Keluaran	PAK x CK	(PAK x CK) - RAK	$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$	$NE = 50\% + \frac{E}{50} \times 50\%$
IKU I Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak							2,50	56,26
1 Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan Sampel		13.536.452.000	12.113.978.541	2,13	28.839.572.612,94	16.725.594.071,94		
2 Obat Hewan dan Bahan Biobiotik Dosis		17.037.974.000	15.564.520.894	1,91	33.044.494.960,67	17.479.974.066,67		
3 Pengembangan unggas dan aneka ternak Ekor		728.203.648.000	680.203.572.303	0,91	663.314.869.944,92	-16.888.702.358,08		
4 Sarana Pemetaan Peternakan Unit		1.388.000.000	1.285.503.635	1,00	1.388.000.000,00	102.496.365,00		
5 Kelembagaan dan Usaha Peternakan Dokumen		18.740.274.000	17.506.632.176	1,00	18.740.274.000,00	1.233.641.824,00		
IKU II Penunjan volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak							11,79	79,49
1 Pengembangan ternak ruminansia perah Ekor		8.313.930.000	7.115.512.023	1,00	8.313.930.000,00	1.198.417.977,00		
2 Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan Unit		3.400.000.000	3.216.828.411	1,00	3.400.000.000,00	183.171.598,00		
IKU III Produksi daging sapi dan kerbau							25,87	114,67
1 Hewan Pakan Ternak Ha		31.339.054.000	29.652.282.376	0,99	30.932.277.729,40	1.279.995.353,40		
2 Pakan Olahan dan bahan pakan Ton		62.252.155.000	59.538.840.353	0,93	57.802.264.265,04	-1.736.576.087,96		
3 Mutu dan Keamanan Pakan Sampel		12.104.586.000	11.900.469.793	2,09	25.358.705.313,56	13.458.235.520,56		
4 Peningkatan Gangguan Reproduksi Ekor		18.380.169.000	16.865.091.963	0,83	15.309.188.175,36	-1.255.903.787,64		
5 Optimalisasi Reproduksi Aksesor		356.514.905.000	340.512.567.907	1,43	509.502.520.341,93	168.889.962.434,93		
6 Bibit Ternak Unggul dosis		54.549.193.000	51.203.233.410	1,25	68.106.011.667,75	16.902.778.257,75		
7 Bibit Ternak Unggul ekor		88.087.487.000	53.471.761.264	1,84	107.069.500.862,41	53.597.719.595,41		
8 Pengembangan ternak ruminansia potong Ekor		117.498.324.000	109.532.239.154	0,82	96.106.034.651,99	-13.426.204.602,01		
9 Pengendalian Penotongan Betina produktif Lokasi		9.590.081.000	9.375.960.104	1,00	9.590.081.000,00	214.120.896,00		
IKU IV Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alisintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak)							56,91	192,28
1 Penentuan persyaratan produk hewan yang ASUH Unit Usaha		13.756.667.000	11.865.366.374	2,00	27.536.713.526,31	15.671.347.152,31		
IKU V Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis							44,07	160,17
1 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan Sampel		50.512.113.000	48.291.551.372	3,44	173.535.854.942,46	125.244.303.570,46		
2 Pencengahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Dosis		64.571.017.000	59.932.514.594	1,00	64.684.445.305,30	4.751.930.711,30		
3 Kelembagaan Veteriner Unit		70.548.570.000	64.475.612.254	1,00	70.548.570.000,00	6.072.957.746,00		
IKU VI Nilai AKIP Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian							14,85	87,11
1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan		86.376.068.000	74.288.495.792	1,01	87.239.885.984,67	12.951.360.192,67		
IKU VII Nilai Kinerja (NK) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)							14,85	87,11
1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan		86.376.068.000	74.288.495.792	1,01	87.239.885.984,67	12.951.360.192,67		
IKU VIII Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan							2,45	56,12
1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan		59.697.378.000	58.471.750.324	1,00	59.697.378.000,00	1.225.627.676,00		
2 Layanan Peternakan Layanan		210.690.605.000	205.298.972.143	1,00	210.690.605.000,00	5.391.632.857,00		
IKU IX Jumlah kasus zoonosis yang terjadi kepada manusia							56,91	192,28
1 Penentuan persyaratan produk hewan yang ASUH Unit Usaha		13.756.667.000	11.865.366.374	2,00	27.536.713.526,31	15.671.347.152,31		
IKU X Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia							35,82	139,55
1 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Sampel		22.147.397.000	20.151.886.010	1,42	31.399.705.151,66	11.247.819.141,66		

Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN			FISIK			Indikator Output	Target	Realisasi	$CK = \prod_{i=1}^m \left(\frac{RVK_{ke_i}}{TVK_{ke_i}} \times \left(\prod_{j=1}^n \frac{Realisasi\ Indikator\ j}{Target\ Indikator\ j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)$
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%				
1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak											
400 Hewan Pakan Ternak	Ha	31.339.054,000	29.652.282,376	94,62	1.843	1.831	99,35	1.843	1.831	0,99	
401 Pakan Olahan dan bahan pakan	Ton	62.252.155,000	59.539.840,353	95,64	9.997	9.238	96,36	9.997	9.238	0,93	
402 Mutu dan Keamanan Pakan	Sampel	12.104.598,000	11.930.469,793	98,31	5.000	7.237	144,74	5.000	7.237	2,09	
1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan											
401 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	50.512.113,000	48.291.551,372	95,60	142.632	264.371	185,35	142.632	264.371	3,44	
402 Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	64.571.017,000	59.932.574,594	92,82	3.526.450	3.529.546	100,09	3.526.450	3.529.546	1,00	
403 Penanggulangan Gangguan Reproduksi	Ekor	18.380.169,000	16.566.091,953	90,12	67.780	61.859	91,26	67.780	61.859	0,83	
404 Pengujian Mutu Obat Hewan dan Seififikasi Obat Hewan	Sampel	13.536.452,000	12.113.978,541	89,49	1.610	2.350	145,96	1.610	2.350	2,13	
405 Obat Hewan dan Bahan Biologi	Dosis	17.037.974,000	15.984.320,894	93,55	5.477.100	7.544.100	139,26	5.477.100	7.544.100	1,94	
406 Kelembagaan Veleiner	Unit	70.548.570,000	64.476.612,254	91,39	381	381	100,00	381	381	1,00	
1785 Penyediaan Benih dan Bibt Serta Peningkatan Produksi Ternak											
319 Optimalisasi Reproduksi	Akseptor	396.514.905,000	340.612.587,907	95,54	3.000.000	3.956.374	119,55	3.000.000	3.956.374	1,43	
400 Benih Ternak Unggul	dosis	54.549.193,000	51.203.233,410	93,87	4.764.889	5.138.124	107,85	4.764.889	5.138.124	1,25	
401 Bibt Ternak Unggul	ekor	58.087.487,000	53.471.781,264	92,05	667.935	1.054.597	157,89	667.935	1.054.597	1,84	
402 Pengembangan ternak uminirasi pobong	Ekor	117.498.324,000	109.532.239,154	93,22	9.930	8.638	90,07	9.930	8.638	0,82	
403 Pengembangan ternak uminirasi perah	Ekor	8.313.930,000	7.115.512,023	85,59	327	327	100,00	327	327	1,00	
404 Pengembangan unggas dan aneka ternak	Ekor	728.559.648,000	680.203.572,303	93,36	10.945.280	10.281.680	93,94	10.945.280	10.281.680	0,91	
1786 Pelembagaan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)											
400 Pemenuhan persyaratan produk Hewan yang ASUH	Unit Usaha	13.756.657,000	11.865.366,374	86,25	135	191	141,48	135	191	2,00	
401 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Sampel	22.147.397,000	20.151.886,010	90,99	25.821	30.745	119,07	25.821	30.745	1,42	
402 Pengendalian Pemotongan Beina produktif	Lokasi	9.590.081,000	9.375.960,104	97,77	80	80	100,00	80	80	1,00	
1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dijalan Peternakan											
950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	86.376.068,000	74.288.485,792	86,01	1	1	100,00	1	1	1,01	
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	59.697.378,000	58.471.750,324	97,95	1	1	100,00	1	1	1,00	
954 Layanan Perkantoran	Layanan	2'10.690.605,000	205.298.972,143	97,44	1	1	100,00	1	1	1,00	
5891 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak											
400 Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	3.400.000,000	3.216.828,411	94,61	17	17	100,00	17	17	1,00	
401 Sarana Pemasaran Peternakan	Unit	1.388.000,000	1.285.503,633	92,62	5	5	100,00	5	5	1,00	
402 Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Dokumen	18.740.274,000	17.506.632,176	93,42	68	68	100,00	68	68	1,00	

Lampiran 10. Pelaku Usaha Yang Siap Ekspor

No	NAMA PERUSAHAAN	KOMODITAS/PRODUK
1	PT. Inkopmar Cahaya Buana*	Domba Hidup
2	UD. Hanif	Domba
3	Asia Global	Domba
4	PT. Indotirta Suaka	Babi Hidup
5	PT. Triton	Kelinci
6	PT. Ulu Indonesia*	DOC Unggas Lokal
7	PT. Massa Makmor Food And Bv	Daging dan produk daging sapi
8	CV. Sentosa Trading	Daging dan produk daging sapi
9	PT. Ciomas Adisatwa	Daging Ayam
10	PT. Santosa Agrindo	Olahan Daging Sapi Wagyu
11	PT. Bellfoods	Olahan Unggas
12	CV. Surya Abadi	Telur Asin
13	CV. Sarana Langgeng Sampurna	Lemak Ayam
14	PT. Jinyoung	Lemak Ayam
15	PT. Fontera Brands Manufacturing Indonesia	Susu dan produk susu
16	PT. Forisa Nusapersada	Susu dan produk susu
17	PT. Frisian Flag Indonesia	Susu dan produk susu
18	PT. Indolakto	Susu dan produk susu
19	PT. Kievit Indonesia	Susu dan produk susu
20	PT. Kraft Ultrajaya Indonesia	Susu dan produk susu
21	PT. Anta Tirta	Susu dan produk susu
22	PT. Calpis Indonesia	Susu dan produk susu
23	PT. Massyndo Gemilang	Kulit dan Produk Kulit
24	PT. Mastrotto Indonesia	Kulit dan Produk Kulit
25	PT. Hymasa Indotraco	Kulit dan Produk Kulit
26	CV. Cisarua	Kulit dan Produk Kulit
27	PT. Daehwa Leather Lestari	Kulit dan Produk Kulit
28	PT. Dwi Tunggal Kusumo	Tanduk dan produk tanduk
29	CV. Aumireta Anggun	Bulu dan Produk Bulu
30	CV. Indonest	Sarang Burung Walet
31	Mondelez Indonesia	Tepung Telur
32	PT. Charoen Pokphan Indonesia Tbk	Olahan daging ayam dan Pakan
33	CV. Sentosa Multi Jaya	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Mie)
34	PT. Bumi Menara Internusa	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Olahan udang dan kepiting)
35	PT. Dua Kelinci	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (keripik)

36	Indofood Cbp Sukses Makmur	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Mie)
37	PT. Eloda Mitra	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Penyedap rasa)
38	PT. Fahmi Bintang Andalas Beraudara	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Penyedap rasa)
39	PT. Garudafood Putra Putri Jaya	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (kacang telur)
40	PT. Internusa Food	Olahan mengandung gelatin (Permen)
41	PT. Karya Kencana Sumber Sari	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Kerupuk udang)
42	PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (biskuit)
43	PT. Mane Indonesia	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Seasoning)
44	PT. Marizarasa Sarimurni	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Kue, selai)
45	PT. Maxindo Karya Anugerah	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Snack)
46	PT. Lahan Mas Agro	Bahan Pakan Palm Kernel Expeller (PKE)
47	PT. Wilmar Nabati Indonesia	Bahan Pakan Palm Kernel Expeller (PKE)
48	PT. Cisadane Raya Chemical	Bahan Pakan Protected Fat
49	PT. Asianagro Agungjaya	Bahan Pakan powder fat
50	PT. Seger Agro Nusantara	Bahan Pakan Jagung
51	PT. Sinar Indochem	Produk Pakan
52	CV. Fajar Jaya	Artificial flavour (kerupuk, mie dll)
53	CV. Japanindo Lestari	Protein powder
54	PT. Gemah Ripah Loh Jinawi Industri	Bat Guano
55	PT. Indochito International	Bat Guano
56	PT. Laksmana Mulia Sentosa	Bat Guano, Organic fertilizer
57	PT. Arzam Karantuna	Bat Guano
58	CV. Jelita Karya Jaya	Bat Guano
59	Alltech Biotechnology Indonesia	Obat Hewan
60	Behn Meyer Chemicals	Obat Hewan
61	Cheil Jedang Indonesia	Obat Hewan
62	Intervet Indonesia	Obat Hewan
63	Kalbe Farma Tbk	Obat Hewan

64	Medion Farma Jaya	Obat Hewan
65	Pfizer Indonesia Tbk	Obat Hewan
66	Romindo Primavetcom	Obat Hewan
67	Sanbe Farma	Obat Hewan
68	Trouw Nutrition Indonesia	Obat Hewan
69	Vaksindo Satwa Nusantara	Obat Hewan
70	PT. Fanrice Indonesia	Snack



Lampiran 11. Pelaku Usaha Binaan Mendukung Substitusi Impor Produk Peternakan

NO	NAMA BADAN USAHA	BIDANG USAHA	KABUPATEN	PROVINSI
1	Kelompok Karya Baru	Sapi Potong	Langkat	Sumatera Utara
2	SPR Maju Barokah	Sapi Potong	Rokan Hulu	Riau
3	SPR Pontian Batu Jaya	Sapi Potong	Indragiri Hulu	Riau
4	SPR Siak Jaya Makmur	Sapi Potong	Siak	Riau
5	SPR Karya Bersama	Sapi Potong	Sorolangun	Jambi
6	SPR Suka Maju	Sapi Potong	Merangin	Jambi
7	SPR Kuamang Abadi	Sapi Potong	Bungo	Jambi
8	SPR Alam Lestari (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Agam	Sumatera Barat
9	Kelompok Karya Makmur (17 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Padang Pariaman	Sumatera Barat
10	Kelompok Alam Lestari (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Agam	Sumatera Barat
11	Kelompok Lembah Subur (12 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Padang Pariaman	Sumatera Barat
12	Kelompok Margo Makmur (10 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Pasaman Barat	Sumatera Barat
13	Kelompok Tunas Harapan (14 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Solok Selatan	Sumatera Barat
14	Kelompok Kasai Saiyo (12 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Padang Pariaman	Sumatera Barat
15	Kelompok Bandarahan Saiyo (8 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Sijunjung	Sumatera Barat
16	SPR Alam Lestari (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Agam	Sumatera Barat
17	Kelompok Kandis Jaya (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Agam	Sumatera Barat
18	Kelompok Lembuk Ramang (8 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Kota Padang	Sumatera Barat
19	Kelompok Hidayah (11 Kelompok lainnya)	Sapi Potong	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
20	Kelompok Tanjung Keramat (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Pasaman Barat	Sumatera Barat
21	Kelompok Amanah (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
22	Kelompok Tunas Karya (10 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Sijunjung	Sumatera Barat
23	Kelompok Kayu Sati (9 Kelompok lainnya)	Sapi Potong	Solok	Sumatera Barat
24	Kelompok Harmonis (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Dharmasraya	Sumatera Barat
25	Kelompok Titian Rizki (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Solok	Sumatera Barat
26	Kelompok Bina Usaha Bersama (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Agam	Sumatera Barat

NO	NAMA BADAN USAHA	BIDANG USAHA	KABUPATEN	PROVINSI
27	Kelompok Alam Raya (10 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Dharmasraya	Sumatera Barat
28	Kelompok Karya Makmur (17 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Padang Pariaman	Sumatera Barat
29	Kelompok Alam Lestari (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Agam	Sumatera Barat
30	Kelompok Suka Tani (9 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Lampung	Lampung
31	Kelompok Sido Maju (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Lampung	Lampung
32	Kelompok Panca Bhakti III (7 Kelompok lainnya)	Sapi Potong	Lampung	Lampung
33	Kelompok Fajar Jaya (12 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Lampung	Lampung
34	Kelompok Ngudi Makmur (7 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Lampung	Lampung
35	SPR Dwi Manunggal	Sapi Potong	Lampung Tengah	Lampung
36	SPR Maju Sejahtera (Tanjung Sari)	Sapi Potong	Lampung Selatan	Lampung
37	Kelompok Panca Tani 2 (27 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Lampung Timur	Lampung
38	Great Giant Livestock	Sapi Potong	Lampung Tengah	Lampung
39	Sumber Cipta Kencana	Sapi Potong	Pesawaran	Lampung
40	PT. Superindo Utama Jaya	Sapi Potong	Kota Metro	Lampung
41	Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera	Sapi potong	Lampung Selatan	Lampung
42	Koperasi Sinar Makmur	Sapi Potong	Kota Bandar Lampung	Lampung
43	Kelompok Sapi Karya Maju	Sapi Potong	Musi Rawas	Sumatera Selatan
44	SPR Muaro Tigo Manunggal	Sapi Potong	Muara Enim	Sumatera Selatan
45	SPR Lembu Mulyo	Sapi Potong	Lahat	Sumatera Selatan
46	SPR Buay Pemaca	Sapi Potong	Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan
47	Kelompok Ternak Makmur	Sapi Potong	Bangka Barat	Bangka Belitung
48	PT. Timah Agro Manunggal	Sapi Potong	Bangka Tengah	Bangka Belitung
49	Koperasi Peternakan dan Perikanan Mitra Sejati	Sapi Potong	Kota Serang	Banten
50	Koperasi Harapan Manis	Sapi Potong	Serang	Banten
51	PT.Great Glory Farm	Sapi Potong	Tangerang	Banten
52	SPR Asnak Ciracap	Sapi Potong	Sukabumi	Jawa Barat
53	Kelompok Sumber Sapi Mulya (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Cirebon	Jawa Barat
54	Kelompok Mekartani (7 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Majalengka	Jawa Barat
55	SPR Kahuripan (10 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Purwakarta	Jawa Barat
56	SPR Cinagarabogo	Sapi Potong	Subang	Jawa Barat
57	SPR Kasaliang	Sapi Potong	Subang	Jawa Barat

NO	NAMA BADAN USAHA	BIDANG USAHA	KABUPATEN	PROVINSI
58	Kelompok Tegal Saluyu I (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Purwakarta	Jawa Barat
59	Kelompok KTTS Padusan (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Cirebon	Jawa Barat
60	Kelompok Warga Mekar (7 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Majalengka	Jawa Barat
61	Kelompok Tani Peduli (11 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Tasikmalaya	Jawa Barat
62	Kelompok Tirta Jaya (11 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Tasikmalaya	Jawa Barat
63	Kelompok Tani Ternak Laksana (8 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Ciamis	Jawa Barat
64	Kelompok Wira Tani	Sapi Potong	Karawang	Jawa Barat
65	Kelompok Mekar Jaya (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Purwakarta	Jawa Barat
66	Kelompok Sumber Sapi Mulya (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Cirebon	Jawa Barat
67	Kelompok Tunggal Mandiri (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Kuningan	Jawa Barat
68	Kelompok Sabilulungan 2 (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Tasikmalaya	Jawa Barat
69	Kelompok Sari Mukti (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Tasikmalaya	Jawa Barat
70	Kelompok Tani Margamukti III	Sapi Potong	Majalengka	Jawa Barat
71	Kelompok Tani Margamukti II	Sapi Potong	Majalengka	Jawa Barat
72	Kelompok Tani Mekarmuti	Sapi Potong	Majalengka	Jawa Barat
73	Kelompok Tani Lengo	Sapi Potong	Majalengka	Jawa Barat
74	Kelompok Tani Mekartani	Sapi Potong	Majalengka	Jawa Barat
75	Kelompok Tani Mitra Sejahtera	Sapi Potong	Majalengka	Jawa Barat
76	Kelompok Tani Cijurey	Sapi Potong	Majalengka	Jawa Barat
77	Kelompok Warga Saluyu	Sapi Potong	Subang	Jawa Barat
78	Kelompok Mekar Jaya I	Sapi Potong	Tasikmalaya	Jawa Barat
79	Kelompok Mekar Indah	Sapi Potong	Indramayu	Jawa Barat
80	Kelompok Sri Merta	Sapi Potong	Indramayu	Jawa Barat
81	Kelompok Citra Karya	Sapi Potong	Bogor	Jawa Barat
82	Kelompok Mekar Tani	Sapi Potong	Bandung	Jawa Barat
83	Kelompok Brahman	Sapi Potong	Bandung	Jawa Barat
84	Kelompok Legok Pego	Sapi Potong	Bandung	Jawa Barat
85	Kelompok Halimpu Jaya	Sapi Potong	Cirebon	Jawa Barat
86	Kelompok Harapan Maju	Sapi Potong	Ciledug	Jawa Barat
87	Kelompok Kandang Jaya II	Sapi Potong	Bekasi	Jawa Barat
88	Kelompok Hanjuang	Sapi Potong	Sumedang	Jawa Barat
89	Kelompok Harapan Mulya	Sapi Potong	Garut	Jawa Barat
90	Kelompok Tunas Muda	Sapi Potong	Tasikmalaya	Jawa Barat
91	Kelompok Tabrik	Sapi Potong	Tasikmalaya	Jawa Barat

NO	NAMA BADAN USAHA	BIDANG USAHA	KABUPATEN	PROVINSI
92	Kelompok Jaya Makmur Abadi	Sapi Potong	Kota Bandung	Jawa Barat
93	Kelompok Tunas Muda	Sapi Potong	Tasikmalaya	Jawa Barat
94	Kelompok Lembu Jaya	Sapi Potong	Tegal	Jawa Tengah
95	SPR Subur Mukti Sejati	Sapi Potong	Grobogan	Jawa Tengah
96	SPR Klirong 01	Sapi Potong	Kebumen	Jawa Tengah
97	SPR Tri Mulyo (15 kelompok)	Sapi Potong	Magelang	Jawa Tengah
98	SPR Sido Asih	Sapi Potong	Blora	Jawa Tengah
99	SPR Buara	Sapi Potong (Penggemukan dan Pembiakan)	Brebes	Jawa Tengah
100	Kelompok Anugrah Jaya	Sapi Potong	Tegal	Jawa Tengah
101	Kelompok Kebantingan	Sapi Potong	Tegal	Jawa Tengah
102	Kelompok Krajan	Sapi Potong	Tegal	Jawa Tengah
103	Kelompok Suka Maju (4 kelompok lainnya)	Sapi potong	Jawa Tengah	Jawa Tengah
104	Kelompok Margo Mulyo (3kelompok lainnya)	Sapi Potong	Jawa Tengah	Jawa Tengah
105	Kelompok Sahabat Tani (18 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Jawa Tengah	Jawa Tengah
106	Kelompok Pamor Aji (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Jawa Tengah	Jawa Tengah
107	Kelompok Rukun Bebrayan (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Jawa Tengah	Jawa Tengah
108	Kelompok Mahesa Kayun (7 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Boyolali	Jawa Tengah
109	Kelompok Lembu Joyo (10 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Batang	Jawa Tengah
110	Kelompok Ngudi Rejeki (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Boyolali	Jawa Tengah
111	Kelompok Adi Martani (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Klaten	Jawa Tengah
112	Kelompok Rukun Maju Makmur (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Kebumen	Jawa Tengah
113	Kelompok Sri Danasari (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Banjarnegara	Jawa Tengah
114	Kelompok Sido Utomo I (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Jepara	Jawa Tengah
115	Kelompok Gawe rejo I (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Jepara	Jawa Tengah
116	Kelompok KT. Sedyo Rahayu (1 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Klaten	Jawa Tengah
117	Kelompok Sumber Mulyo Sambiroto (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Blora	Jawa Tengah
118	Kelompok Tani Makmur (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Purworejo	Jawa Tengah

NO	NAMA BADAN USAHA	BIDANG USAHA	KABUPATEN	PROVINSI
119	SPR Mega Jaya	Sapi Potong (Penggemukan dan Pembiakan)	Bojonegoro	Jawa Timur
120	SPR Perkasa	Sapi Potong (Penggemukan dan Pembiakan)	Kota Probolinggo	Jawa Timur
121	SPR Lembu Barokah	Sapi Potong (Penggemukan dan Pembiakan)	Lamongan	Jawa Timur
122	SPR Lembu Lestari	Sapi Potong (Penggemukan dan Pembiakan)	Pacitan	Jawa Timur
123	SPR Palang (16 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Tuban	Jawa Timur
124	Kelompok Barokah Salosa (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Sumenep	Jawa Timur
125	Kelompok Lembu Sura (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Tulungagung	Jawa Timur
126	Kelompok Al Barokah (2 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Situbondo	Jawa Timur
127	Kelompok Kedung Gondang (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Bojonegoro	Jawa Timur
128	Kelompok Mandiri (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Situbondo	Jawa Timur
129	Kelompok Dadi Rukun (2 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Ponorogo	Jawa Timur
130	Kelompok Sidodadi (6 Kelompok lainnya)	Sapi Potong	Lamongan	Jawa Timur
131	Kelompok Rukun makmur (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Madiun	Jawa Timur
132	Kelompok Estu Karya Jaya (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Kediri	Jawa Timur
133	Kelompok Tani Mulyo (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Magetan	Jawa Timur
134	Kelompok Pajer Laggu (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Sumenep	Jawa Timur
135	Kelompok Lembu Jaya (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Jombang	Jawa Timur
136	Kelompok Sukses Bersama (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Kediri	Jawa Timur
137	Kelompok Kwt Bunga Asri (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Sumenep	Jawa Timur
138	Koperasi Bumi Peternakan Wahyu Mitra Utama	Sapi Potong	Tuban	Jawa Timur
139	Koperasi Produksi Karya Makmur Sejati	Sapi Potong	Tuban	Jawa Timur
140	KTT Maju Mapan	Sapi Potong	Tuban	Jawa Timur
141	KTT Lancar	Sapi Potong	Tuban	Jawa Timur
142	Koperasi Ternak Ngudi Makmur	Sapi Potong	Tuban	Jawa Timur

NO	NAMA BADAN USAHA	BIDANG USAHA	KABUPATEN	PROVINSI
143	Koperasi Ternak Bangun Usaha Bangkit	Sapi Potong	Tuban	Jawa Timur
144	Koperasi Ternak Usaha Bersama	Sapi Potong	Tuban	Jawa Timur
145	Koperasi Ternak Mekar Makmur	Sapi Potong	Tuban	Jawa Timur
146	Koperasi Gunung Rejo Makmur II	Sapi Potong	Lamongan	Jawa Timur
147	Koperasi Peternak Gunung Rejo Makmur	Sapi Potong	Lamongan	Jawa Timur
148	Koperasi Peternak Al Hikmah	Sapi Potong	Lamongan	Jawa Timur
149	Koperasi Sumber Jaya	Sapi Potong	Lamongan	Jawa Timur
150	Koperasi Peternak Sedakidah	Sapi Potong	Lamongan	Jawa Timur
151	Koperasi Ternak Karya Makmur	Sapi Potong	Tuban	Jawa Timur
152	Kelompok Mardi Gumarang (14 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Gunung Kidul	DIY
153	Kelompok Andini Sari (14 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Bantul	DIY
154	Kelompok Satwa Mulya (21 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Sleman	DIY
155	Kelompok Lembu Anggoro (8 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Gunung Kidul	DIY
156	SPR Wanaraya	Sapi Potong (Penggemukan dan Pembiakan)	Barito Kuala	Kalimantan Selatan
157	Kelompok Peternakan Sapi 39	Sapi Potong	Palangkaraya	Kalimantan Tengah
158	Kelompok Semangat Marhaban (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Singkawang	Kalimantan Barat
159	SPR Tani Sejahtera	Sapi Potong (Penggemukan dan Pembiakan)	Paser	Kalimantan Timur
160	SPR Watang Pulu	Sapi Potong (Penggemukan dan Pembiakan)	Sidrapp	Sulawesi Selatan
161	SPR Gabimu Sejahtera	Sapi Potong (Penggemukan dan Pembiakan)	Bone	Sulawesi Selatan
162	SPR Tanete Riaja III (7 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Barru	Sulawesi Selatan
163	SPR Temmakkawatang	Sapi Potong	Pinrang	Sulawesi Selatan
164	Kelompok Tanunge'e (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Wajo	Sulawesi Selatan
165	Kelompok Sanrangan Jaya (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Gowa	Sulawesi Selatan
166	Kelompok Ajuarae (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Bone	Sulawesi Selatan
167	Kelompok Menjana (3 Kelompok lainnya)	Sapi Potong	Palopo	Sulawesi Selatan
168	Gangking Raya	Sapi Potong	Wajo	Sulawesi Selatan

NO	NAMA BADAN USAHA	BIDANG USAHA	KABUPATEN	PROVINSI
169	Kelompok Tri Darma Karya	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
170	SPR Parowa Utara	Sapi Potong	Bombana	Sulawesi Tenggara
171	Kelompok Budi Karya	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
172	Kelompok Tri Tunggal	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
173	Kelompok Sri Rejeki	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
174	Kelompok Tani Jaya Mandiri	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
175	Kelompok Maju Rejeki	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
176	Kelompok Anda Meura	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
177	SPR Lembu Citra Raya	Sapi Potong	Donggala	Sulawesi Tengah
178	SPR Jaya Giri	Sapi Potong	Badung	Bali
179	SPR Gerbang Selatan (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
180	SPR Doroncanga Bangkit (9 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Dompu	Nusa Tenggara Barat
181	SPR Ridho Ilahi (23 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
181	Kelompok Rade Ndeu (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
182	Kelompok KTT. Puteri Bekekam (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
183	Kelompok Aris Satedo 9 (13 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
184	Kelompok KTT Anugerah (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
185	Kelompok Budi Karya	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
186	Kelompok Garda Muda (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
187	Kelompok Nusa Indah (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
188	Kelompok Tegeng Karya (5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
189	Kelompok KTT Geger Maju (7 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
190	Kelompok Kawatuna (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
191	Kelompok KTT Al Muhajirin (12 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA BADAN USAHA	BIDANG USAHA	KABUPATEN	PROVINSI
192	Kelompok KTT Saling Periak (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
193	Kelompok Karya Makmur (14 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
194	Kelompok Bangkit Bersama (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
195	Kelompok Lendang Ara II (9 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
196	Kelompok Saleng Beme (8 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
197	Kelompok Suka Maju (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Kupang	Nusa Tenggara Timur
199	Kelompok Mekar Jaya (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Alor	Nusa Tenggara Timur
200	Koperasi Produsen Ternak SapiTunas Mekar	Sapi Potong	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
201	Koperasi Produksi Ternak Noetnana	Sapi Potong	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
202	Koperasi Produsen Sinar Pantulan Sulamu	Sapi Potong	Kupang	Nusa Tenggara Timur
203	Koperasi Produsen Baru Terbit Pantulan Sulamu	Sapi Potong	Kupang	Nusa Tenggara Timur
204	Koperasi Produsen Tirnam	Sapi Potong	Kupang	Nusa Tenggara Timur
205	Koperasi Serba Usaha Torere	Sapi Potong	Kupang	Nusa Tenggara Timur
206	Koperasi Tekad Maju	Sapi Potong	Kupang	Nusa Tenggara Timur
207	Koperasi Suka Maju	Sapi Potong	Kupang	Nusa Tenggara Timur
208	Lingkar Agro Sejahtera	Sapi Potong	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
209	SPR Bombera Tomage Savana Jaya (11 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Fak-Fak	Papua Barat
210	Koperasi Mekar Mulya	Sapi Perah	Majalengka	Jawa Barat
211	Kelompok Sukatani 3	Sapi Perah	Garut	Jawa Barat
212	Kelompok Mandiri Sejahtera	Sapi Perah	Bogor	Jawa Barat
213	SPR Tegar Beriman	Sapi Perah	Bogor	Jawa Barat
214	Kelompok Ciber (6 kelompok lainnya)	Sapi Perah	Kota Cimahi	Jawa Barat
215	SPR Bangkit Bersama	Sapi Perah	Pasuruan	Jawa Timur
216	KPSBU	Susu	Lembang	Jawa Barat
217	KPBS	Susu	Pangalengan	Jawa Barat
218	KSU Karya Nugraha	Susu		Jawa Barat
219	KSU Tandangsari	Susu	Sumedang	Jawa Barat
220	KPGS Cikajang	Susu	Garut	Jawa Barat
221	Koperasi Susu Bayongbong	Susu	Garut	Jawa Barat

NO	NAMA BADAN USAHA	BIDANG USAHA	KABUPATEN	PROVINSI
222	Puspa Mekar	Susu	Bandung Barat	Jawa Barat
223	Gemah Ripah, Sukabumi	Susu	Sukabumi	Jawa Barat
224	KPS Bogor	Susu	Bogor	Jawa Barat
225	KPSP Saluyu Kuningan	Susu	Kuningan	Jawa Barat
226	KPS Cianjur Utara	Susu	Cianjur	Jawa Barat
227	KSU Mitra Jaya Mandiri	Susu	Ciwidey	Jawa Barat
228	Giri Tani	Susu	Bogor	Jawa Barat
229	Sinar Jaya Ujungberung	Susu	Sukabumi	Jawa Barat
230	Makmur Selabintana	Susu	Sukabumi	Jawa Barat
231	Sarwa Mukti Cisarua	Susu	Cisarua	Jawa Barat
232	KUD Cepogo	Susu	Boyolali	Jawa Tengah
233	Kelompok Tani Ternak Susu Makmur	Susu	Semarang	Jawa Tengah
234	KUD. Musuk	Susu	Boyolali	Jawa Tengah
235	KUD. Jatinom	Susu	Klaten	Jawa Tengah
236	KUD. Kota	Susu	Kota Boyolali	Jawa Tengah
237	KUD. Mardi Mulya	Susu	Boyolali	Jawa Tengah
238	KUD. Banyumanik	Susu	Semarang	Jawa Tengah
239	KOP. Pesat	Susu	Purwokerto	Jawa Tengah
240	Andini Luhur	Susu	Semarang	Jawa Tengah
241	KUD. Dadi Jaya	Susu	Purwodadi	Jawa Tengah
242	KUD. Rukun	Susu	Salatiga	Jawa Tengah
243	KOP. Warga Mulya	Susu	Purwobinangun	DIY
244	KSU Jaya Abadi	Susu	Malang	Jawa Timur
245	KOP. Sae	Susu	Malang	Jawa Timur
246	KPSP. Setia Kawan	Susu	Malang	Jawa Timur
247	KUD. Sumber Makmur	Susu	Malang	Jawa Timur
248	KUTT. Suka Makmur	Susu	Malang	Jawa Timur
249	KUD. Tani Willis	Susu	Malang	Jawa Timur
250	KUD. Argopuro	Susu	Probolinggo	Jawa Timur
251	KAN. Jabung	Susu	Malang	Jawa Timur
252	KUD. Tani Makmur	Susu	Lumajang	Jawa Timur
253	KUD. Semen	Susu	Blitar	Jawa Timur
254	KUD. Kertajaya	Susu	Kediri	Jawa Timur
255	KUD. Batu	Susu	Malang	Jawa Timur
256	KUD. Sembada	Susu	Pasuruan	Jawa Timur
257	KUD. Karya Bakti	Susu	Kediri	Jawa Timur
258	KPSP. Sidodadi	Susu	Probolinggo	Jawa Timur
259	KUD. Karangploso	Susu	Malang	Jawa Timur
260	KUD. Tani Luhur	Susu	Kediri	Jawa Timur
261	KOP. Dana Mulya	Susu	Mojokerto	Jawa Timur
262	KUD. Anjasmoro	Susu	Jombang	Jawa Timur
263	KUD. Gondanglegi	Susu	Malang	Jawa Timur
264	KUD. Satya Dharma	Susu	Malang	Jawa Timur
265	KOPTAN. Jasa Tirta	Susu	Tulungagung	Jawa Timur
266	KUD. Tani Jaya	Susu	Kediri	Jawa Timur

NO	NAMA BADAN USAHA	BIDANG USAHA	KABUPATEN	PROVINSI
267	KUD. Suka Mulya	Susu	Kediri	Jawa Timur
268	KUD. Tulus Bhakti	Susu	Kediri	Jawa Timur
269	KUD. Sidoluhur	Susu	Kediri	Jawa Timur
270	SPR Harapan Manis	Kerbau	Serang	Banten
271	Kelompok Bahagia (4 kelompok lainnya)	Itik	Barru	Sulawesi Selatan

